



BAB IV

ANALISIS DESKRIPTIF INDIKATOR DAN VARIABEL TINGKAT DAYA SAING DAERAH

Bab ini ditujukan untuk memberikan gambaran keadaan unsur-unsur/indikator daya saing DIY. Analisis deskriptif yang dilakukan berbentuk penjabaran tentang gambaran beberapa variabel dalam indikator-indikator daya saing daerah. Analisis dalam bab ini tidak menjelaskan semua variabel yang diusulkan dalam landasan teori karena adanya keterbatasan data baik dalam bentuk ketiadaan variabel maupun tidak lengkapnya data runtut waktu dalam variabel tertentu. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari publikasi data pemerintah. Variabel-variabel yang dianalisis dalam Bab ini adalah:

1. Indikator kinerja Perekonomian secara Makro, terdiri dari variabel:
 - a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - b. Pertumbuhan ekonomi
 - c. Pendapatan per kapita
 - d. Investasi
 - e. Tabungan
 - f. Pengeluaran rumah tangga
2. Indikator keterbukaan perekonomian daerah, terdiri dari variabel:
 - a. Ekspor
 - b. Impor
 - c. Penanaman modal asing
 - d. Kunjungan Wisatawan Mancanegara
3. Indikator modal fisik, letak geografis dan sumber daya alam, terdiri dari variabel:
 - a. Modal fisik
 - b. Penggunaan internet oleh sektor usaha
 - c. Letak geografis



4. Indikator ketersediaan sumber daya manusia (SDM), terdiri dari variabel:
 - a. Angka ketergantungan
 - b. Tingkat harapan hidup
 - c. Angkatan kerja
 - d. Tingkat partisipasi SD, SMP dan SMA
 - e. Angka kelulusan
 - f. Indeks Pembangunan Manusia
 - g. Populasi penduduk perkotaan
 - h. Kualitas pelayanan kesehatan
 - i. Rasio dokter per satuan penduduk
 - j. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk
5. Indikator iklim sosial, politik dan aspek keamanan, terdiri dari variabel:
 - a. Penegakkan keputusan
 - b. Tingkat kejahatan
 - c. Aktivitas legislatif DPRD dan Pemda
 - d. Kegiatan unjuk rasa masyarakat
6. Indikator kualitas administrasi pemerintahan, terdiri dari variabel:
 - a. Korupsi dan suap
 - b. Kompetensi aparat pemerintah
 - c. Efisiensi pelayanan publik

4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

4.1.1. Analisis Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Nasional

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Rencana pembangunan jangka panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun”. Pemikiran dasar yang diharapkan adalah bahwa RPJP merupakan format rencana pembangunan jangka panjang yang menjadi dasar rencana pembangunan yang jangkauan waktunya lebih pendek, yaitu rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Namun, dokumen RPJP masih dipahami sebagai dokumen rencana



pembangunan yang dibatasi waktu. Dokumen RPJP bukan dokumen rencana pembangunan yang didefinisikan berdasarkan kaitannya dengan UUD 1945. Akibatnya, materi yang terkandung dalam Dokumen RPJPN 2005-2025 sebagai dokumen rencana jangka panjang yang pertama kali dimiliki Indonesia belum mempunyai kaitan kontekstual dan kaitan indikatif yang sistematis dengan UUD 1945. Sebagai contoh, RPJP-Nasional tahun 2005-2025 dilegalisasikan secara formal sebagai UU 17/2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005-2025. RPJPN 2005-2025 hadir belakangan setelah RPJMN 2004-2009. Padahal RPJP-Nasional terdiri atas 4 periode RPJMN, termasuk RPJMN 2004-2009. Dalam Lampiran UU RPJPN 2005-2025, masih banyak dijumpai materi-materi yang menimbulkan tafsiran ganda. Tafsiran ganda ini menimbulkan kebingungan memahami redaksi dalam Lampiran RPJPN itu. Penyempurnaan tata cara penyusunan RPJMN 2010-2014 melalui pengaturan baru dikhawatirkan mengalami kesulitan untuk menyambung konteks RPJPN 2005-2025 dalam RPJMN 2010-2014.

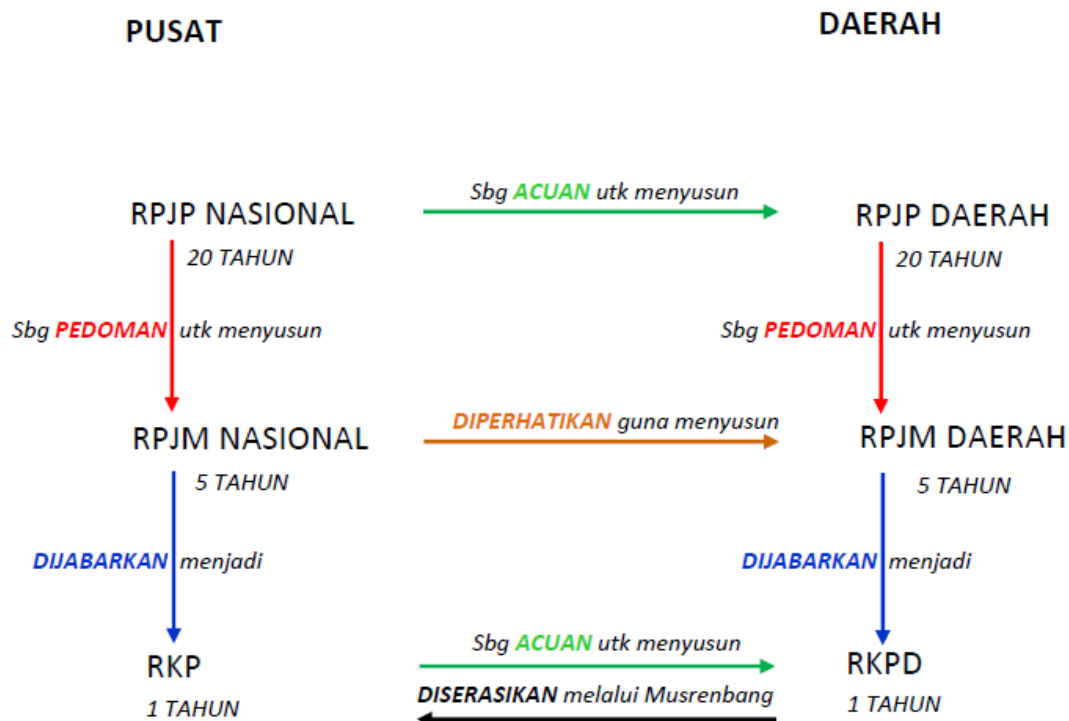
Rekomendasi penyempurnaan yang diperlukan adalah bahwa definisi RPJP seharusnya memuat kaitannya dengan UUD 1945, misalnya RPJP adalah rencana pembangunan untuk periode 20 tahun yang berfungsi sebagai kaidah pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Sebagai sebuah UU, sesudah UU seharusnya ada pengaturan level berikutnya. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 membutuhkan penjelasan lebih teknis perihal tata urutan kebijakan pembangunan yang menjadi materi dalam UU RPJPN tersebut. Pengaturan berikut yang diperlukan adalah penjelasan per definisi dan indikator tentang apa yang dimaksud dalam Lampiran UU RPJPN 2005-2025, terutama dalam Bab IV.2.Tahapan dan Skala Prioritas (hlm. 76-83 buku UU RPJPN 2005-2025 yang diterbitkan Kementerian PPN).

4.1.2. Analisis Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Provinsi dan Kabupaten/Kota

Secara umum pada level daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode yang sama, yaitu 20 (dua puluh) tahun. Pola hubungan antara rencana jangka panjang daerah provinsi dengan rencana jangka panjang daerah kabupaten/kota tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-undang Nomor 25



tahun 2004, tidak seperti halnya antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Akibatnya, materi yang terkandung dalam dokumen RPJPD Provinsi 2005-2025 belum mempunyai kaitan kontekstual dan kaitan indikatif yang sistematis dengan RPJPD Kabupaten/Kota 2005-2025 sekalipun keduanya mengacu kepada RPJPN 2005-2025. Oleh karena itu, sinergitas perencanaan jangka panjang provinsi dengan perencanaan jangka panjang kabupaten/kota sulit dilakukan. Perlu sebuah metodologi yang dilegal-formalkan untuk mensinergikan/menyelaraskan dokumen perencanaan jangka panjang daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dengan dokumen perencanaan jangka panjang nasional. Pola hubungan mengacu antara RPJP Nasional dengan RPJPD di dalam peraturan perundangan belum dijelaskan lebih lanjut, apalagi bedanya dengan mempedomani ataupun memperhatikan.



Gambar 4.1. Pola Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



4.1.2.1. Analisis Visi RPJPD 2005-2025 antara provinsi dan kabupaten/kota

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa, “Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Pemikiran dasar yang diharapkan adalah menjadikan “visi” dalam UU SPPN ini sebagai kristalisasi dari dua pengertian, yaitu (1) merupakan keinginan jangka panjang dari kepala pemerintahan baik itu Presiden, Gubernur, maupun Bupati/Walikota; (2) merupakan penjabaran dari tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, belum ada pedoman lanjutan tentang bagaimana menyusun dan mengukur visi yang baik. Oleh karena itu, perlu difikirkan memberikan pedoman atau wacana tentang bagaimana suatu visi dapat dirumuskan dengan baik dan bersinergi antara pusat dan daerah ataupun antara daerah provinsi dan kabupaten/kota. Perbandingan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Pembangunan RPJPD antara Provinsi dan Kab/Kota dapat dilihat dalam Tabel 4.1 dalam Lampiran.

Visi jangka panjang provinsi dan kabupaten/kota se-DIY mempunyai kesamaan kondisi akhir yang diharapkan, dengan ditandai oleh kata kunci yang sama yaitu kesejahteraan. Namun demikian, terdapat penekanan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Perbedaan ini tentu akan membawa konsekuensi terhadap pola penyelarasan yang harus dibangun agar tetap dapat bersinergi antara daerah satu dengan lainnya. Visi DIY pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera adalah sebuah visi yang lebih memperlihatkan bahwa DIY akan mempunyai keunggulan komparatif pada sektor Pendidikan, Budaya dan Pariwisata dibanding provinsi lainnya. Jika dilihat lebih mendalam tentang visi kabupaten/kota, maka Visi kabupaten/kota di DIY yang selaras dengan visi DIY ini adalah Visi Kota Yogyakarta. Sedangkan visi kabupaten lainnya lebih banyak ke arah cita-cita yang berbeda. Ini sebenarnya dapat menjadi persoalan yang serius. Pencapaian Visi provinsi menjadi tantangan yang tidak mudah ketika visi kabupaten/kota di dalamnya tidak sama. Kata kunci yang dapat dijadikan solusi adalah penyelarasan program/kegiatan dibawah visi yang sudah terlanjur dinyatakan oleh masing-masing kabupaten/kota tersebut.



4.1.2.2. Analisis Misi RPJPD 2005-2025 antara provinsi dan kabupaten/kota

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 di dalam ketentuan pasal/ayatnya menyebutkan bahwa, “Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. Pemikiran dasar yang diharapkan adalah menjadikan “misi” dalam UU SPPN ini sebagai kristalisasi dari dua pengertian, yaitu (1) merupakan keinginan jangka pendek dari kepala pemerintahan baik itu Presiden, Gubernur, maupun Bupati/Walikota; (2) merupakan penjabaran operasional dari tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, belum ada pedoman lanjutan tentang bagaimana menyusun dan mengukur misi yang baik. Untuk itu sama halnya dengan visi, perlu difikirkan perlunya memberikan pedoman atau wacana tentang bagaimana suatu misi dapat dirumuskan dengan baik.

Jika dicermati misi jangka panjang provinsi dan kabupaten/kota se-DIY, maka pada level misi ini sudah mulai terlihat ada banyak penyelarasan. Aspek yang ditekankan dalam misi yang dibawa oleh masing-masing daerah memperlihatkan empat substansi yang hampir sama, yaitu: pertama adalah menyangkut pembangunan sumber daya manusia dalam semua aspek, kedua misi pembangunan ekonomi daerah, ketiga perbaikan tata kelola pemerintahan, keempat adalah pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Kabupaten Bantul sedikit berbeda warna substansi misinya karena di dalamnya terdapat upaya yang ditonjolkan pada pengurangan resiko bencana. Dan ini hanya ada di Bantul, sehingga menjadi pembeda dengan daerah lainnya.

4.1.2.3. Analisis Sasaran RPJPD 2005-2025 antara provinsi dan kabupaten/kota

Sasaran di masing-masing daerah sudah menggambarkan akhir dari tujuan misi yang dibawanya. Hanya saja penuangannya masih terlihat kurang terukur, sehingga perlu dicarikan parameter-parameter yang tepat agar sasaran yang sudah ditentukan dapat diukur capainnya. Ibaratnya seperti istilah dalam matematika, yaitu besaran dan satuan.



Sasaran yang dituangkan sebagian besar adalah masih besaran yang tidak mempunyai satuan. Oleh karena itu, sasarannya masih terlihat sangat kualitatif ukurannya.

Sedangkan keterpaduan sasaran antara masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah cukup bersinergi. Yang kemudian perlu diperhatikan selanjutnya adalah masalah kelompok sasaran. Jika obyek yang sama disasar oleh dua atau lebih tingkatan pemerintahan, maka diperlukan sinkronisasi agar tidak overlapping dan lebih adil dan merata.

4.1.2.4. Analisis Arah Pembangunan RPJPD 2005-2025 antara provinsi dan kabupaten/kota

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. Pemikiran dasar yang diharapkan adalah memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan. Namun, saat ini belum ada definisi operasional yang baku dan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan kebijakan dalam konteks dokumen perencanaan. Kekosongan definisi ini mengakibatkan munculnya aneka ragam ketetapan pemerintah yang bersifat kebijakan namun mempunyai tingkatan yang berbeda antara kebijakan yang satu dan kebijakan lainnya. Dalam persoalan sehari-hari kita sering dihadapkan pada istilah kebijakan public yang dalam konteks rencana pembangunan akan membingungkan para perencana dalam setiap jenjang prosesnya. Misalnya: ada istilah “kebijakan industri gula”, di sisi lain ada pula “kebijakan pembangunan nasional”. Publik dan pemerintah akan bingung menentukan “kebijakan” mana yang dipakai dalam konteks UU SPPN.

Pada kenyataan lain, kita sering kali mendapati adanya kebijakan yang juga membuat kebijakan berikutnya. Jika kita menganggap RPJMN sebagai kebijakan, seharusnya RPJMN dianggap sebagai kebijakan final. Namun, pada kenyataannya kita masih mendapati kebijakan yang dinyatakan dalam RPJMN masih bersifat mentah. Ini bukanlah watak kebijakan itu sendiri, misalnya dalam RPJMN masih sering dijumpai narasi yang bunyinya “diperlukan peraturan...”, “disusunnya kebijakan...”, “perlu disusunnya rencana strategis....”, dan seterusnya.



Kementerian PPN sepertinya perlu memelopori penentuan definisi operasional “kebijakan”. Kementerian PPN juga perlu memberikan pemahaman tentang makna kebijakan yang boleh dinyatakan dalam dokumen rencana pembangunan. Persoalan ini akan sangat pelik mengingat dapat mengundang perbedaan pendapat yang tajam dalam pemahaman kebijakan dalam teks dokumen rencana pembangunan. Meski demikian, hal ini perlu segera dimulai agar kelak di kemudian hari tidak muncul persoalan pemborosan keuangan Negara akibat ketidakjelasan definisi operasional yang baku tentang kebijakan dalam konteks dokumen rencana pembangunan.

Jika dilihat arah pembangunan di masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se DIY, maka arah pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi maupun arah pembangunan kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya masih belum seragam. Memang bisa dilihat bahwa semua daerah bermaksud menyejahterakan masyarakatnya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang cukup serta mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan tersebut. Akan tetapi sinergi pengembangan antar sektor unggulan serta daya dukung daerah maupun eksternalitas antar daerah belum muncul. Sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah harus ditingkatkan sehingga pemanfaatan APBD serta sumber lain lebih efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

4.2. Mengidentifikasi Kesesuaian Antara Indikator Unggulan Setiap Variabel Di Setiap Kabupaten/Kota Dengan Arah Kebijakan Yang Ditetapkan Pemerintah

4.2.1. Analisis Sektor Industri

4.2.1.1. Komoditas Industri Unggulan Versi Pemerintah Pusat

Pengembangan industri unggulan daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya pembangunan ekonomi nasional khususnya pada pembangunan industri. Pemerintah pusat telah menentukan bahwa industri unggulan DIY dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam aturan tersebut, industri pengolahan unggulan DIY adalah (a) Industri Pengolahan Kulit menjadi barang-barang dari



kulit, alas kaki dan barang kerajinan dari kulit, dan (b) Industri Pengolahan Kayu menjadi industri meubel, komponen bahan bangunan, kerajinan dan ukiran dari kayu.

Penentuan produk pengolahan kulit dan kayu sebagai industri unggulan didasarkan atas pertimbangan hasil analisis terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah antara lain kontribusi nilai produk-produk tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, investasi dan potensi pengembangan lima tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain.

Pemerintah pusat mengamankan pengembangan industri pengolahan unggulan DIY yang tertuang dalam dokumen Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 138/M-Ind/Per/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen ini telah mengamankan tahapan pengembangan masing-masing industri unggulan beserta peran stakeholder terkait baik dari internal dan eksternal DIY dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2010 ke 2014. Lebih jauh tentang tahapan pengembangan kedua komoditas unggulan tersebut bisa dilihat di Perencanaan Pembangunan Perekonomia Daerah Tahun 2013.

4.2.1.2. Komoditas Industri Unggulan Versi Kajian Bappeda

Pada tahun 2009, Bappeda DIY telah melakukan kajian untuk mengetahui deskripsi kondisi dan merumuskan pengembangan produk unggulan di DIY yang dapat digunakan sebagai input dalam perencanaan pembangunan daerah. Kriteria produk unggulan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pemakaian bahan baku dalam negeri lebih dari 70%,
2. Menyerap banyak tenaga kerja lebih dari 70%,
3. Pemasaran:
 - a. Pasar ekspor lebih dari 90%:
 - Nilai ekspor lebih besar dari US\$ 1 juta,
 - Negara tujuan ekspor lebih dari 3 negara,
 - Pertumbuhan ekspor lebih dari 5% selama 4 tahun.
 - b. Pasar dalam negeri kurang dari 10%



Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dan melalui beberapa analisis, komoditas industri pengolahan unggulan adalah subsektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, dan subsektor industri kayu dan barang dari kayu lainnya. Temuan kajian ini sejalan dengan penentuan komoditas unggulan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 4.1
Perkembangan Volume (juta Kg) dan Nilai (juta USD)
Ekspor Produk Unggulan DIY Tahun 2005 - 2008

No.	Komoditas	2005		2006		2007		2008	
		Vol.	Nilai	Vol.	Nilai	Vol.	Nilai	Vol.	Nilai
1	Pakaian jadi tekstil	4,66	45,3	3,68	44,23	2,96	34,41	2,57	33,9
2	Mebel kayu	23,02	42,6	18,01	32,31	14,4	26,1	11,35	24,28
3	Sarung tangan kulit	0,21	8,46	0,3	13,41	0,24	10,56	0,35	16,93
4	Kerajinan kayu	2,38	4,71	2,15	5,61	2,5	4,85	2,22	5,14
5	Kerajinan kulit	0,09	1,71	0,17	2,02	0,1	1,8	0,16	1,26
Total		30,36	102,78	24,31	97,58	20,2	77,72	16,65	81,51

Sumber : Data yang diolah

Perkembangan ekspor komoditas produksi pengolahan unggulan mengalami dinamika pada periode 2005 – 2008. Kebanyakan komoditas mengalami penurunan kinerja setelah gempa bumi tahun 2006, meskipun secara total nilai ekspor mengalami kenaikan setelah sempat turun akibat gempa tersebut. Sementara itu volume ekspor selalu mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan bahwa nilai ekspor per volume ekspor senantiasa mengalami kenaikan.

4.2.1.3. Industri Kreatif

Sementara itu, satu sektor yang penting dikembangkan sebagai produk unggulan adalah industri kreatif yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005 – 2025. Industri kreatif cukup berkembang di DIY (Bappeda DIY, 2009) . Potensi industri kreatif yang berkembang di DIY terbagi dalam bidang industri yang meliputi kerajinan sebanyak 20.293 unit usaha, desain fashion sebanyak 4258 unit



Analisis Daya Saing Daerah

usaha, permainan interaktif sebanyak 200 unit usaha perangkat lunak dan 250 unit usaha perangkat keras. Untuk industri kreatif di bidang pariwisata, mempunyai potensi sebanyak ± 60 (enam puluh) desa wisata yang tersebar di 4 Kabupaten yang berupa kreasi atraksi wisata, kegiatan interaktif dalam kehidupan masyarakat dan akomodasi yang unik di desa wisata yang diminati oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Selain itu terdapat industri kreatif di bidang kebudayaan yang meliputi 25 Production House, seni tari sebanyak 341 kelompok, dan seni drama sebanyak 411 kelompok. Pentahapan pengembangan industri kreatif masuk dalam pelaksanaan misi ke-4 RPJPD yaitu Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan industri kreatif oleh DIY telah selaras dengan strategi pembangunan oleh Pemerintah Pusat. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah pusat sudah semakin menaruh perhatiannya. Sedikitnya ada Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Tenaga Kerja. Dalam Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2025 yang dirumuskan oleh Departemen Perdagangan RI dijelaskan adanya evolusi ekonomi kreatif. Industri kreatif berdasarkan publikasi Departemen Perdagangan RI (2008) ada sekitar 14 jenis/klasifikasi, yaitu: periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, desain fesyen, video-film-fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan.

Pada tingkat global, perkembangan industri kreatif pun sudah terjadi selama lebih dari satu dekade terakhir. Pergeseran dari era pertanian ke era industrialisasi lalu ke era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi ekonomi. Perkembangan industrialisasi menciptakan pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan efisien. Adanya target lebih murah dan lebih efisien dalam proses produksi dan distribusi berakibat pada pergeseran konsentrasi industri dari negara barat ke negara berkembang seperti Asia karena tidak bisa lagi menyaingi biaya yang lebih murah di China dan Jepang. Fenomena ini mengarahkan industri-industri di negara maju



untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan kreativitas. Untuk itu sejak tahun 1990an perekonomian dunia mulai bergeser menuju perekonomian yang didukung oleh kreativitas dengan istilah ekonomi kreatif melalui industri kreatif.



Analisis Daya Saing Daerah

Tabel 4.2
Tahap Prioritas Misi IV DIY

TAHAP II	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
	2	3	4	5	6	7	8
MISI IV:							
Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat							
Pengembangan sistem industri yang ramah lingkungan di lingkup usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi berbasis keluarga, teknologi yang berkualitas, inovatif, dan jangkauan pemasaran yang lebih luas, sumberdaya manusia yang terampil, dengan motivasi usaha dan kewirausahaan yang kuat, didukung lembaga pelatihan dan pendidikan yang maju dan berkembang.	a. Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial. b. Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya potensi industri kreatif. c. Peningkatan ketrampilan dan pemanfaatan secara nyata. d. Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal. e. Peningkatan inovasi produk dan jangkauan pemasarannya. f. Pengembangan bidang industri kerajinan dan industri kreatif dengan melibatkan lembaga pendidikan dan profesional. g. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompeten baik dalam negeri maupun luar negeri.	7. Meningkatkan komoditas produk industri di lingkup usaha, mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri kreatif yang khas dan orisinal, didukung lokasi-lokasi kegiatan industri yang berperan sebagai daya tarik kunjungan dan atraksi wisata daerah.	a. Pemasyarakatan peraturan dan penerapan tata ruang wilayah yang tanggap dini terhadap perkembangan dan dinamika sosial ekonomi di masa depan. b. Peningkatan peluang investasi disertai jaminan fasilitas dan kemudahan prosedur. c. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif untuk mendorong perekonomian rakyat. d. Mempertahankan dan mengembangkan kerjasama kemitraan, baik dalam maupun luar negeri.	7. Meningkatkan komoditas, produk industri kecil, kerajinan rakyat dan industri kecil, koperasi yang menjangkau pasar lebih luas dan berkualitas, di tingkat regional, nasional, dan internasional.	a. Akselerasi, optimalisasi, dan integrasi proses kegiatan sosial ekonomi, permukiman, dan industri kreatif dengan dinamika pembangunan tata-ruang, serta ketersediaan infrastruktur wilayah didukung pemanfaatan energi dan sumber daya mineral. b. Mempertahankan dan mengembangkan peluang investasi. c. Perkuatan industri kreatif menuju pasar internasional. d. Perkuatan jejaring dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.	7. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (<i>craftmanship</i>) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpotensi memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi.	a. Pemantapan budaya berkerajinan (<i>craftmanship</i>) didukung pemantapan standard mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif. b. Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar.



Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal dalam kajian yang telah dilakukan Bappeda DIY (2009), maka selama tahun 2010 – 2014 arah pengembangan industri kreatif di DIY adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sistem informasi dan basis data industri kreatif DIY,
2. Peningkatan kreativitas dan teknologi dalam proses produksi,
3. Pengembangan klaster industri kreatif DIY,
4. Fasilitasi pembiayaan usaha,
5. Fasilitasi pemasaran produk industri kreatif,
6. Fasilitasi kerjasama antara pelaku industri kreatif dengan lembaga penelitian dan pengembangan industri.

Secara rinci tahapan pengembangan industri kreatif pada tahun 2010 sampai dengan 2014 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 4.3
Matriks Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Kreatif di DIY Tahun 2010 – 2014

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi Utama	Institusi Pendukung
				1	2	3	4	5		
1	Penyediaan system informasi dan basis data industry kreatif	a. Penyediaan profil industri kreatif DIY,	1. Kajian penyusunan profil industri kreatif DIY,	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM
			2. Kajian penyusunan pola produksi dan perdagangan industry kreatif DIY,	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM
			3. Penyusunan basis data industry kreatif DIY,	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM BKPM
			4. Penyusunan system informasi industry kreatif DIY.	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM BKPM
		b. Promosi industry kreatif DIY.	1. Penyusunan website profil industry kreatif DIY,	X	-	-	-	-	DisperindagkopUKM	BKPKM
			2. Sosialisasi system informasi dan basis data industry kreatif DIY kepada investor dan importir,	-	X	X	X	X	BKPM	DisperindagkopUKM Bappeda
			3. Sosialisasi industry kreatif DIY pada <i>event-event</i> MICE,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM
			4. <i>Update</i> basis data industry kreatif secara periodik.	X	X	X	X	X	Bappeda	DisperindagkopUKM BKPM



No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi Utama	Institusi Pendukung
				1	2	3	4	5		
2	Peningkatan penerapan teknologi (terutama teknologi informasi dan komunikasi) dalam proses produksi	a. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses produksi,	1. Kajian penyusunan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di industry kreatif DIY,	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM BKPM
			2. Bimbingan teknis penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses produksi,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM
			3. Pendampingan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses produksi.	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	Bappeda BKPM
		b. Bantuan penerapan teknologi dalam proses produksi.	1. Bantuan perbaikan teknologi yang digunakan dalam proses produksi,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	Bappeda
			2. Sosialisasi informasi penerapan teknologi terkini yang efisien dalam proses produksi.	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM
3	Peningkatan kreativitas dalam proses produksi	a. Pendidikan dan pelatihan kreativitas dalam proses produksi,	1. Pendidikan dan pelatihan kreativitas dalam proses produksi,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM



Analisis Daya Saing Daerah

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi Utama	Institusi Pendukung
				1	2	3	4	5		
			2. Workshop kreasi produk di industry kreatif,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM DisperindagkopUKM	BKPM
			3. Lokakarya kreativitas dan daya saing industry kreatif DIY.	X	X	X	X	X	Bappeda	BKPM
		b. Penyusunan profil kreasi produk industry kreatif sesuai kebutuhan pasar.	1. Kajian penyusunan profil kreasi produk industry kreatif DIY,	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM
			2. Kajian strategi peningkatan kreativitas dalam proses produksi di industry kreatif	X	-	-	-	-		DisperindagkopUKM
4	Pengembangan sentra industry kreatif DIY	a. Penyusunan rencana pengembangan sentra industry kreatif DIY,	1. Kajian penyusunan sentra industry kreatif DIY,	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM
			2. Sosialisasi pengembangan sentra industry kreatif DIY,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM
			3. Kajian strategi pengembangan sentra industry kreatif terpilih.	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM
		b. Bimbingan dan pengawasan sentra industry kreatif DIY.	1. Bimbingan teknis pengembangan sentra industry kreatif DIY,	-	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM



No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi Utama	Institusi Pendukung
				1	2	3	4	5		
			2. Pendampingan pengelolaan sentra industry kreatif DIY,	-	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM,Bappeda
			3. Pengawasan langsung perkembangan sentra industry kreatif DIY.	-	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM
5	Fasilitasi pembiayaan usaha	a. Penyusunan proposal pembiayaan usaha,	1. Bimbingan teknis penyusunan proposal pembiayaan usaha,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	Bappeda BKPM
			2. Pendampingan penyusunan proposal pembiayaan usaha.	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	Bappeda BKPM
		b. Bantuan kerjasama pembiayaan usaha dengan lembaga keuangan,	1. Fasilitasi kerjasama sosiasi industry kreatif DIY dan asosiasi / industry lembaga keuangan,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	Bappeda BKPM
			2. Bantuan teknis kemudahan persyaratan pengajuan pembiayaan usaha.	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	Bappeda BKPM
		c. Bantuan dana bergulir.	Bantuan dana bergulir kepada produsen industry kreatif terpilih	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	Bappeda BKPM
6	Fasilitasi pemasaran produk industry kreatif DIY	a. Penyusunan strategi pemasaran dan target	1. Kajian penyusunan strategi pemasaran dan target pasar produk industry kreatif DIY,	X	-	-	-	-	Bappeda	DisperindagkopUKM



Analisis Daya Saing Daerah

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi Utama	Institusi Pendukung
				1	2	3	4	5		
		pasar,	2. Sosialisasi strategi pemasaran dan peluang potensi pasar produk industry kreatif DIY.	-	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	Bappeda BKPM
		b. Bantuan kerjasama pemasaran produk industry kreatif di event-event MICE daerah,	1. Bantuan teknis komunikasi aktif antara produsen industry kreatif dengan eksportir dan importir,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM Bappeda
			2. Bantuan teknis penyusunan peluang kerjasama antara produsen industry kreatif dengan pengelola event-event MICE.	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM, Bappeda
		c. Bantuan pemasaran produk industry kreatif di media informasi bisnis daerah.	1. Bantuan sosialisasi atau publikasi produk industry kreatif DIY di website pemerintah daerah,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM Bappeda
			2. Bantuan promosi dagang di acara promosi industry dan produk daerah di tingkat nasional,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM
			3. Bantuan promosi dagang di acara promosi industry dan produk daerah di tingkat	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM



No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi Utama	Institusi Pendukung
				1	2	3	4	5		
			internasional.							
7	Fasilitasi kerjasama antara produsen industry kreatif dengan lembaga penelitiand an pengembangan ekonomi/industri/ bisnis	Bantuan kerjasama antara produsen industry kreatif dengan lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi/industri/ bisnis.	1. Bantuan teknis komunikasi aktif antara produsen industry kreatif dengan lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi/industri/ bisnis,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM Bappeda
			2. Bantuan teknis penyusunan peluang kerjasama antara produsen industry kreatif dengan lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi/industri/ bisnis,	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM Bappeda
			3. Bantuan teknis pengawasan pelaksanaan kerjasama antara produsen industry kreatif dengan lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi/industri/ bisnis.	X	X	X	X	X	DisperindagkopUKM	BKPM Bappeda

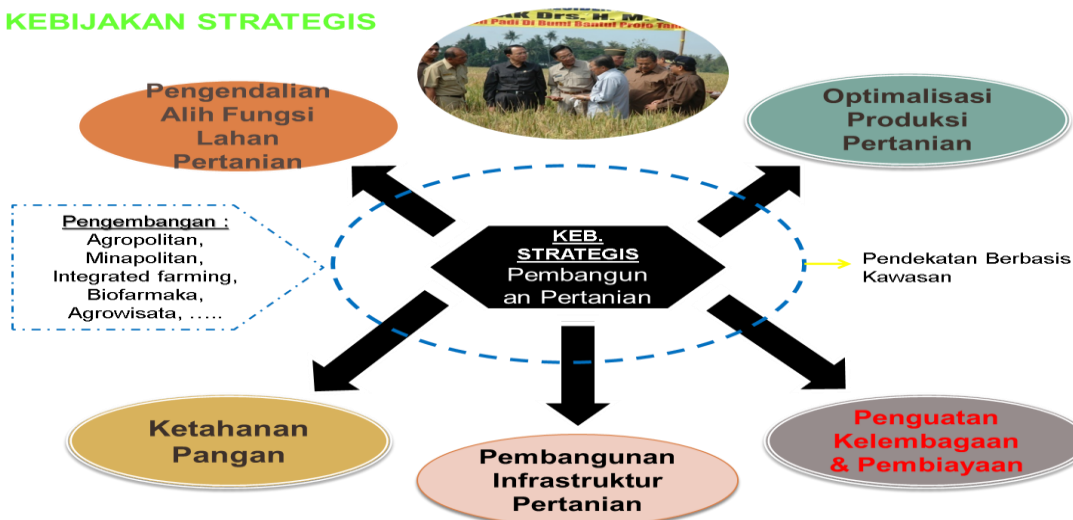
4.2.2. Analisis Sektor Pertanian

4.2.2.1. Kebijakan dan Program Strategis

Pertanian masih cukup dominan sebagai sektor yang memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian DIY. Kontribusi pertanian tersebut diharapkan dapat turut serta dalam pengurangan angka kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi DIY secara umum. Dalam hal ini pemerintah propinsi DIY telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang menyangkut pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan
 - Lahan merupakan faktor produksi beras yang penting dan tak terbarukan.
 - Ketersediaan lahan diperlukan dalam keberlanjutan produksi
 - Semakin lama keberadaan lahan makin terdesak oleh kepentingan lain seperti: jalan, industri, tempat tinggal sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk
2. Optimalisasi produksi pertanian
3. Ketahanan pangan
4. Pembangunan infrastruktur pertanian
5. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan

KEBIJAKAN STRATEGIS

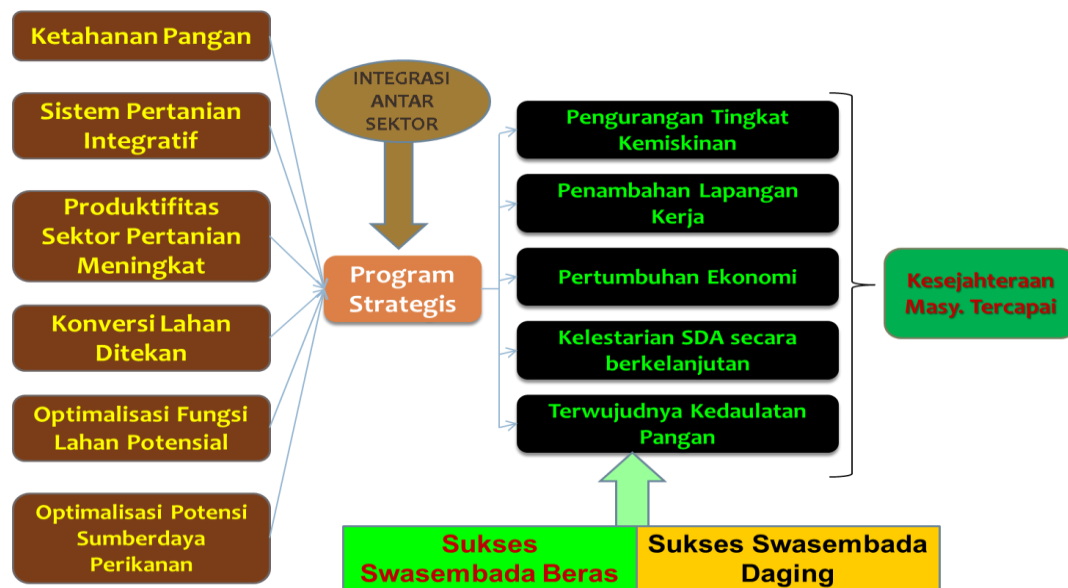


Gambar 4.2. Kebijakan Strategis Sektor Pertanian

Sumber : Bappeda DIY, 2012



Kunci Desain Pembangunan Bidang Pertanian Provinsi DIY Tahun 2012



Gambar 4.3. Program Pembangunan Sektor Pertanian
Sumber : Bappeda DIY, 2012

4.2.2.2. Sasaran Pembangunan Sektor Pertanian

Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian DIY Tahun 2009 – 2013, maka sasaran yang akan dicapai mencakup:

1. Meningkatkan ketersediaan dan fungsi prasarana dan sarana pertanian sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Tercapai peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan palawija) sebesar 1,49% per tahun;
3. Produksi sayuran, buah, tanaman hias, dan biofarmaka meningkat, sebesar 2% per tahun;
4. Tercapai peningkatan populasi ternak sebesar 1,95% per tahun.

Adapun yang menjadi focus dalam rencana aksi 2013 adalah :

- Pengetasan Kemiskinan (*Pro Poor*) → peningkatan pendapatan petani TPH-NAK-PPHP , modal (16 kec, 1.600 kk)

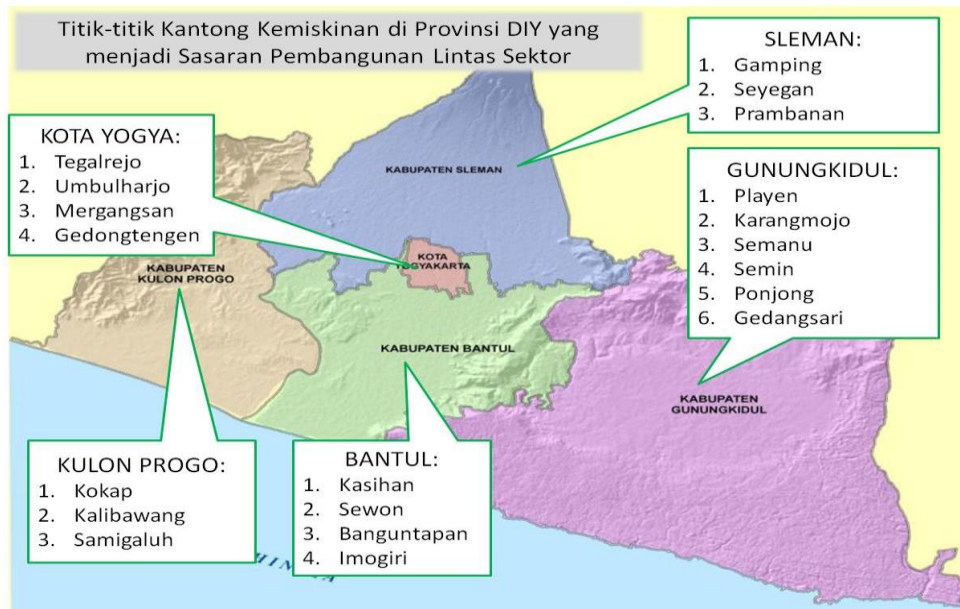


Analisis Daya Saing Daerah

- Mendukung Sukses Program Strategis Nasional dan Daerah (P2BN, Kahorti, PSDSK, IF, JB, PPLB)
- Melanjutkan dan memantapkan Sukses 2012 (Program Reguler : SDM, benih, POPT, tupoksi dinas)
- Program Prospektif (*hortipark*, organik, pertanian komunal)

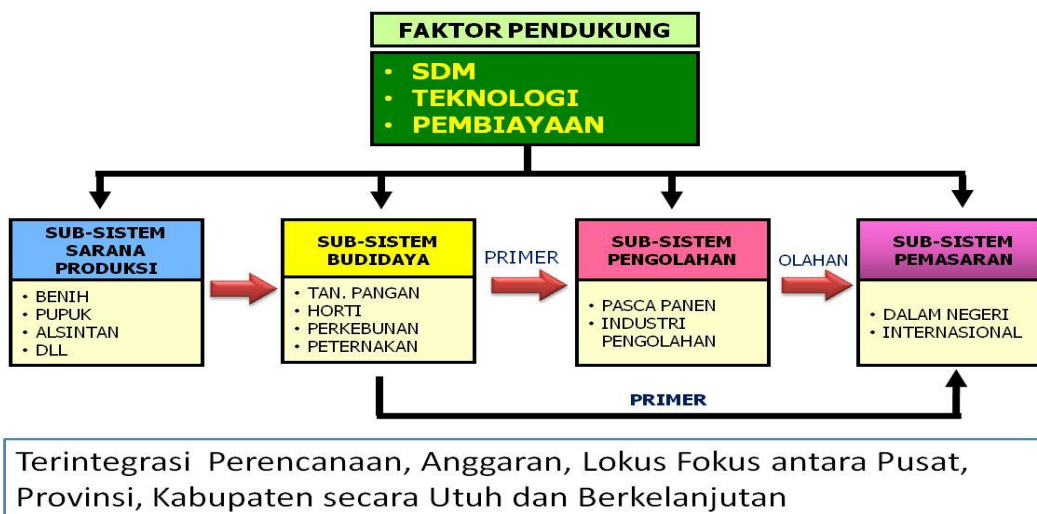
Program dan rencana aksi tersebut telah disesuaikan dengan rencana program nasional yang merupakan 5 (lima) program pokok APBN :

1. Program peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, pada Ditjen Tanaman Pangan
2. Program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan, pada Ditjen Hortikultura
3. Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian, pada Ditjen PPHP
5. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pada Ditjen PSP



Gambar 4.4. Titik-titik Kantong Kemiskinan DIY

POLA PENDEKATAN SISTEM PEMBANGUNAN AGRIBISNIS SECARA TERINTEGRASI



Gambar 4.5. Pola Pendekatan Sistem Pembangunan Agribisnis Terintegrasi



4.2.3. Analisis Sektor Pariwisata

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai keistimewaan dengan berbagai potensi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dari daerah lain. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari segi aspek historis yang dimilikinya tetapi juga berbagai keindahan alam serta keunikan lokal baik budaya serta masyarakatnya.

Karakteristik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keseluruhan area atau lingkup kabupaten yang ada amatlah beranekaragam. Hal ini berpengaruh terhadap potensi daya tarik wisata yang ada di tiap daerah. Potensi obyek dan daya tarik DIY yang menjadi andalan sampai saat ini serta dikenal luas adalah obyek dan daya tarik budaya. Obyek tersebut berupa bangunan peninggalan kebudayaan di masa lalu, candi dan kraton. Obyek dan daya tarik wisata budaya tersebut sebagian besar terletak di bagian timur wilayah Yogyakarta dan sekitar Kraton. Kondisi obyek dan daya tarik sejarah sampai saat ini sudah banyak yang dikembangkan.

4.2.3.1. Industri Pariwisata

Dewasa ini, industri pariwisata merupakan industri yang dikembangkan dan diandalkan sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun definisi dari industri pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yakni, “Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata”, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika industri pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mengacu pada definisi “Industri Pariwisata” tersebut, maka struktur industri pariwisata meliputi 13 jenis usaha pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 14 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mengenai klasifikasi usaha pariwisata, yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori terdiri dari usaha daya tarik wisata, kategori usaha transportasi wisata, kategori usaha fasilitas pariwisata / akomodasi dan MICE, serta kategori usaha konsultasi ; informasi ; dan jasa lainnya.



4.2.3.2. Tinjauan Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kepariwisata terkait dengan Daerah Istimewa Yogyakarta - Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS)

Dalam UU No 10/ 2009 Tentang Pembangunan Kepariwisata pasal 8 disebutkan bahwa “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.”

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa “Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.”

Dari pasal-pasal tentang pembangunan kepariwisataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) haruslah selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan RIPPARDA meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Sehingga RIPPARNAS dapat menjadi pedoman bagi pembuatan RIPPARDA provinsi-provinsi di Indonesia dan selanjutnya RIPPARDA provinsi dapat menjadi RIPPARDA kabupaten/kota.



Gambar 4.6. Keselarasan RIPPARNAS dan RIPPARDA

4.2.3.3. Tinjauan Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta - Perda RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada Rencana Induk Pariwisata Daerah ini, dalam hal penataan pola pemanfaatan ruang selain mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional juga mengacu pada Perda RTRWP DIY No 2 tahun 2010. Tujuan dan sasaran RTRWP Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain:

- (1) Penataan Ruang Daerah bertujuan:
 - a. terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
 - b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
 - c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan;
 - d. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;



- e. meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdayaguna, berhasilguna dan tepat guna;
- f. mencegah benturan kepentingan dalam penggunaan sumberdaya;
- g. meningkatkan kondisi alam dan prasarana untuk mengembangkan pariwisata; dan
- h. meningkatkan prasarana dan sarana untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan;

(2) Penataan Ruang Daerah mempunyai sasaran untuk:

- a. menetapkan aturan dan memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, pengembangan sistem permukiman, sistem prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis;
- b. menetapkan aturan dan memberikan arahan kebijakan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna laut dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan; dan
- c. menetapkan aturan dan memberikan arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengutamakan kegiatan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;

Pada pasal 36 dikemukakan bahwa Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam kawasan budidaya salah satunya adalah kawasan peruntukan pariwisata.

Pasal 36

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan lindung bawahan;
- b. kawasan lindung setempat;
- c. kawasan suaka alam;
- d. kawasan suaka margasatwa; dan



e. kawasan rawan bencana alam.

(3) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan pertambangan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;**
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan pendidikan tinggi;
- h. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- i. kawasan militer dan kepolisian.

Selanjutnya dalam pasal 64, 65 dan 66 dikemukakan lebih lanjut mengenai jabaran pasal 36

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 64

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (3) huruf e, memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam.

Pasal 65

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan :

- a. melestarikan obyek wisata;
- b. memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana;
- c. mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya; dan
- d. menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai.

Pasal 66

Arahan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi :



- a. kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- b. kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman; dan
- c. kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Dalam RTRWP DIY juga terdapat pembagian kawasan strategis yang dapat diarahkan dalam pembagian kawasan pengembangan kepariwisataan khusus

Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 97

Kawasan Strategis di Daerah meliputi :

- a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis pelestarian sosial budaya;
- c. kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
- d. kawasan strategis lindung dan budidaya; dan
- e. kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut.

Pasal 98

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a meliputi :

- a. kawasan strategis nasional meliputi kawasan perkotaan Yogyakarta.
- b. kawasan strategis provinsi meliputi :
 - a) kawasan perkotaan Yogyakarta;
 - b) kawasan koridor yang menghubungkan Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop, dan Sadeng;
 - c) kawasan koridor yang menghubungkan Temon, Wates, Yogyakarta, dan Prambanan;
 - d) IKK Sewon, Kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri, dan Piyungan di Kabupaten Bantul;
 - e) IKK Godean, dan Pakem di Kabupaten Sleman;



- f) Kawasan Peruntukan Industri Sentolo di Kabupaten Kulon Progo; dan
- g) Kawasan Koridor yang menghubungkan Tempel, dan Parangtritis.

Pasal 99

Kawasan strategis pelestarian sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan strategis nasional kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman; dan
- b. kawasan strategis provinsi meliputi: Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul.

Pasal 100

Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c terdiri atas :

- a. kawasan pantai selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul; dan
- b. kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunung Merapi Kabupaten Sleman.

Pasal 101

Kawasan strategis lindung dan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d terdiri atas :

- (1) Kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.743,250 ha di Kecamatan Turi, Cangkringan dan Pakem Kabupaten Sleman.
- (2) Kawasan strategis provinsi meliputi :
 - a. kawasan ekogeowisata karst di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kabupaten Bantul; dan
 - c. kawasan Pantai Wedi Ombo di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 102

Kawasan strategis pengembangan pesisir, dan pengelolaan hasil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e terdiri atas :



- a. Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo di Kabupaten Bantul;
- b. Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot di Kabupaten Kulon Progo; dan
- c. Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngrehenan dan Pantai Gesing di Kabupaten Gunungkidul.

Selain itu dalam RTRWP DIY dikemukakan pula mengenai Indikasi Arah peraturan zonasi untuk sistem jaringan Transportasi Provinsi. Dalam Pasal 18 mengenai Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi Provinsi sebagaimana dikemukakan sebelumnya dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b bahwa Peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah
- b. hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi; dan
- d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

4.2.3.4. Program Penataan Ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Visi RPJP DIY 2005 – 2025

Visi dari RPJP DIY 2005 – 2025 adalah “DIY pada 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.”

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, di masa depan DIY merupakan daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri,



perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat dipengaruhi pula oleh kemajuan masyarakat. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Masyarakat sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Adapun dari visi tersebut dapat dijabarkan visi dari masing – masing kabupaten, yakni:

- Kota Yogyakarta: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.”
- Sleman: “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing.”
- Bantul: “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.”



- Kulon Progo: “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo tahun 2026 yang sejahtera dan mandiri berbasis agribisnis dan pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya.”
- Gunung Kidul: “Gunungkidul yang berdaya saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025.”

Dari beberapa visi kabupaten / kota tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten / kota sudah memprioritaskan pembangunan sektor kepariwisataan dengan mengutamakan kualitas agar berdaya saing.sataan telah menjadi salah satu sektor utama di DIY.

B. Misi RPJP DIY 2005 – 2025

Misi dari RPJP DIY 2005 – 2025 yang menunjang pembangunan sektor kepariwisataan adalah :

- Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
- Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan
- Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
- Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat

Dari keempat misi tersebut, pembangunan sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diarahkan kepada pembangunan yang kreatif dan inovatif serta berbasis budaya dan kearifan lokal.



4.3. Daya Dukung Pengembangan Potensi Ekonomi DIY

Tabel 4.4
Daya Dukung Pengembangan Potensi Ekonomi DIY: Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul

Sektor Dominan	BANTUL			KULON PROGO			GUNUNG KIDUL		
	Pertanian	Industri pengolahan	Perdagangan hotel dan restoran	Pertanian	Industri pengolahan	Perdagangan hotel dan restoran	Pertanian	Industri pengolahan	Perdagangan hotel dan restoran
Kontribusi sektoral *2010	22,04	16,54	20,11	26,52	14,36	16,56	38,08	11,06	14,92
Relisasi Investasi PMDN	Nilai 962 Miliar Rupiah, Realisasi 104,4%			Nilai 756 Miliar Rupiah, Realisasi 11,19%			Nilai 96,9 Miliar Rupiah, Realisasi 55,96%		
Realisasi Investasi PMA	Nilai 36,7 Juta USD, Realisasi 40,11%			Nilai 111 Juta USD, Realisasi 78,84%			Nilai 16,3 Juta USD, Realisasi 99,24%		
Pertumbuhan Ekonomi	4,72 %			3,06%			4,15%		
Nilai dan Share PDRB (ADHK) dalam Juta Rupiah dan %	3.967.928 (juta) dengan share 18,86%			1.781.227 (juta) dengan share 8,46%			3.330.080 (juta) dengan share 15,82%		
Pendapatan Per Kapita (ADHK)	4.353.170			4.580.532			4.930.660		
Luas wilayah	506,85 km ² (15,91%)			586,27 Km ² (18,40%)			1.485.36 km ² (46,62%)		
Luas Lahan Pertanian (Sawah)	15.465 ha			10.304 ha			7.865 ha		
Luas Lahan Non Pertanian	13.296 ha			13.296 ha			36.554 ha		
Jumlah Pasar									
Jaringan Jalan berkualitas baik	366.16 km			396.40			359.50		
Jumlah Hotel Bintang									
Jumlah Hotel Non Bintang	322			19			45		
Jumlah Mal									
Jumlah Rumah Sakit									
Jumlah Koperasi Non KUD	387			294			387		
Jumlah Bank dan Kantor Lembaga Keuangan									
Jumlah Sambungan Telepon (2008)	4134			2340			3276		



Tabel 4.5
Daya Dukung Pengembangan Potensi Ekonomi DIY: Sleman, Kota Yogyakarta

SLEMAN			KOTA YOGYAKARTA		
Pertanian	Industri pengolahan	Perdagangan hotel dan restoran	Industri pengolahan	Perdagangan hotel dan restoran	Pengangkutan dan Komunikasi
14,60	15,07	22,77	10,43	25,12	20,37
Nilai 34 Miliar Rupiah, Realisasi 13,3%			Nilai 35 Miliar Rupiah, Realisasi 52,22%		
Nilai 324 Juta USD, Realisasi 4,21%			Nilai 1,7 Juta USD, Realisasi 16,5 %		
4,67%			4,75%		
6.373.200 (juta) dengan share 30,29%			5.505.942 (juta) dengan share 26,16%		
1.079.233			14.177.204		
574.82 km ² (18.04%)			32.50 km ² (1,02%)		
22.819 ha			85 ha		
18.020 ha			2.978 ha		
339.63 km			99.15 km		
14			20		
388			318		
22			11		
567			546		
			22		
18081			94833		



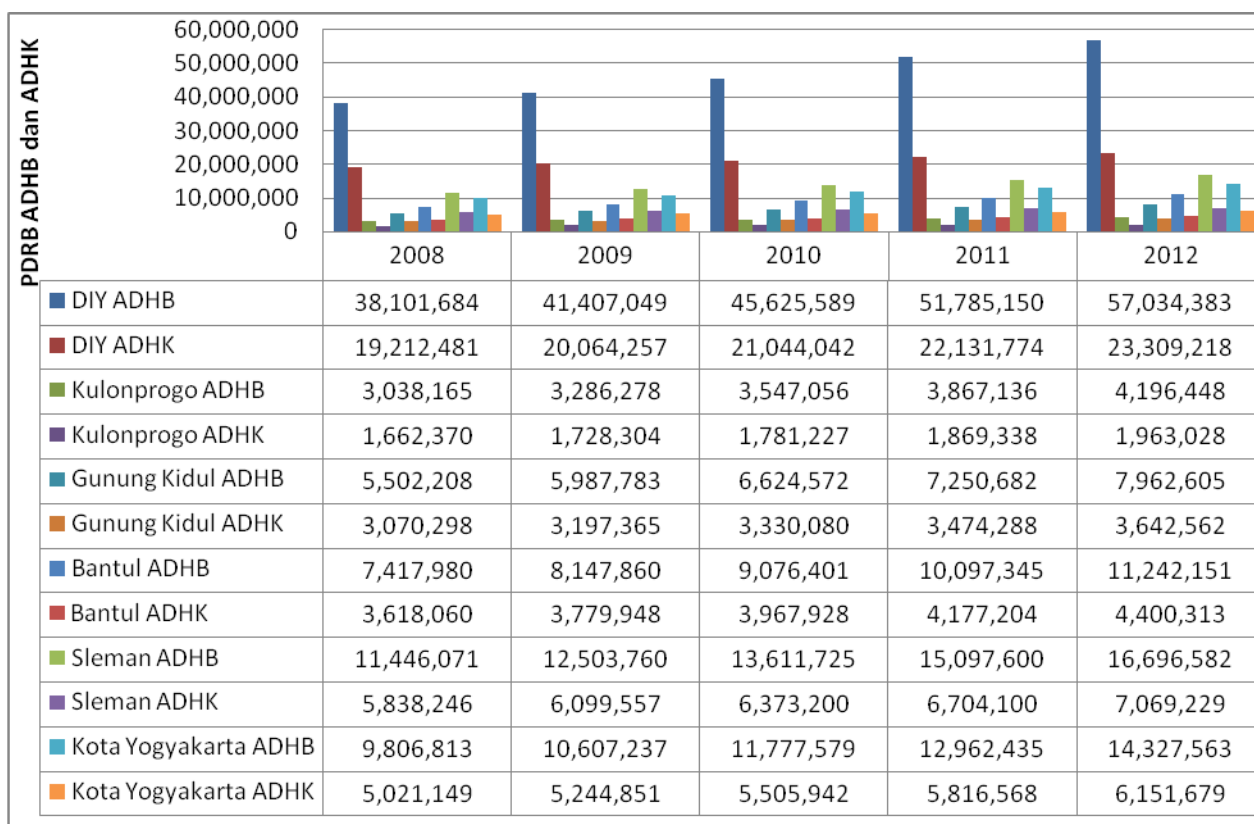
Analisis Daya Saing Daerah

4.4. Ukuran Kinerja Secara Umum Perekonomian Daerah Secara Makro

Kinerja secara umum perekonomian daerah secara makro bisa diukur dengan beberapa indikator berikut ini.

4.4.1. PDRB

Kinerja ekonomi makro yang diukur dengan PDRB menunjukkan adanya peningkatan output daerah baik dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) seperti ditunjukkan pada Gambar 4.7. Hal itu disebabkan selalu adanya kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif sepanjang tahun 2008 – 2012 meskipun terjadi dinamika terutama di tahun 2009 dan 2010 yang akan ditunjukkan pada analisis terkait pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman yang diikuti oleh Kota Yogyakarta. Sementara itu, daerah yang menghasilkan output terendah pada periode tersebut adalah Kabupaten Kulonprogo.



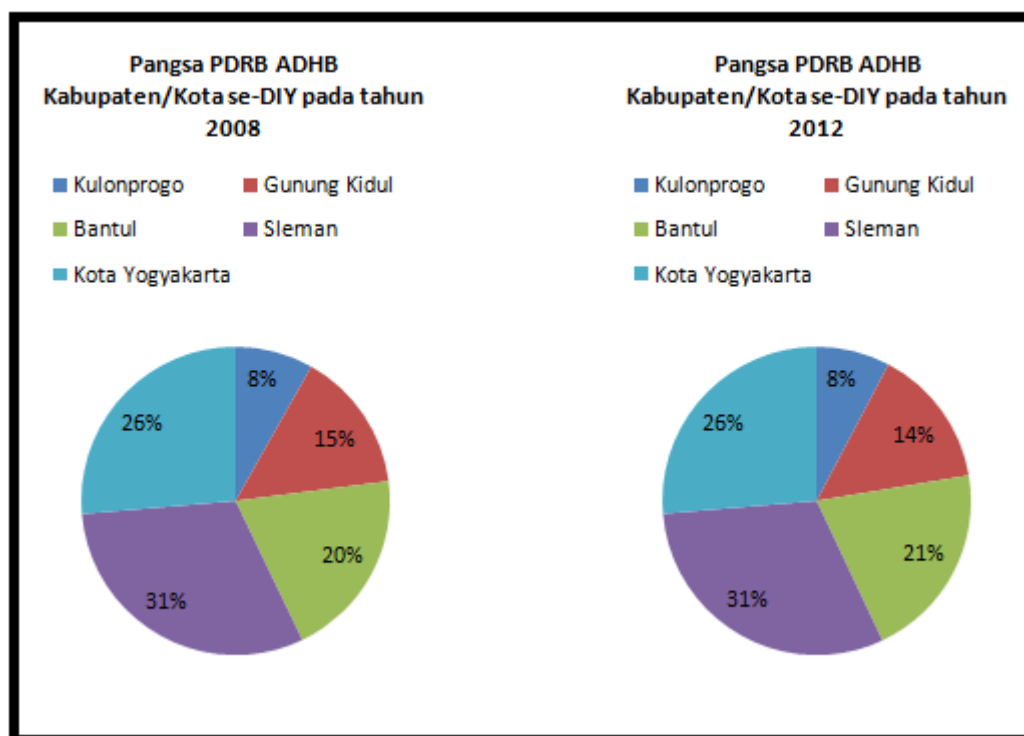
Gambar 4.7. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2008 – 2012 (dalam juta Rupiah)

Sumber: BPS, 2012



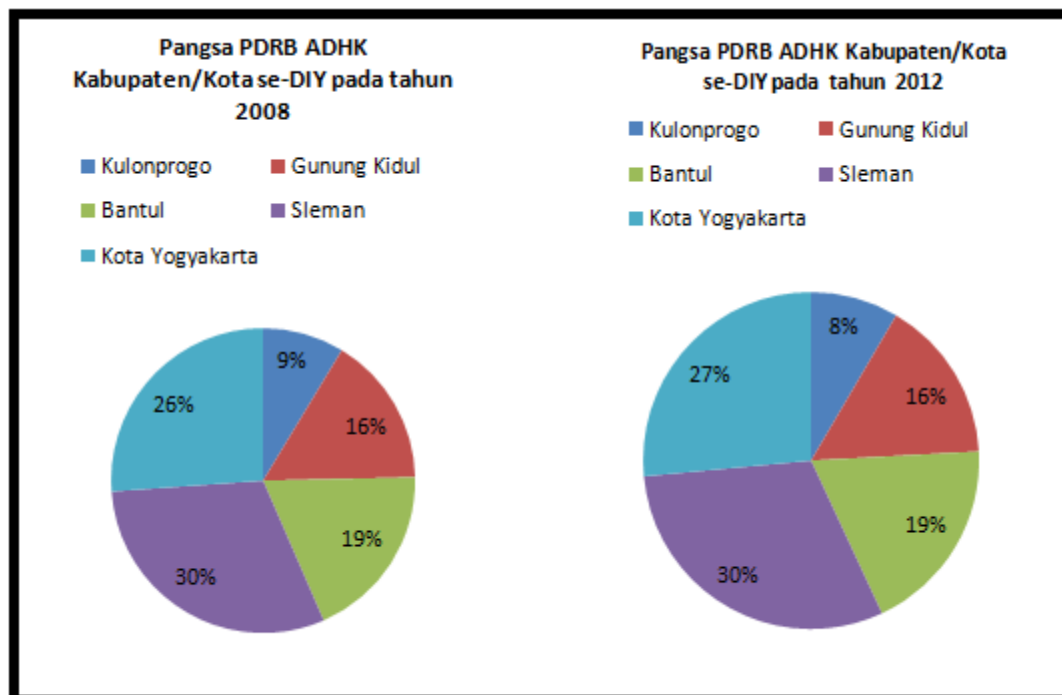
Kabupaten Sleman menghasilkan PDRB baik ADHB maupun ADHK tertinggi se-DIY, mencapai peningkatan dari PDRB ADHB sebesar Rp11,45 triliun dan PDRB ADHK sebesar Rp5,84 triliun di awal periode menjadi PDRB ADHB sebesar Rp16,79 triliun dan PDRB ADHK sebesar Rp7,07 triliun di akhir periode. Kabupaten Kulonprogo adalah daerah yang mencapai output terendah se-DIY. Kabupaten Kulonprogo mencapai peningkatan PDRB ADHB sebesar Rp3,08 triliun dan PDRB ADHK sebesar Rp1,66 triliun di tahun 2008 menjadi PDRB ADHB sebesar Rp4,20 triliun dan PDRB ADHK sebesar Rp1,96 triliun di tahun 2013.

Meskipun output di semua kabupaten/kota mengalami peningkatan, namun disparitas kapasitas ekonomi antar kabupaten/kota se-DIY tetap terjadi. Pada tahun 2008 dan 2012, pangsa kontribusi PDRB ADHB dan ADBK Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mendominasi PDRB seluruh DIY dengan kontribusi di atas 50% seperti ditunjukkan pada empat Gambar 4.8. berikut. Hampir sepertiga output DIY dihasilkan oleh Kabupaten Sleman selama periode 2008 - 2012. Kabupaten Kulonprogo yang menghasilkan output terkecil hanya menyumbang sekitar 8% - 9% dari keseluruhan output DIY.



Gambar. 4.8. Pangsa PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2008 dan 2012

Sumber: BPS 2012, diolah

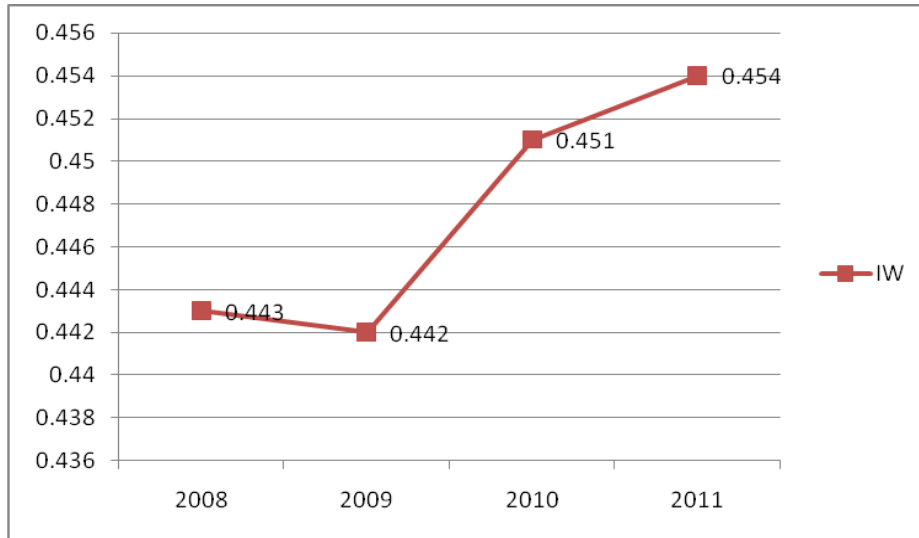


Gambar 4.9. Pangsa PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2008 dan 2012

Sumber: BPS, 2012, diolah



Ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota juga dapat ditunjukkan pada Indeks Williamson pada Gambar 4.10. Ketimpangan di DIY sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008, namun kemudian terus mengalami kenaikan sampai tahun 2011. Kenaikan Indeks Williamson menunjukkan ketidakmerataan yang semakin lebar.



Gambar 4.10. Perkembangan Indeks Williamson (IW) tahun 2008 - 2011

Sumber: Bappeda, 2012

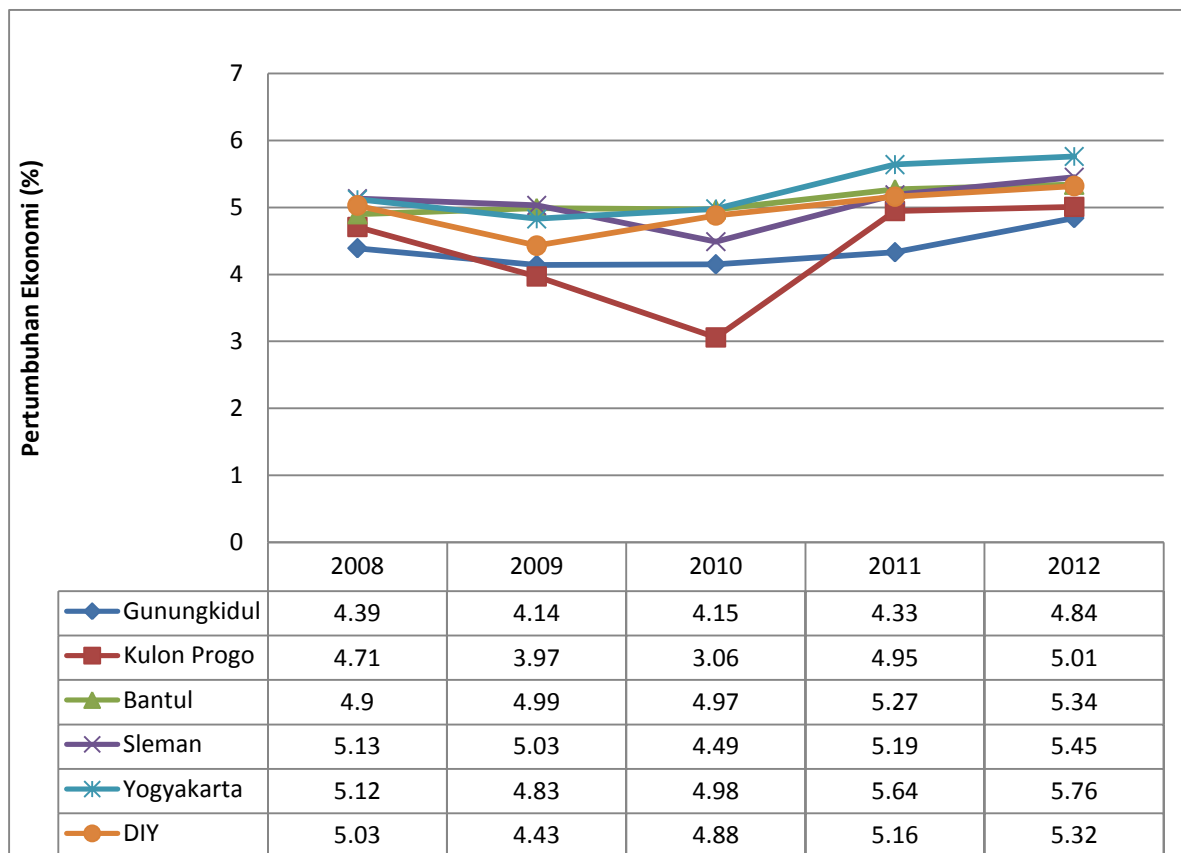
4.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan output yang dihasilkan suatu masyarakat di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya penambahan output yang dihasilkan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi DIY selama 2009 – 2012 mengalami tren menaik meskipun tidak tajam dan sempat terjadi penurunan tingkat pertumbuhan pada tahun 2009 seperti di tunjukkan pada Gambar 4.11. Secara umum, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman berada di atas rata-rata Provinsi, sementara itu dua kabupaten lain yaitu Kulonprogo dan Gunung Kidul selalu berada di bawah rata-rata se-DIY. Daerah yang memiliki dominasi pertumbuhan tertinggi se-DIY adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2010, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu di Kabupaten Kulonprogo dan Sleman yang diakibatkan oleh bencana letusan Gunung Merapi. Penurunan di beberapa hampir semua kabupaten/kota di DIY sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2009 yang



Analisis Daya Saing Daerah

merupakan dampak dari krisis ekonomi dunia yang ditandai antara lain dengan menurunnya kinerja ekspor di tahun tersebut. Volume ekspor DIY tahun 2009 sebesar 31 Juta Kg yang mengalami penurunan dari capaian pada tahun 2008 sebesar 40,6 Juta Kg (Bappeda, 2012). Nilainya ekspor DIY pun mengalami penurunan dari sebesar 130,3 Juta US\$ di tahun 2008, menjadi 109 Juta US\$ pada tahun 2009. (LKPD AMJ, 2012)



Gambar 4.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Kab/Kota se-DIY (2008-2012)

Sumber: BPS 2011, 2012

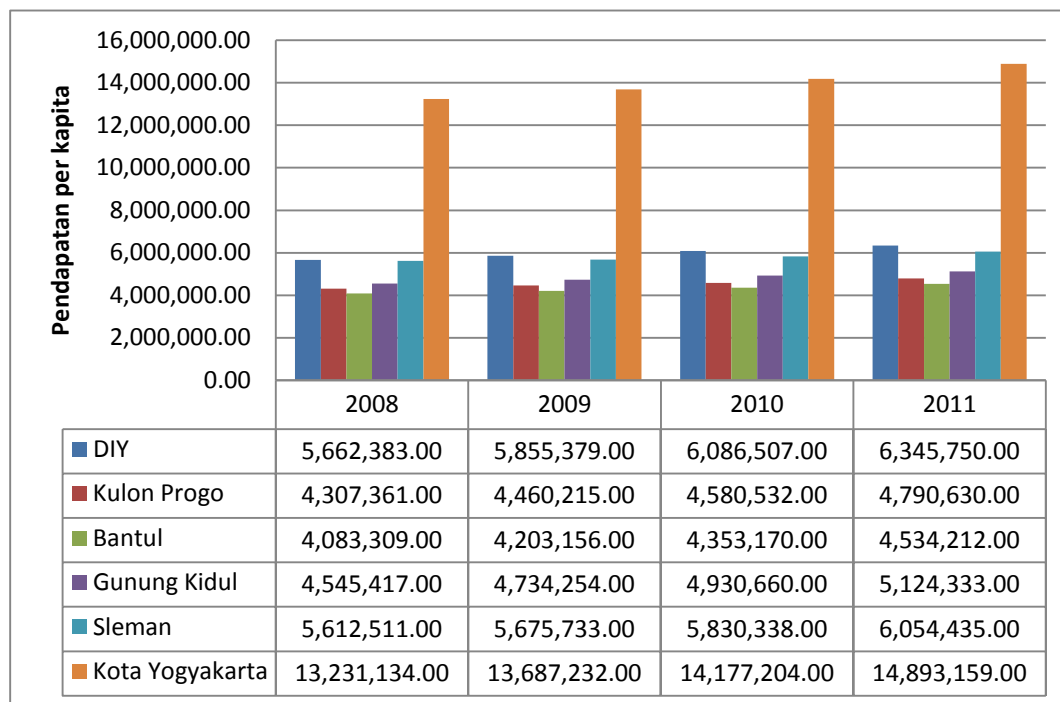
4.4.3. Pendapatan Per Kapita

Selama tahun 2008 sampai dengan 2012, pendapatan per kapita di semua kabupaten dan kota mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.6. Kabupaten yang menduduki peringkat terendah dalam capaian pendapatan per kapita, nilai pendapatan perkapita naik dari Rp4.083.309,00 di tahun 2008 menjadi Rp4.534.212.00,00. Kota Yogyakarta yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi mencapai peningkatan pendapatan



per kapita dari Rp13.231.134,00 di tahun 2008 menjadi Rp14.893.159,00 di tahun 2012. Pendapatan per kapita Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sleman meskipun PDRB Kabupaten Sleman lebih tinggi dibandingkan Kota Yogyakarta. Hal itu terjadi karena jumlah penduduk di Kabupaten Sleman lebih banyak dibandingkan penduduk Kota Yogyakarta. Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebanyak 1.093.110 orang sedangkan penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 388.627.

Kinerja peningkatan pendapatan per kapita tidak diimbangi dengan perbaikan kesenjangan. Ketimpangan terjadi pada pendapatan per kapita antar kabupaten dan kota selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012. Selama periode tersebut, pendapatan per kapita Kota Yogyakarta menduduki peringkat tertinggi yang nilainya lebih dari dua kali lipat dari pendapatan per kapita tiap kabupaten.



Gambar 4.12. Pendapatan Per Kapita DIY Kabupaten/Kota se DIY (Rp)

Sumber: BPS, beberapa edisi

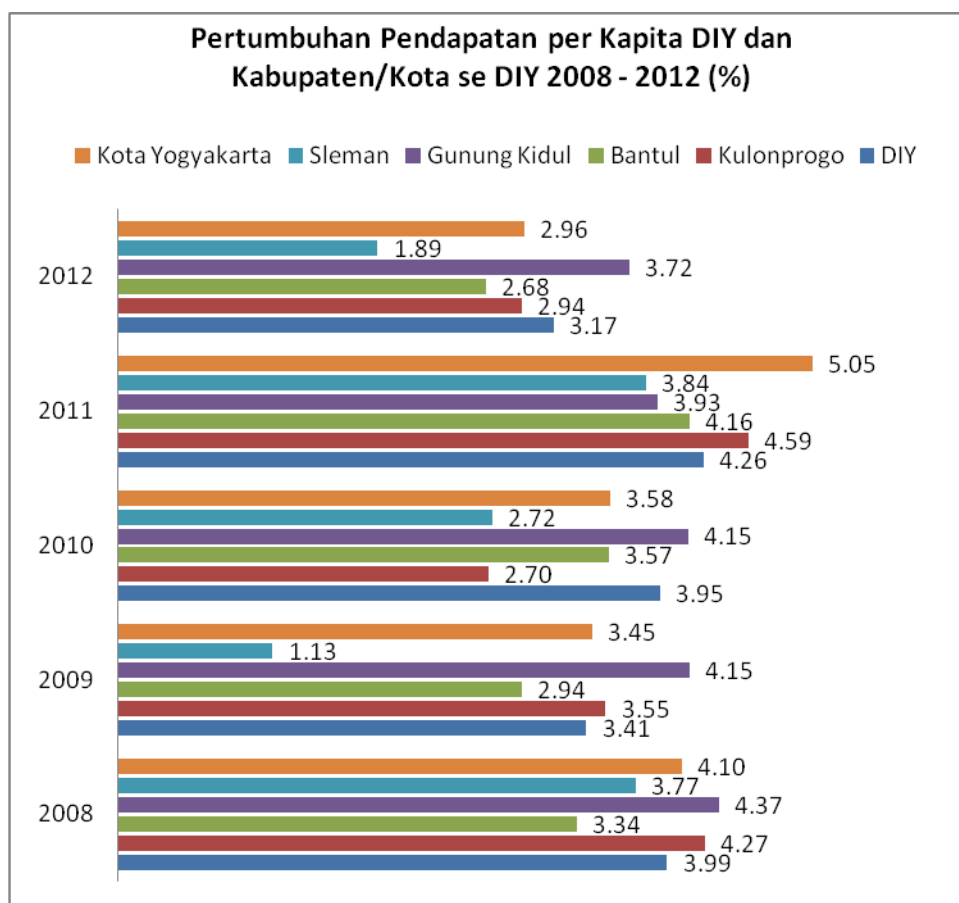
Perbandingan tingkat pendapatan per kapita antar daerah relatif tidak berubah, namun pertumbuhannya menunjukkan dinamika yang sangat bervariasi. Pada beberapa tahun pertumbuhan tertinggi diraih oleh daerah yang sudah memiliki pendapatan per kapita tertinggi



Analisis Daya Saing Daerah

namun di tahun lain pertumbuhan tertinggi dapat diraih oleh daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah. Secara umum, pertumbuhan pendapatan per kapita di hampir seluruh kabupaten dan kota sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 namun kemudian meningkat kembali di tahun 2011. Pertumbuhan sempat mengalami penurunan kembali di tahun 2012. Pada periode tersebut pertumbuhan per kapita tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,05%.

Pertumbuhan pendapatan per kapita dari seluruh Kabupaten dan Kota se-DIY pada tahun 2008 sampai dengan 2012 ditunjukkan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13. Pertumbuhan Pendapatan per Kapita DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2008-2012, (%)

Sumber: BPS, beberapa edisi

Kota Yogyakarta mempunyai daya saing yang tinggi terkait dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang tinggi mencerminkan daya beli masyarakat yang tinggi



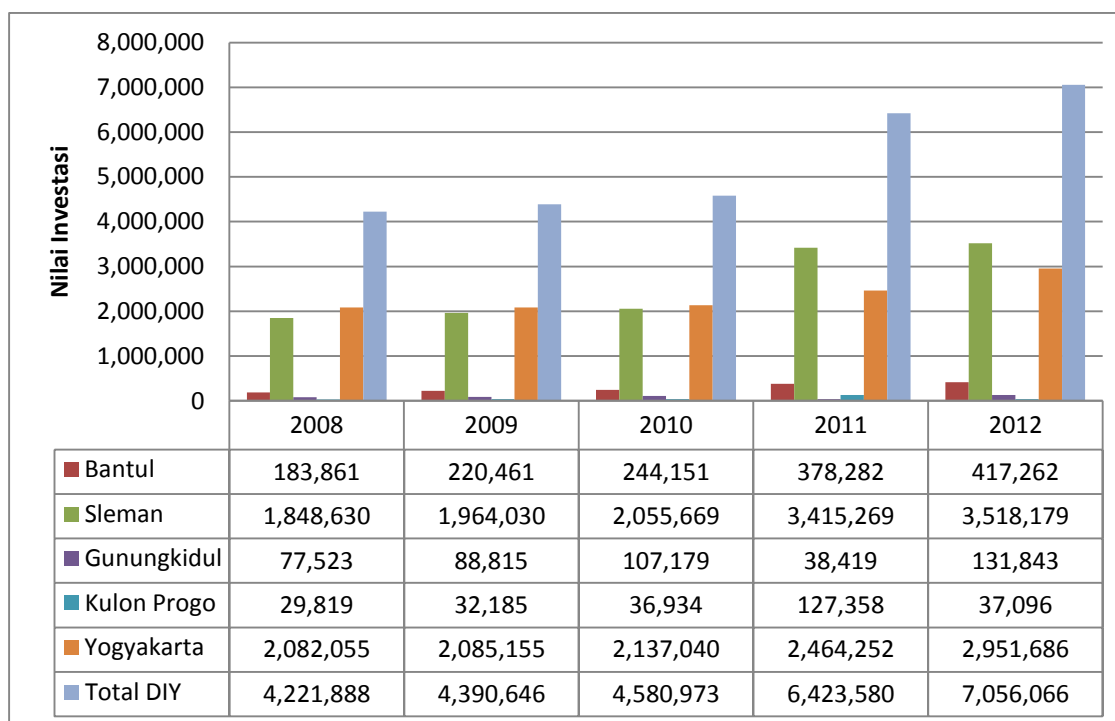
juga. Pendapatan yang tinggi dapat memberikan potensi pasar yang tinggi. Potensi pasar lokal yang tinggi merupakan daya tarik bagi investor untuk mengembangkan bisnis guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, sehingga akan mendorong investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Kabupaten Sleman yang memiliki pertumbuhan ekonomi mendekati rata-rata se-DIY beberapa kabupaten lain namun memiliki pertumbuhan pendapatan per kapita yang rendah karena tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi.

4.4.4. Investasi

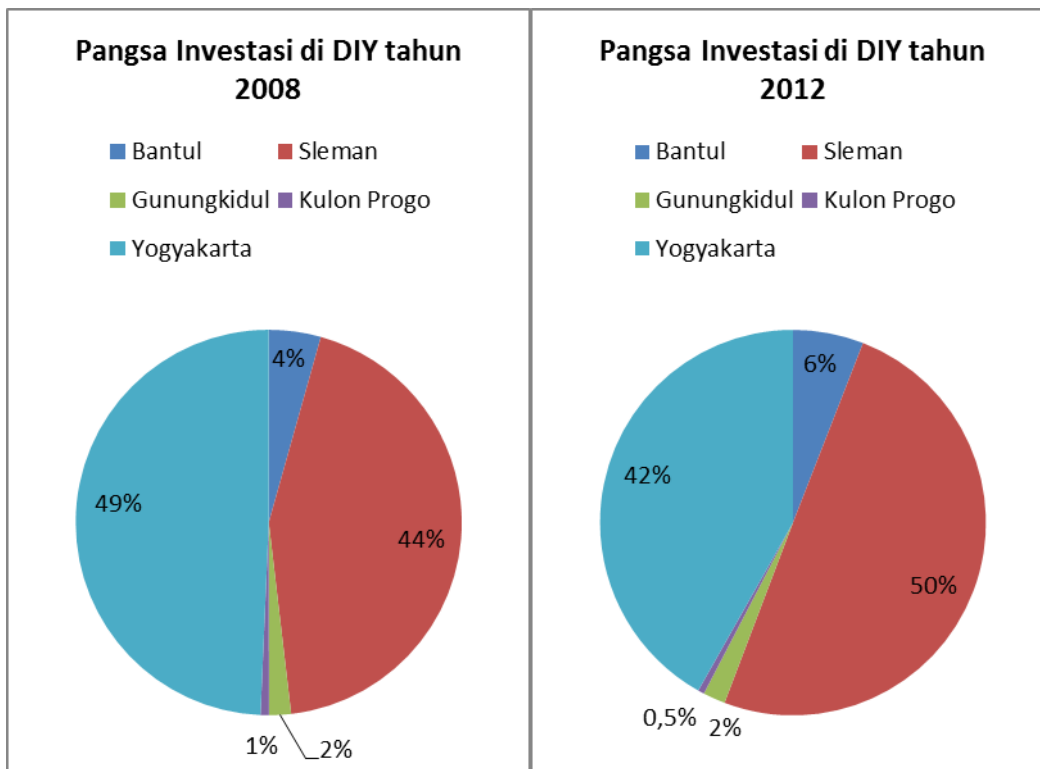
Tingkat penanaman investasi di suatu daerah meningkatkan kapasitas lokal untuk menghasilkan output yang lebih besar dari waktu ke waktu. Perkembangan yang diharapkan adalah adanya kenaikan investasi yang dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi positif. Data penanaman investasi di DIY selama tahun 2008 – 2012 menunjukkan perkembangan yang berbeda antar kabupaten dan kota. Nilai investasi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul senantiasa menunjukkan peningkatan seperti ditunjukkan pada Gambar 4.14. sedangkan di dua kabupaten lain terjadi dinamika naik dan turun pada tahun tertentu. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menduduki dua peringkat teratas dalam realiasi investasi. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010, Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama sedangkan di sisa tahun yang lainnya Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama. Ketimpangan penanaman investasi pun terjadi antar kabupaten dan kota seperti ditunjukkan pada Gambar 4.15.



Analisis Daya Saing Daerah



Gambar 4.14. Nilai Investasi di Kabupaten/Kota di DIY tahun 2008-2012 (Rp juta)
Sumber: BPS, beberapa edisi



Gambar 4.15. Pangsa Investasi antar Kabupaten/Kota tahun 2008 dan 2012

Sumber: BPS, beberapa edisi

Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki kontribusi terbesar investasi di DY di tahun 2008 dan 2012. Investasi di kedua daerah tersebut berkisar lebih dari 90% pangsa di seluruh DIY.

Tingkat investasi yang tinggi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan konsekuensi dari pertimbangan riil dan logis para pelaku usaha yang mempertimbangkan iklim investasi yang mendukung bagi pendirian dan perkembangan perusahaan. Iklim investasi didefinisikan sebagai semua kebijakan, kelembagaan dan perilaku lingkungan usaha, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang dapat mempengaruhi pengembalian dan resiko suatu investasi. Ada tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup: (a) Kondisi ekonomi makro (termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik); (b) Pemerintahan dan kelembagaan (termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja yang terdidik dan terampil); dan (c)

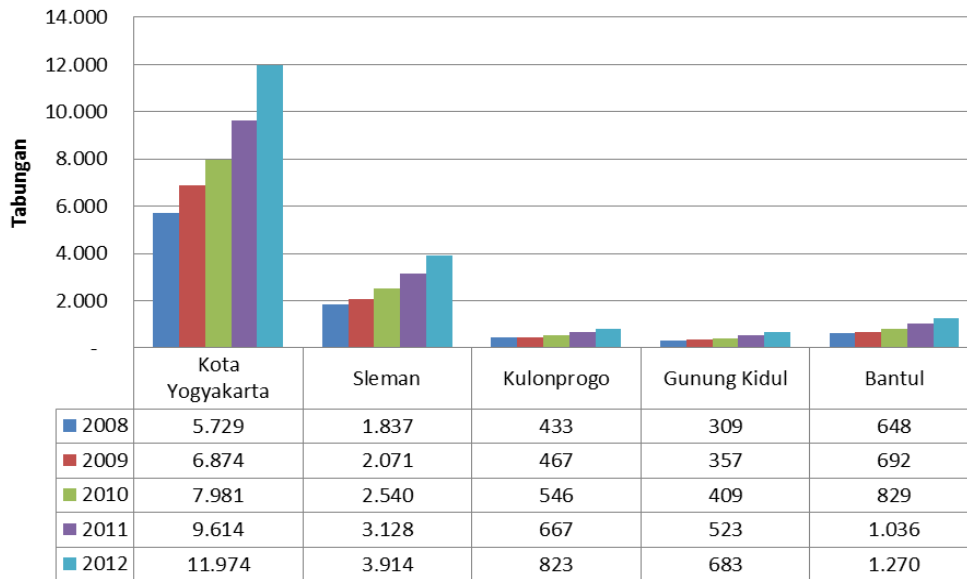


Infrastruktur (mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan air). Investasi yang tinggi mengindikasikan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih unggul dibandingkan daerah lain.

ICOR belum menjadi pertimbangan bagi para investor. Nilai ICOR yang menunjukkan tingkat efisiensi modal dihitung dari rasio antara tambahan modal dibagi tambahan output. Nilai ICOR yang semakin kecil menunjukkan proses produksi yang semakin efisien. Kabupaten Sleman adalah daerah yang memiliki angka ICOR paling tinggi se-DIY tapi mencapai pertumbuhan ekonomi yang sering berada di atas rata-rata se-DIY. Hal itu menunjukkan bahwa indikasi inefisiensi tidak menjadi penghalang bagi investor untuk menanamkan modalnya.

4.4.5. Tabungan

Ketersediaan dana pihak ketiga di industri perbankan yang didapat dari dana sisa masyarakat yang di simpan di bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Ketersediaan tabungan mendukung kapasitas daerah untuk menyediakan dana bagi debitur melalui penyediaan pinjaman atau kredit. Nilai tabungan, baik di bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR) di semua kabupaten dan kota se-DIY menunjukkan peningkatan sekitar dua kali lipat selama 5 tahun seperti ditunjukkan pada Gambar 1.9.. Nilai tabungan di Kota Yogyakarta yang merupakan daerah dengan tingkat tabungan tertinggi meningkat dari Rp5,73 triliun di tahun 2008 menjadi Rp11,98 triliun. Sementara itu nilai tabungan Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan daerah dengan tingkat tabungan terendah meningkat dari Rp309 milyar menjadi Rp683 milyar.



Gambar 4.16. Perkembangan Nilai Tabungan di Kabupaten dan Kota se-DIY tahun 2008-2012 (Rp milyar)

Sumber: BPS, beberapa edisi

Proporasi tabungan di bank umum mendominasi pangsa tabungan di seluruh daerah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.6. Secara umum, lebih dari 85% dari total tabungan di empat kabupaten dan kota berada di bank umum pada tahun 2008 dan 2012. Pangsa tabungan di bank umum tertinggi adalah 99,2% yang terjadi di Kota Yogyakarta pada akhir periode. Proporsi tabungan di BPR mengalami peningkatan di Kabupaten Kulonprogo dan Gunung Kidul dari tahun 2008 ke tahun 2012.

Tabel. 4.6.
Perkembangan Nilai (dalam miliar Rupiah) dan Pangsa (dalam %) Tabungan di Kabupaten dan Kota se-DIY Berdasarkan Jenis Bank tahun 2008 – 2012

Daerah	Jenis	2008		2009		2010		2011		2012	
		Nilai	%	Nilai		Nilai		Nilai		Nilai	%
Kota Yogyakarta	B. Umum	5,700	99.5	6,826		7,923		9,540		11,873	99.2
	BPR	29	0.5	48		58		74		101	0.8
	Total	5,729		6,874		7,981		9,614		11,974	
Sleman	B. Umum	1,629	88.7	1,838		2,305		2,857		3,578	91.4
	BPR	208	11.3	233		235		271		336	8.6
	Total	1,837		2,071		2,540		3,128		3,914	

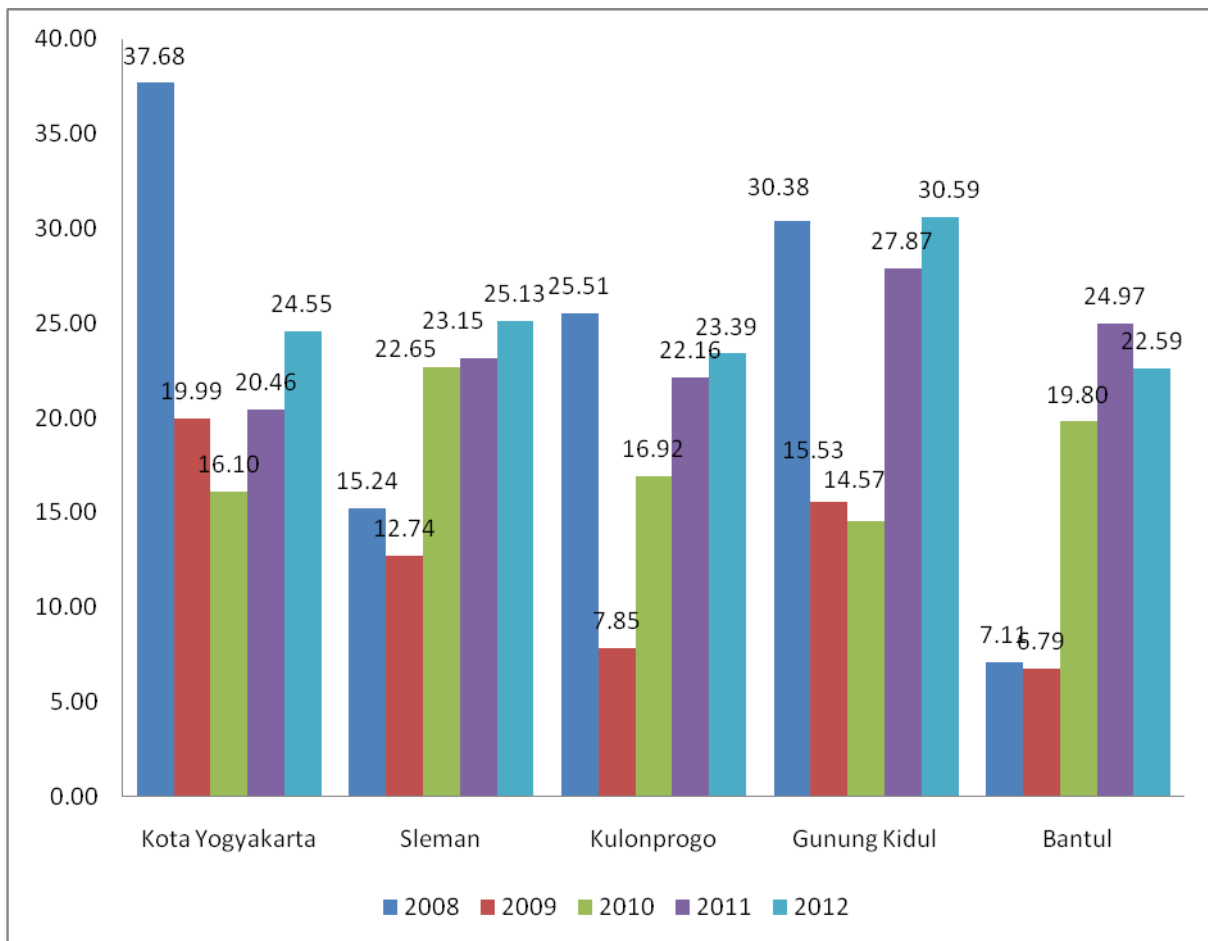


Analisis Daya Saing Daerah

Daerah	Jenis	2008		2009	2010	2011	2012	
		Nilai	%	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	%
Kulonprogo	B. Umum	396	91.5	431	479	588	713	86.6
	BPR	37	8.5	36	67	79	110	13.4
	Total	433		467	546	667	823	
Gunung Kidul	B. Umum	292	94.5	336	382	492	638	93.4
	BPR	17	5.5	21	27	31	45	6.6
	Total	309		357	409	523	683	
Bantul	B. Umum	549	84.7	579	706	894	1,101	86.7
	BPR	99	15.3	113	123	142	169	13.3
	Total	648		692	829	1,036	1,270	

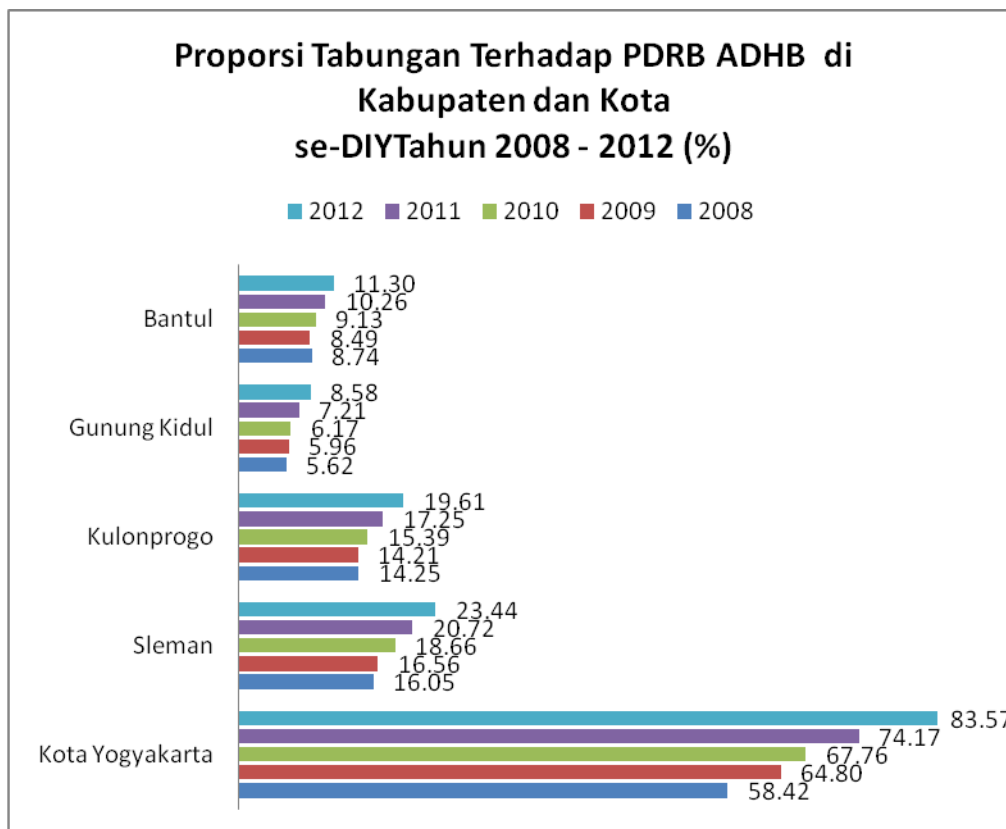
Sumber: BI, beberapa edisi

Pertumbuhan tabungan di semua Kabupaten dan Kota se DIY mengalami dinamika naik dan turun. Pertumbuhan tingkat tabungan tertinggi di Kota Yogyakarta terjadi pada tahun 2008 yang meningkat sebesar 37,68% dari tahun 2007. Sementara pertumbuhan terendah di Kota Yogyakarta terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 16,10%. Pertumbuhan tabungan di Kabupaten Bantul pada tiga tahun terakhir periode mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 19,80% (2010), 24,97% (2011) dan 22,59% (2012) dibandingkan 7,11% (2008) dan 6,79% (2009). Pola yang relatif sama juga terjadi di empat daerah lainnya dengan peningkatan pertumbuhan sejak tahun 2010.



Gambar 4.17. Pertumbuhan Tabungan di Kabupaten dan Kota se-DIY tahun 2008 – 2012 (dalam persen)

Proporsi tabungan terhadap PDRB ADHB di semua kabupaten dan kota se-DIY senantiasa mengalami peningkatan. Proporsinya relatif sangat tinggi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 58,42% di tahun 2008 dan meningkat menjadi 83,57% di tahun 2012. Proporsi tabungan terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Sleman masih dibawah 25%, sementara itu proporsinya di kabupaten lainnya masih jauh di bawah 20% di akhir periode. Proporsi tabungan terhadap PDRB di Kabupaten Gunung Kidul bahkan masih di bawah 10% di tahun 2012. Proporsi tabungan terhadap PDRB ditunjukkan pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18. Proporsi Tabungan terhadap PDRB ADHB di Kabupaten dan Kota se-DIY tahun 2008 - 2012

Perkembangan nilai tabungan yang meningkat di semua daerah menunjukkan adanya peningkatan potensi kapasitas penyediaan dana bagi sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang. Dana pihak ketiga yang diwakili dengan tabungan merupakan dana yang dapat disalurkan menjadi kredit. Kredit tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha dan perusahaan debitur untuk membiayai operasi dan pengembangan maupun untuk mendirikan usaha baru. Ketimpangan nilai tabungan masih terjadi yang menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas penyediaan dana bagi pihak yang membutuhkan pinjaman masih berlangsung.

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki kapasitas terbesar untuk menyediakan dana pihak ketiga karena nilai tabungannya paling tinggi selama periode pengamatan. Kekuatan itu pun ditambah dengan spektrum debitur potensial yang dapat dilayani kebutuhan dana pihak ketiganya mengingat proporsi tabungan di bank umum sangat

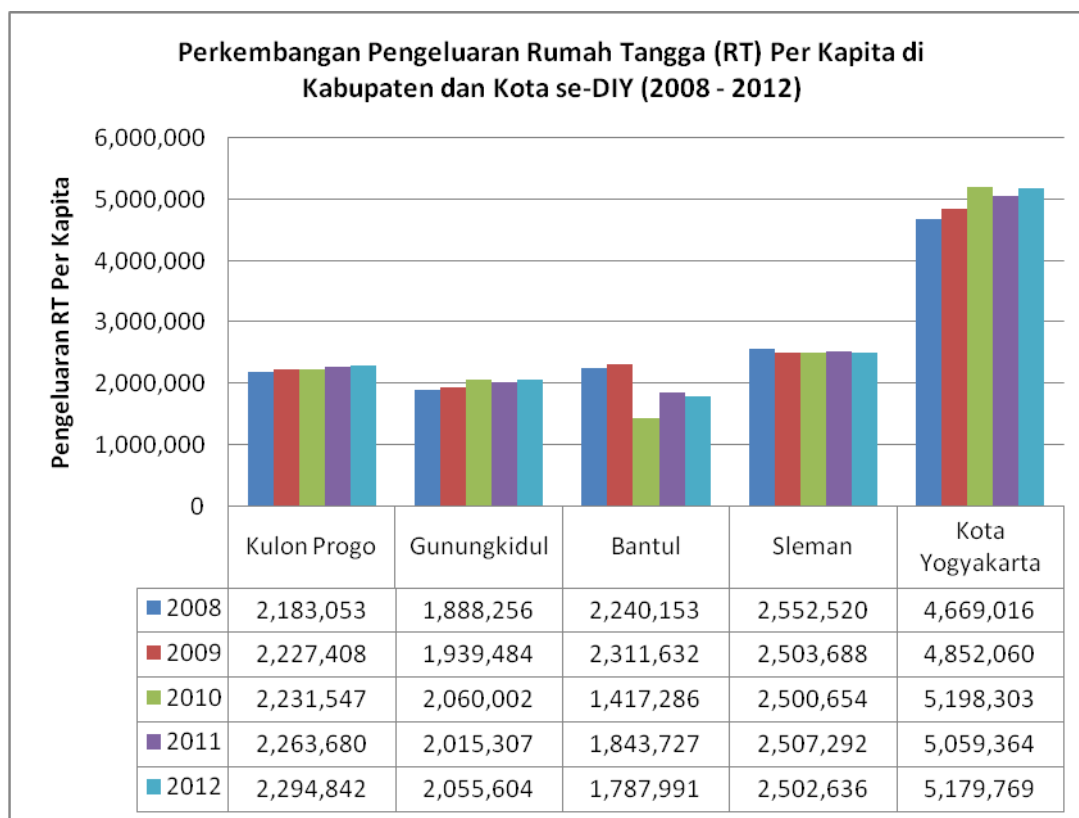


besar. Kapasitas ketersediaan dana pihak ketiga daerah lain jauh tertinggal dari Kota Yogyakarta.

Kabupaten Gunung Kidul dan Kulonprogo merupakan daerah yang memiliki kapasitas ketersediaan dana pihak ketiga paling kecil bahkan nilainya masih di bawah Rp1 triliun. Keadaan ini menyebabkan kedua daerah tersebut kurang menarik bagi mereka yang ingin mendirikan usaha. Akses kredit di dua daerah tersebut pun relatif terbatas dibanding daerah lain sehingga dukungan bagi operasi dan ekspansi usaha yang sudah ada juga terbatas.

4.4.6. Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita

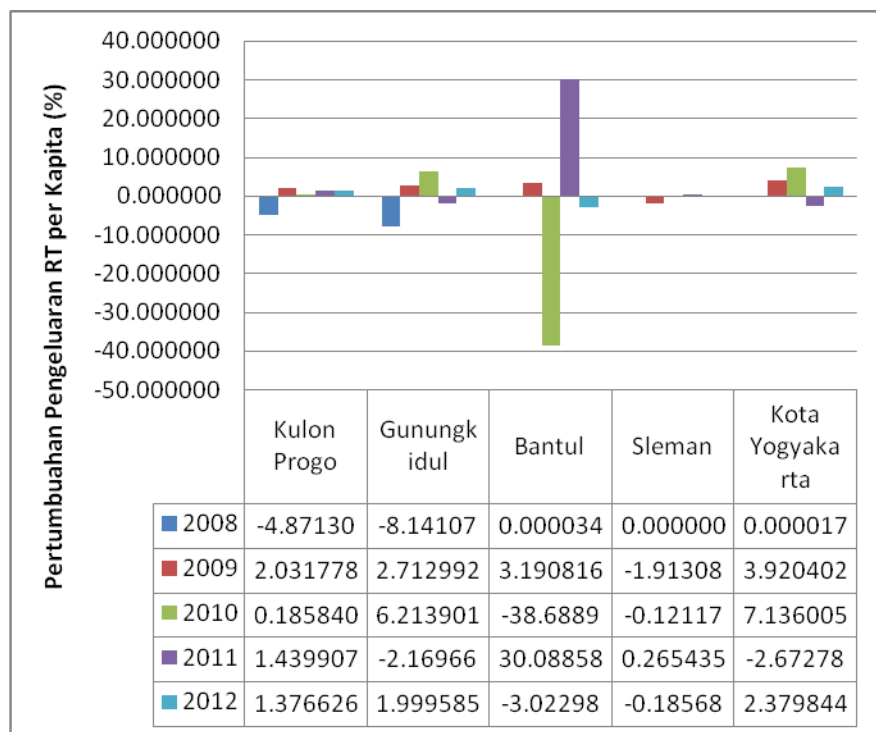
Pengeluaran rumah tangga per kapita menunjukkan kemampuan masyarakat suatu daerah untuk melakukan konsumsi. Kemampuan masyarakat lokal yang tinggi dibutuhkan menciptakan pasar bagi pengusaha lokal. Perkembangan pengeluaran per kapita antar kabupaten dan kota se-DIY tidak seragam. Secara umum, pengeluaran per kapita di Kabupaten Kulonprogo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun relatif tidak tinggi selama periode 2008 – 2012. Pengeluaran per kapita Kota Yogyakarta lebih dari dua kali lipat dari masing-masing kabupaten. Pada tahun 2012, pengeluaran per kapita Kota Yogyakarta mencapai titik tertinggi sebesar Rp5,18 juta rupiah.



Gambar 4.19. Perkembangan Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten dan Kota se-DIY tahun 2008 – 2012 (dalam rupiah)

Sumber: BPS, beberapa edisi

Kabupaten Bantul adalah satu-satunya daerah yang pengeluaran RT per kapitanya cenderung turun. Pendapatan per kapitanya sempat menaik tahun 2009 dan 2011, namun kemudian turun menjadi Rp1,79 juta di akhir periode.



Gambar 4.20. Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga (RT) per Kapita tahun 2008 – 2012 (%)

Sumber: BPS, beberapa edisi

Pertumbuhan pengeluaran rumah tangga (RT) per kapita sangatlah berfluktuatif yang menyebabkan pengeluaran per kapita antar kabupaten dan kota tidak dapat mengalami konvergen. Pada beberapa tahun tertentu, beberapa daerah mengalami pertumbuhan pengeluaran yang negatif. Pertumbuhan negatif terbesar terjadi di Kabupaten Bantul di tahun 2010 yang mengalami penurunan sebesar -38,68%, namun di tahun berikutnya pertumbuhan pengeluaran justru mengalami peningkatan tajam sebesar 30,09%. Pengeluaran RT

4.4.7. Analisis Kinerja Umum Ekonomi Makro

Dari keseluruhan aspek ekonomi makro, ketimpangan daya saing masih terjadi di antara kabupaten dan kota se-DIY. Dua daerah yang mempunyai daya saing tinggi dalam aspek ini adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingginya output di dua daerah tersebut menunjukkan kekuatan kapasitas perekonomian yang relatif tinggi dibandingkan tiga daerah lainnya. Tingginya output di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta ditopang oleh tingginya tingkat investasi di dua daerah tersebut. Tingginya investasi di Kabupaten Sleman



dan Kota Yogyakarta disebabkan oleh banyaknya pusat-pusat aktivitas perekonomian di dua daerah tersebut, terutama ditopang oleh adanya perkembangan di sektor perdagangan dan jasa. Sarana dan prasarana fisik, air bersih serta energi pun relatif tersedia dengan baik di kedua daerah tersebut.

Kekuatan daya saing di Kota Yogyakarta didukung juga oleh relatif tingginya pendapatan dan pengeluaran per kapita. Pendapatan dan pengeluaran per kapita yang tinggi menciptakan daya tarik pasar lokal yang dapat disasar oleh sektor swasta. Kekuatan ini tidak diimbangi dengan kekuatan yang mendekati sama terutama dari sisi pengeluaran per kapita oleh daerah lain.

4.5. Keterbukaan Perekonomian Daerah Terhadap Perdagangan Internasional Dan Perdagangan Antar Daerah

Keterbukaan perekonomian daerah terbuka terhadap perdagangan internasional dan perdagangan antar daerah bisa diukur dengan beberapa indikator berikut ini.

4.5.1. Ekspor

Volume ekspor DIY ke luar negeri mengalami dinamika. Volume ekspor tahun 2008 adalah 41 juta kilogram (kg) yang kemudian turun menjadi 31 juta kg, yang kemudian naik menjadi 35 juta kg dan turun kembali menjadi 27 juta kg. Pada akhir periode, volume ekspor naik menjadi 45 juta kg. Sementara itu nilai ekspornya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun setelah tahun 2009 dari US\$109 juta menjadi US\$191.

Tabel 4.7.
Perkembangan Volume, Nilai, Komoditas, Negara Tujuan Ekspor DIY tahun 2008 – 2012

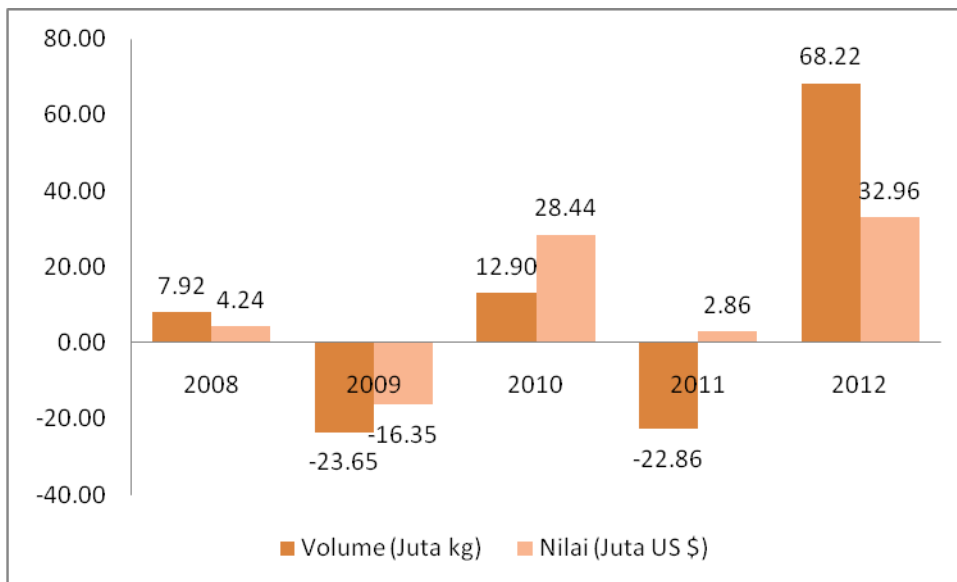
No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Volume (Juta kg)	41	31	35	27	45
2.	Nilai (Juta US \$)	130	109	140	144	191
3.	Nilai (Juta Rupiah)	1.479.166	1.032.775	1.256.780	1.299.456	1.845.100
3.	Komoditi	103	106	116	102	102
4.	Negara	97	99	93	87	87

Sumber: BPS, beberapa edisi



Ekspor DIY terdiri dari lebih dari seratus komoditas. Jumlah komoditas sempat mengalami kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2010 namun kemudian turun. Pada tahun 2011 dan 2012, jumlah komoditas ekspor bahkan lebih rendah dari awal periode. Jumlah komoditas di dua tahun terakhir hanya sebanyak 102 komoditas.

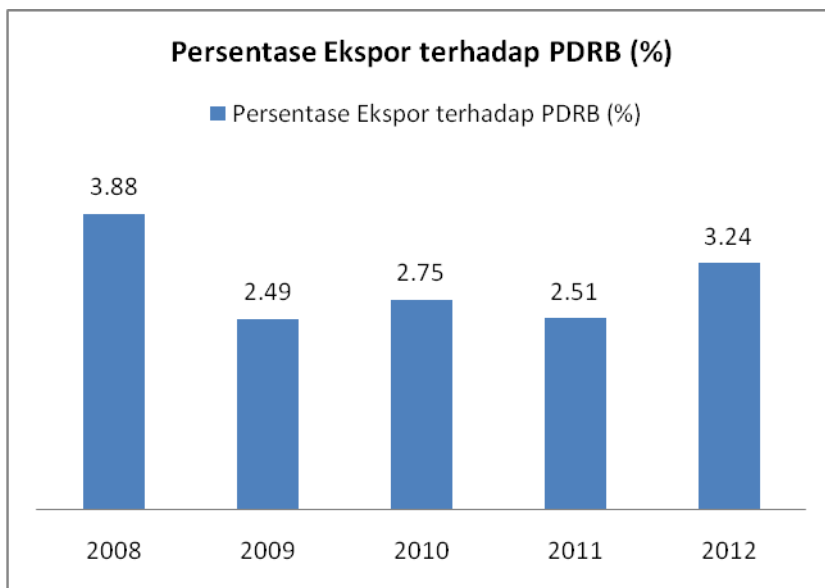
Pertumbuhan volume dan nilai ekspor DIY mengalami fluktuasi terutama di sisi volume yang sempat mengalami pertumbuhan negatif yaitu di tahun 2009 dan 2011 yaitu masing-masing -23,65% dan -22,86%. Volume mengalami pertumbuhan tajam di tahun 2012 yang naik dengan tingkat pertumbuhan sebesar 68,22%, meskipun nilainya hanya tumbuh sekitar 32,96%. Ekspor DIY sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2009 yaitu sebesar -16,35%.



Gambar 4.21. Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor DIY tahun 2008 – 2012 (%)

Sumber: BPS, beberapa edisi, diolah

Persentase ekspor terhadap PDRB ADHB DIY berfluktuasi. Persentase mengalami penurunan di tahun 2009 dan 2011. Persentase tahun 2009 turun menjadi 2,49% dari 3,88 dari tahun 2008, sementara itu persentase di tahun 2011 turun menjadi 2,51% dari 2,75% dari tahun sebelumnya. Secara umum persentase impor terhadap PDRB ADHB di DIY masih selalu di bawah 4,00%.

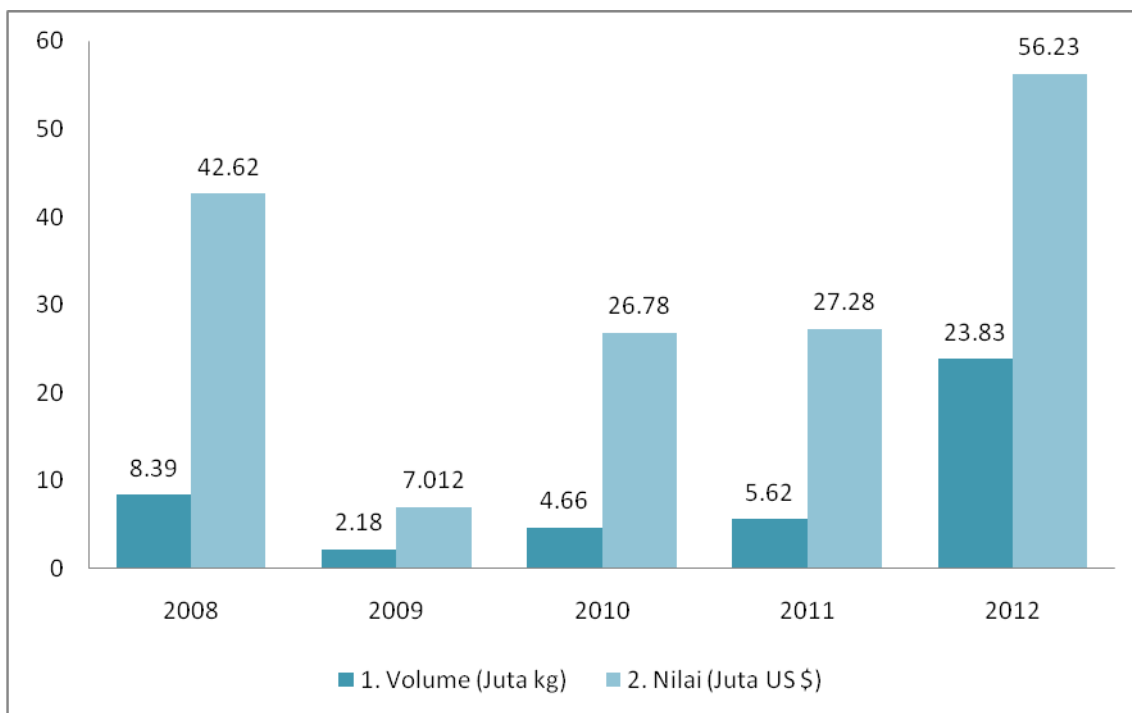


Gambar 4.22. Persentase Nilai Ekspor terhadap PDRB DIY Tahun 2008 – 2012 (%)

Sumber: BPS, beberapa edisi, diolah

4.5.2. Impor

Volume dan nilai impor DIY sempat mengalami penurunan di tahun 2009, namun kemudian secara konsisten mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Volume dan nilai impor turun menjadi 2,18 juta Kg dan US\$7,012 juta di tahun 2009 dari 8,39 juta Kg dan US\$42,62 di tahun 2008. Volumen dan nilai impor naik menjadi 23,83 juta Kg dan US\$56,23 juta di akhir periode.



Gambar 4.23. Nilai dan Volume Impor DIY tahun 2008 – 2012

Sumber: BPS, beberapa edisi, diolah

Persentase impor terhadap PDRB ADHB DIY berfluktuasi. Persentase mengalami penurunan di tahun 2009 dan 2012. Persentase tahun 2009 turun menjadi 0,16% dari 1,27% dari tahun 2008, sementara itu persentase di tahun 2012 turun menjadi 0,95% dari 1,32% dari tahun sebelumnya. Secara umum persentase impor terhadap PDRB ADHB di DIY masih selalu di bawah 1,5%.

Tabel 4.8.

Nilai Impor, PDRB ADHB dan Persentase Impor terhadap PDRB DIY tahun 2008 – 2012

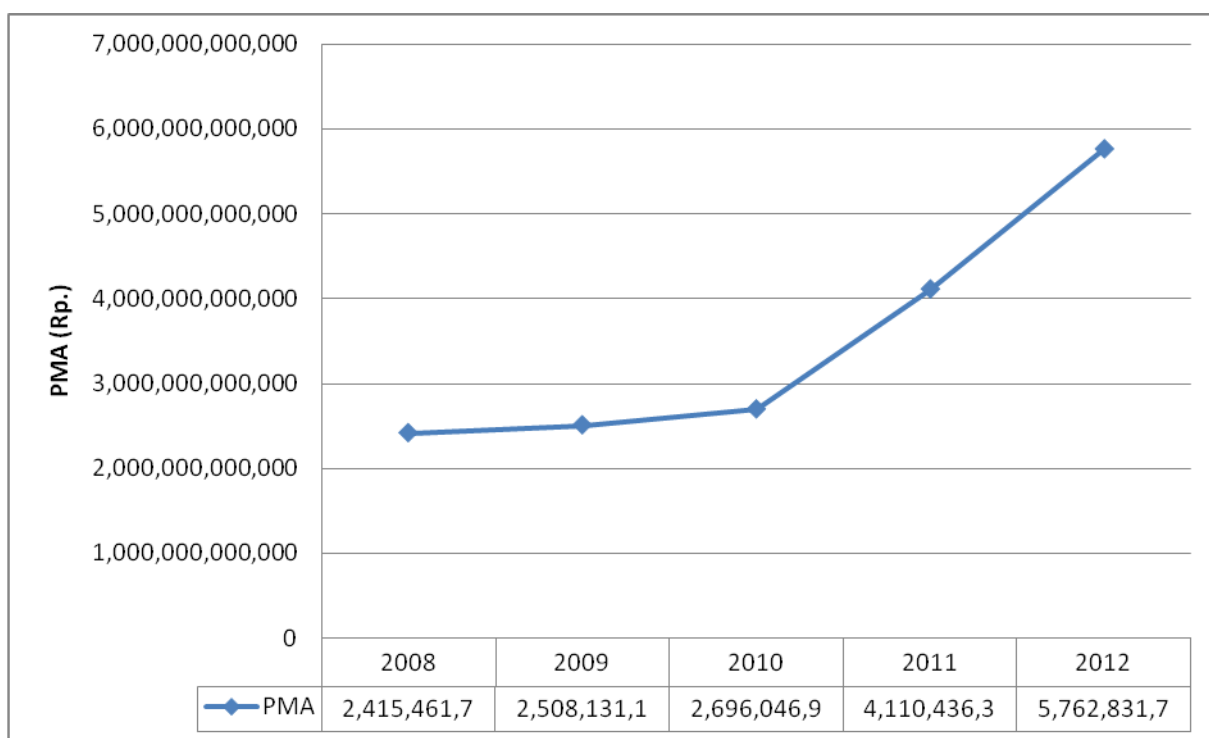
Item	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai (Juta Rupiah)	483.822	66.439	240.404	685.644	541.889
PDRB (Juta Rupiah)	38.101.684	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.034.383
Persentase Impor terhadap PDRB (%)	1,27	0,16	0,53	1,32	0,95

Sumber: Bappeda, 2012



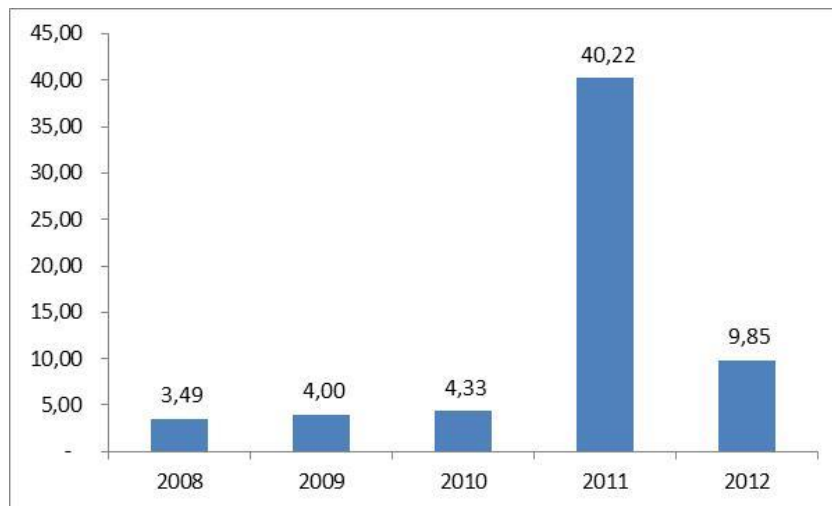
4.5.3. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing (PMA) di DIY senantiasa mengalami kenaikan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.17.. Kenaikan yang tajam terjadi di tahun 2010 sampai tahun 2012. Nilai investasi PMA naik dari Rp2,42 triliun di awal periode menjadi Rp5,76 triliun di akhir periode. Pertumbuhan PMA terbesar terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 40,22%. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini terjadi setelah pertumbuhan yang relatif moderat di tahun 2008 sampai 2010 yang berkisar antara 3 sampai kurang dari 5% per tahun. Perkembangan pertumbuhan PMA ditunjukkan pada Gambar 1.18..



Gambar 4.24. Nilai Penanaman Modal Asing di DIY tahun 2008 – 2012 (dalam Rupiah)

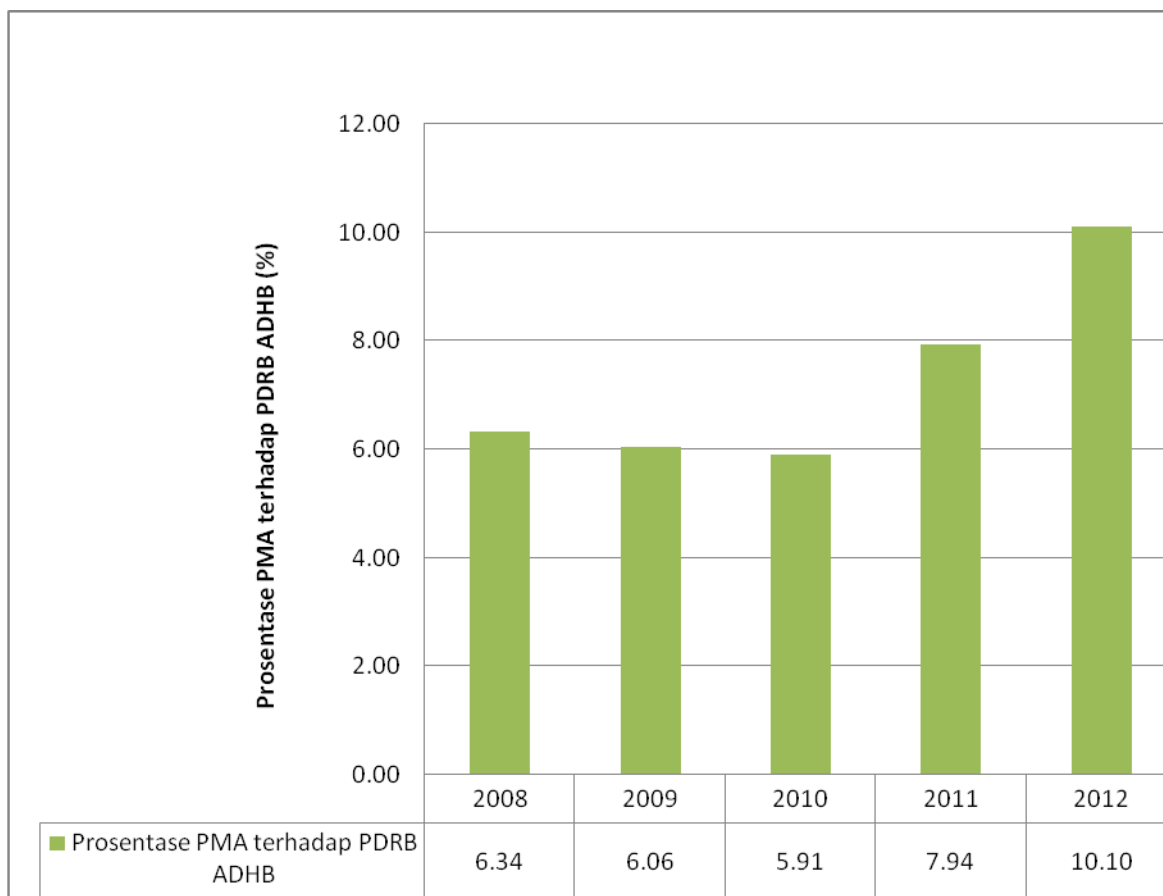
Sumber: Bappeda, 2012



Gambar 4.25. Pertumbuhan PMA di DIY tahun 2008 – 2012 (%)

Sumber: Bappeda, 2012

Persentase PMA terhadap PDRB sempat mengalami penurunan pada periode 2008 – 2010. Penurunan prosentase terjadi dari 6,34% di tahun 2008 menjadi 5,91% di tahun 2010. Pada periode sesudahnya, persentase PMA terhadap PDRB mengalami kenaikan dari 7,94% tahun 2011 dan 10,10 tahun 2012. Perkembangan persentase PMA terhadap PDRB ditunjukkan pada Gambar 1.19.

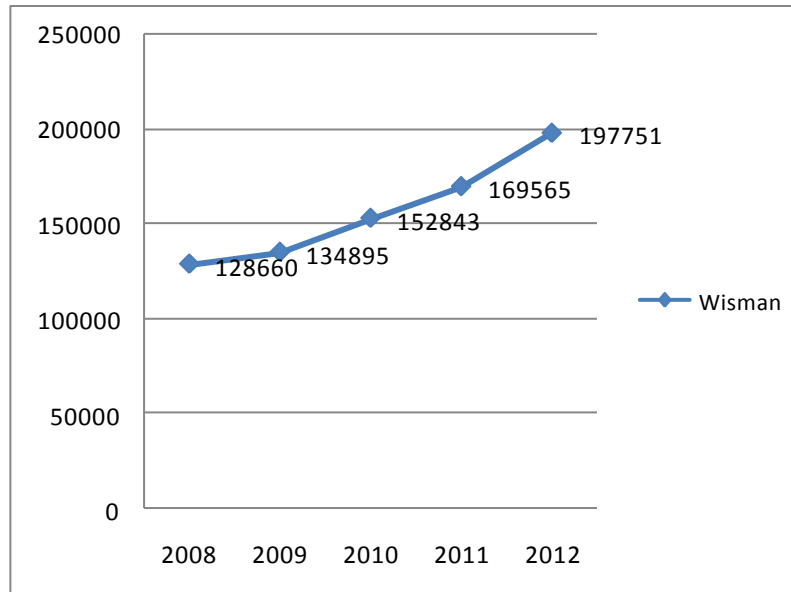


Gambar 4.26. Persentase PMA terhadap PDRB ADHB tahun 2008 – 2012 (%)

Sumber: Bappeda, 2012

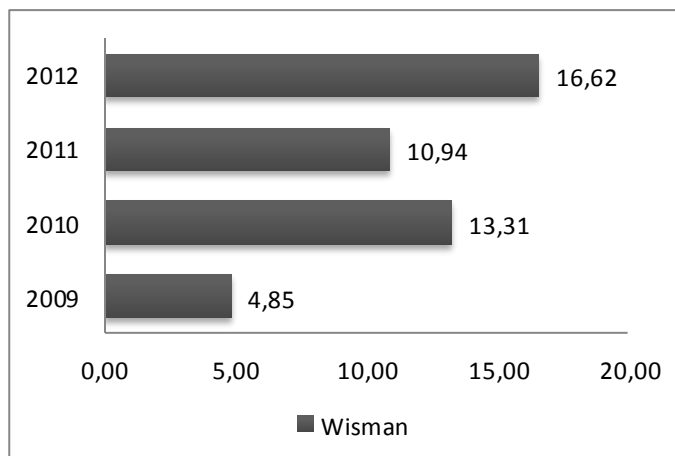
4.5.4. Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke DIY ditunjukkan pada Gambar 1.20. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, jumlah wisman yang berkunjung sebanyak 128.660 orang yang terus meningkat sampai pada tahun 2012 menjadi sebanyak 197.751 orang. Meskipun jumlah wisman terus meningkat namun proporsinya masih rendah sekitar 10 – 11% untuk tahun 2008 – 2011 dan bahkan proporsinya turun menjadi di bawah 9% pada tahun 2012 (Lihat Lampiran)



Gambar 4.27. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke DIY tahun 2008 – 2012 (orang)
Sumber: Bappeda, 2012

Pertumbuhan kunjungan wisman pada periode tersebut menunjukkan kecenderungan untuk meningkat namun sempat terjadi penurunan di tahun 2011 yang turun menjadi 10,94% dari 13,32 dari tahun 2010. Pada akhir periode kunjungan wisman mencapai hampir dua ratus ribu orang. Penurunan terjadi di tahun 2009 ketika, pertumbuhan kunjungan wisman turun menjadi di bawah 5% dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 4.28. Pertumbuhan Kunjungan Wisman tahun 2009 – 2012 (%)
Sumber: Bappeda, 2012, diolah



4.5.5. Analisis Keterbukaan Perekonomian Daerah

Keterbukaan ekonomi DIY sebagai daya saing masih belum kuat. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya keterbukaan pada aspek ekspor dan impor yang proporsinya terhadap PDRB masih rendah. Proporsi ekspor masih di bawah tiga persen dan proporsi impor masih kurang dari satu setengah persen, disamping itu proporsinya masih belum meningkat secara stabil. Beberapa variabel lain memang menunjukkan peningkatan namun pertumbuhannya belum signifikan atau masih belum stabil seperti pada variabel penanaman modal dan wisman.

4.6. Gambaran Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY

4.6.1. Kabupaten Kulonprogo

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah DIY, Kabupaten Kulonprogo memiliki nilai PDRB yang terendah. Perekonomian Kabupaten Kulonprogo didominasi oleh sektor pertanian, komoditas pertanian yang menjadi andalan bagi Kabupaten Kulonprogo antara lain padi (54,30%), jagung (32,72%), kedelai (12,72%), dan tebu (90,04%). Dengan komoditas seperti itu, mengingat kondisi sebagian wilayah Kulonprogo yang didominasi bukit karst, wajar apabila perkembangan pertanian di Kulonprogo tidak optimal meskipun mendominasi perekonomian daerah. Selain padi dan palawija, potensi pertanian Kulonprogo didukung oleh budidaya hortikultura terutama buah-buahan, mangga, durian dan rambutan merupakan produk potensial Kecamatan Kokap, Kalibawang, dan Samigaluh.

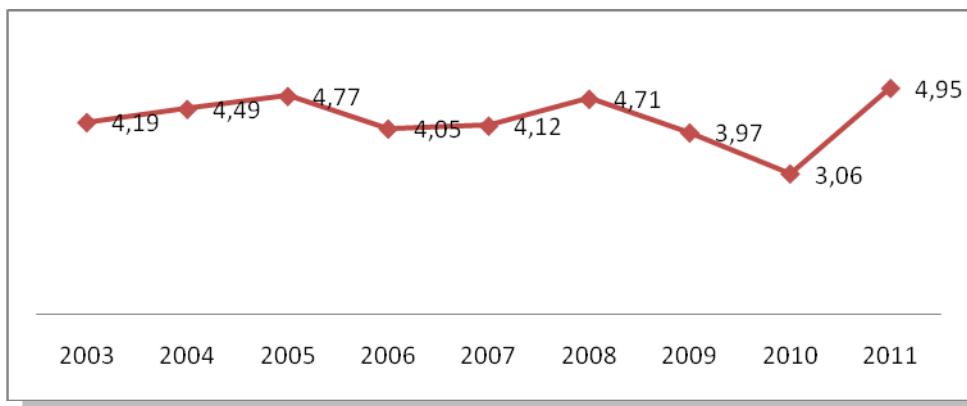
Tabel 4.9.
Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan, 2004 – 2011 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	388.27	403.695	412.026	424.719	454.656	274.560	467.710	495.676
2. pertambangan dan penggalian	12.730	13.030	18.016	17.689	17.027	18.5270	12.664	15.395
3. Industri pengolahan	224.140	236.286	243.686	251.351	255.420	261.030	271.690	268.349
4. Listrik, gas dan air bersih	8.207	8.682	9.184	9.611	10.333	11.006	11.586	12.068
5. Bangunan	62.806	65.463	72.612	77.911	82.096	85.790	91.657	100.658
6. Perdagangan Hotel dan restoran	227.040	240.301	250.662	266.357	281.420	293.570	307.250	329.807
7. Pengangkutan dan Komunikasi	140.400	148.459	157.776	163.555	171.336	179.400	184.300	188.623
8. Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	84.179	89.084	90.821	98.325	101.551	110.230	116.680	117.684
9. jasa-jasa	250.970	260.477	270.064	278.112	288.531	294.180	314.650	341.076
PDRB	1.398.744	1.465.477	1.524.848	1.587.630	1.662.370	1.728.304	1.781.227	1.869.338

Sumber: BPS



Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Kulonprogo selama rentang periode 2002-2010 cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo dalam kurun waktu 2002-2008 berada di atas 4 persen. Namun, mulai tahun 2009-2010 pertumbuhannya menurun menjadi 3,97 dan 3,06 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan berkurangnya lahan pertanian yang berdampak pada menurunnya kontribusi sektor tersebut pada keseluruhan perekonomian Kabupaten Kulonprogo. Tahun 2011 menunjukkan kebangkitan bagi Kabupaten Kulonprogo yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan mencapai 4,95%.



**Gambar 4.29. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulonprogo
Atas Dasar Harga Konstan, 2003 – 2011 (%)**

Sumber: BPS

Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Kulonprogo cenderung stabil dari tahun ke tahun antara tahun 2002-2010, kecuali untuk sektor pertanian dan industri pengolahan yang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang terus menurun.

**Tabel 4.10.
Kontribusi Sektoral Kabupaten Kulonprogo menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan, 2004 – 2011 (%)**

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	28,28	27,96	27,76	27,55	27,02	26,75	27,35	27,46	26,26	26,52
pertambangan dan penggalian	1,071	0,99	0,91	0,89	1,18	1,11	1,02	1,07	0,71	0,82
Industri pengolahan	16,65	16,50	16,02	16,12	15,98	15,83	15,36	15,10	15,25	14,36
Listrik, gas dan air bersih	0,59	0,58	0,58	0,53	0,60	0,60	0,62	0,64	0,65	0,65
Bangunan	4,39	4,43	4,49	4,47	4,76	4,91	4,94	4,96	5,15	5,38



Analisis Daya Saing Daerah

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pengangkutan dan Komunikasi	9,27	9,53	10,04	10,13	10,34	10,30	10,31	10,38	10,35	10,09
Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	4,96	5,50	6,02	6,08	5,96	6,19	6,11	6,378	6,55	6,30
jasa-jasa	18,03	18,07	17,94	17,77	17,71	17,52	17,36	17,02	17,66	18,25

Sumber: BPS

Peningkatan kontribusi PDRB di Kabupaten Kulonprogo ditunjukkan oleh sektor bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dominasi sektor primer dan sekunder di Kabupaten Kulonprogo sudah mulai berkurang dan perlahan digantikan oleh sektor tersier. Perubahan struktur PDRB dengan dominasi sektor tersier diperkirakan akan terus berlanjut dengan adanya rencana pembangunan JLS dan bandara pengganti Bandara Adisucipto.

Tabel 4.11.
PDRB Kabupaten Kulonprogo menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga konstan (2000), 2004-2009 (Jutaan Rupiah)

Jenis Penggunaan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	776.709	788.611	796.151	806.597	842.521	863.105
a. Makanan	464.989	467.844	469.216	472.067	479.819	485.247
b. Non Makanan	311.720	320.766	326.934	334.530	362.702	377.859
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit	23.648	24.914	29.767	35.625	41.201	48.676
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	359.270	329.894	353.875	368.143	380.798	389.915
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	176.290	173.466	191.759	196.501	219.599	232.444
5. Lainnya	62.826	148.592	153.298	180.764	178.250	194.163
Jumlah	1.398.743	1.465.477	1.524.848	1.587.630	1.662.370	1.728.304

Sumber: BPS

Menurut penggunaannya, PDRB Kabupaten Kulonprogo didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang rata-rata menyumbang sekitar 50 persen dari PDRB. Namun demikian, perkembangan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo perlu diapresiasi karena berhasil menurunkan kontribusinya dari 58,34 persen pada tahun 2002 menjadi 49,94 persen pada tahun 2009. Penurunan kontribusi juga terjadi pada konsumsi pemerintah, penurunan *share* konsumsi diiringi dengan naiknya *share* investasi terhadap PDRB yang



ditunjukkan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), PMTB pada tahun 2002 menyumbang kontribusi sebesar 11,73 persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 13,44 persen. Rencana pembangunan bandara, kawasan industri, tambang pasir besi dan JLS disinyalir menjadi alasan tumbuhnya investasi di kawasan Kulonprogo.

2. Investasi

Investasi di Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2002-2009 tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.

Tabel 4.12.

Kumulatif Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kulonprogo, 2002 – 2010

Tahun	PMDN		PMA	
	Nilai (Rupiah)	% Realisasi	Nilai (US\$)	% Realisasi
2002	28.549.581.000	11,19	50.100	3,50
2003	28.366.001.000	11,12	75.000	5,25
2004	28.559.361.000	11,19	na	Na
2005	28.559.360.000	11,19	na	Na
2006	28.559.361.000	11,19	na	Na
2007	28.559.361.000	11,19	na	Na
2008	28.559.361.000	11,19	140.000	1,82
2009	28.559.361.000	11,19	389.000	0,01
2010	756.176.285.910	64,04	111.177.362	78,84

Sumber: BPS

Pada tahun 2010 terjadi lonjakan investasi baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Kulonprogo, Lonjakan investasi di Kabupaten Kulonprogo terkait rencana pengembangan pasir besi, bandara, pelabuhan Tanjung Adikarto, dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Kabupaten Kulonprogo, selama kurun waktu tahun 2002-2010, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo rata-rata melebihi seperempat (25%) dari keseluruhan penduduk. Mulai tahun 2009 secara perlahan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo mulai menurun kurang dari 25% dari seluruh jumlah penduduk. Namun demikian, perlu dicermati bahwa tingkat



kemiskinan Kabupaten Kulonprogo masih jauh di atas DIY (16,83%) maupun Indonesia (13,33%) pada tahun 2010.

Tabel 4.13.
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
di Kabupaten Kulonprogo, 2003-2010

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
		Jumlah	%
2003	119.538	91.400	24,35
2004	129.057	94.600	25,11
2005	144.076	104.300	26,80
2006	162.158	106.120	28,39
2007	173.738	103.820	28,61
2008	197.507	97.920	26,85
2009	205.585	89.910	24,65
2010	225.059	90.000	23,15

Sumber: BPS

4. Pengangguran

Dilihat dari perkembangan data tenaga kerja dan pengangguran di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Kulonprogo cukup berhasil mengurangi angka pengangguran di daerahnya. Rata-rata tingkat pengangguran di Kabupaten Kulonprogo adalah 4 %. Pada tahun 2011 terjadi penurunan tingkat pengangguran yang cukup signifikan, mencapai 2,56%.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk mengatasi pengangguran antara lain dengan mengalihkan program yang dilaksanakan DPU menjadi program padat karya. Padat karya dinilai sebagai pilihan efektif meski dalam waktu tertentu saja. Padat karya di Kabupaten Kulonprogo ditekankan pada proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, Untuk tahun 2012 sasaran padat karya lebih banyak dilakukan di tiga kecamatan yaitu Kokap, Samigaluh, dan Girimulyo (Sindo, 3 Agustus 2012).



Tabel 4.14.
Kondisi Angkatan Kerja di Kabupaten Kulonprogo,
(Agustus 2007-Agustus 2011)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka			Jumlah Angkatan Kerja	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah				
2007	201.424	5.324	3.821	9.145	210.569	95,66	4,34	70,85
2008	210.505	4.822	2.953	7.775	218.280	96,44	3,56	72,13
2009	212.963	6.131	3.475	9.588	222.551	95,69	4,31	73,27
2010	211.069	7.730	1.472	9.202	220.271	95,82	4,18	73,48
2011	202.425	2.623	2.727	5.350	208.775	97,44	2,56	68,57

Sumber: BPS

4.6.2. Kabupaten Bantul

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Bantul ADHK 2000 selama kurun waktu 2002-2011 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sempat menurun drastis akibat gempa bumi tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2005 sebesar 4,99% menurun drastis mencapai 2,02% pada tahun 2006. Perlahan pemulihan ekonomi pasca gempa mulai menunjukkan hasil dengan pertumbuhan ekonomi yang kembali meningkat tahun 2007 menjadi 4,52% dan terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Bantul sedikit mengalami penurunan pada tahun 2009 akibat krisis global. Warga Bantul yang sebagian berprofesi sebagai pengerajin barang-barang ekspor tentu terpengaruh oleh turunnya permintaan barang dari luar negeri, sehingga ekonominya melambat mencapai 4,47% setelah sebelumnya sampai 4,90%.

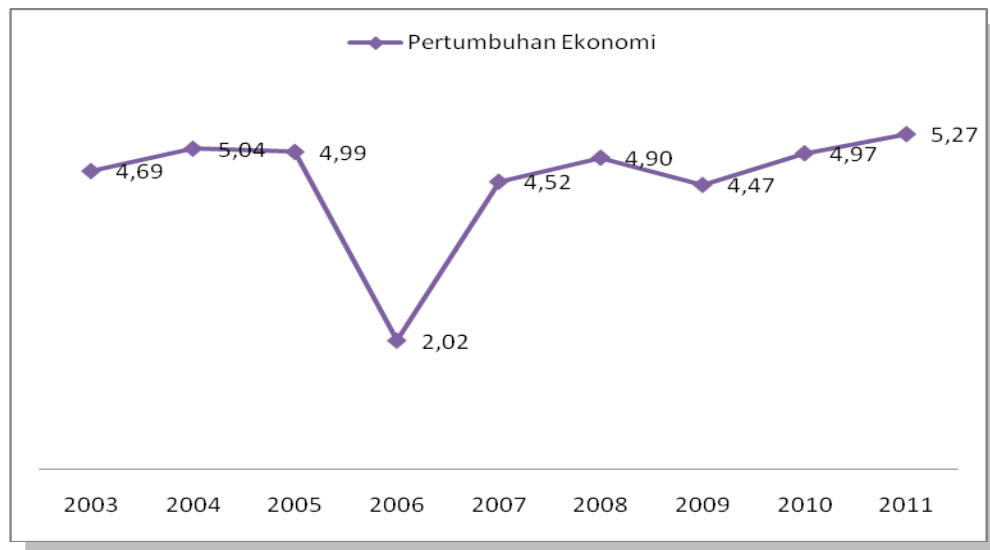


Tabel 4.15.
Nilai PDRB Kabupaten Bantul Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan, 2002 – 2011 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	791.592	814.742	838.545	880.145	919.417	933.260	920.459
2. pertambangan dan penggalian	32.784	34.000	35.023	35.829	35.783	36.525	38.782
3. Industri pengolahan	644.544	568.064	582.328	596.187	610.781	647.939	690.977
4. Listrik, gas dan air bersih	29.001	27.127	29.294	31.675	34.448	36.289	37.969
5. Bangunan	276.078	3.819.185	413.694	437.151	434.409	454.480	486.930
6. Perdagangan Hotel dan restoran	612.904	624.196	659.401	702.353	746.833	789.789	839.997
7. Pengangkutan dan Komunikasi	222.436	219.535	234.814	248.779	268.145	287.236	311.285
8. Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	205.177	193.399	202.511	212.888	230.768	252.015	279.556
9. jasa-jasa	419.656	436.668	453.340	473.049	499.364	530.397	571.248
PDRB	3.234.173	3.299.646	3.448.949	3.618.060	3.779.948	3.967.928	4.177.204

Sumber: BPS

Pada Tahun 2010 perekonomian global secara umum menunjukkan trend membaik sehingga menciptakan iklim usaha yang makin kondusif. Hal ini, berdampak pula terhadap perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2010 dan 2011 berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2009. Sumber menguatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2010 di Kabupaten Bantul terutama pada kinerja sektor industri, sektor konstruksi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2009. PDRB Kabupaten Bantul tahun 2010 mencapai 3,967 trilyun rupiah, atau naik sebesar 4,97 persen dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2009 yang mencapai 3,779 trilyun rupiah. Sementara di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat mencapai 5,27%.



**Gambar 4.30. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul
Atas Dasar Harga Konstan, 2003 – 2010 (%)**

Sumber: BPS

Sektor pertanian masih merupakan komponen terpenting penyusun PDRB sampai dengan tahun 2010, peranan sektor pertanian sebesar 20,21 persen mengalami pergeseran sedikit dibanding peranan sektor pertanian pada tahun 2009 yang mencapai 20,94 persen.

**Tabel 4.16.
Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan, 2002 – 2011 (Persen)**

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	25,78	25,15	24,80	24,48	24,69	24,31	24,33	24,32	23,52	22,04
pertambangan dan penggalian	1,19	1,18	1,06	1,01	1,03	1,02	0,99	0,95	0,92	0,93
Industri pengolahan	20,47	20,33	20,29	19,93	17,22	16,88	16,48	16,16	16,33	16,54
Listrik, gas dan air bersih	0,75	0,77	0,86	0,90	0,82	0,85	0,88	0,91	0,91	0,91
Bangunan	8,11	8,16	8,32	8,54	115,75	11,99	12,08	11,49	11,45	11,66
Perdagangan Hotel dan restoran	18,44	18,53	18,81	18,95	18,92	19,12	19,41	19,76	19,90	20,11
Pengangkutan dan Komunikasi	6,60	6,67	6,65	6,88	6,65	6,81	6,88	7,09	7,24	7,45
Kuangan, sewa, dan jasa perusahaan	5,57	5,93	6,06	6,34	5,86	5,87	5,88	6,11	6,35	6,69
jasa-jasa	13,08	13,28	13,17	12,98	13,23	13,14	13,07	13,21	13,37	13,68

Sumber: BPS



Dari sisi transformasi struktural, sektor primer sudah mengalami pegeseran ke arah sektor sekunder dan tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 21,16 persen lebih kecil dibandingkan dengan *share* sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 32,64 persen dan sektor tersier sebesar 46,21 persen.

Tabel 4.17.
PDRB Kabupaten Bantul menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga konstan (2000), 2004-2010 (Jutaan Rupiah)

No,	Jenis Penggunaan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.792.125	1.832.568	1.855.569	1.899.635	1.984.912	2.055.762	2,191,860
	a, Makanan	918.094	928.051	935.155	944.405	958.687	979.521	1,033,395
	b, Non-makanan	874.031	904.516	920.414	955.231	1.026.224	1.076.241	1,158,465
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	34.694	39.650	55.659	67.217	80.506	99.445	113,606
3	Konsumsi Pemerintah	528.084	556.780	607.716	700.037	748.411	829.445	876,059
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	834.457	965.175	983.009	1.010.709	1.054.191	1.068.445	1,105,734
5	Lainnya	-109.048	-160.000	-202.307	-228.649	-249.960	-273.148	-319,064
	PDRB	2.932.376	3.080.312	3.234.173	3.299.646	3.448.949	3.618.060	3.779.948

Sumber: BPS

Konsumsi Rumah Tangga mendominasi PDRB Kabupaten Bantul menurut penggunaan, Lebih dari 50% PDRB Kabupaten Bantul adalah Konsumsi Rumah Tangga. Berbeda dengan kabupaten lain, porsi kedua terbesar PDRB Kabupaten Bantul adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang persentasenya mencapai 26-29%, Sementara itu konsumsi pemerintah menyumbang relatif kecil dari PDRB menurut penggunaan yaitu 15-20%.

2. Investasi

Kondisi investasi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang berbeda antara PMDN dan PMA, PMDN di Kabupaten Bantul, setelah sempat menurun tahun 2004 menunjukkan trend yang kembali dari segi nilai. Dari segi realisasi, PMDN terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 2010. Sementara itu, nilai PMA di Kabupaten Bantul terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dari sisi realisasi sempat mengalami penurunan pasca gempa dan kemudian realisasi investasi kembali meningkat.



Tabel 4.18.
Kumulatif Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun
Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Bantul, 2002 – 2010

Tahun	PMDN		PMA	
	Nilai (Rupiah)	% Realisasi	Nilai (US\$)	% Realisasi
2002	39.941.890.000	70,92	7.558.187	84,33
2003	40.154.890.000	19,38	7.958.150	86,54
2004	19.586.290.000	27,24	6.447.341	76,34
2005	19.586.290.000	29,23	6.447.341	72,64
2006	19.586.290.000	21,42	7.877.341	72,93
2007	19.586.290.000	33,55	8.197.059	60,36
2008	86.951.568.071	77,12	10.303.299	65,81
2009	96.981.568.071	85,99	12.753.299	80,89
2010	962.340.323.725	104,4	36.718.819	40,11

Sumber: BPS

Sepanjang tahun 2011 terdapat empat perusahaan dengan modal asing yang masuk ke Kabupaten Bantul (Bisnis Indonesian, November 2011). Dari keempat perusahaan tersebut, tiga perusahaan merupakan perusahaan asing pindahan dari luar Bantul dan satu perusahaan asing yang baru berdiri. Dua perusahaan pindahan dari Kota Bali yang bergerak pada bidang furniture atau mebel, sementara satu perusahaan lainnya merupakan perusahaan garmen dan sarung tangan dari kulit asal Gamping, Kabupaten Sleman. Sementara perusahaan asing baru yang berlokasi di Desa Argosari, Sedayu, juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sarung tangan bukan dari kulit (kain).

3. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul sempat meningkat ketika terjadi gempa bumi tahun 2006. Jumlah penduduk miskin naik dari 151 ke 178 orang atau dari 18,21% ke 20,25%. Pasca 2006 Kabupaten Bantul mulai dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul perlahan mulai turun mencapai 16,09% pada tahun 2010.



Tabel 4.19.
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
di Kabupaten Bantul, 2003-2010

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
		Jumlah	%
2003	117.244	163.100	20,00
2004	126.748	151.400	18,55
2005	159.538	150.900	18,21
2006	177.591	178.160	20,25
2007	189.152	169.320	19,43
2008	196.509	164.330	18,54
2009	224.373	158.520	17,64
2010	245.656	146.900	16,09

Sumber: BPS

Pada tahun 2011 target penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul yang diharapkan hanya mencapai 11% belum berhasil tercapai. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul pada tahun 2011 mencapai 16,17%. Kecamatan Sedayu merupakan wilayah dengan persentase kemiskinan tertinggi yaitu 22,42% menyusul Dlingo, Pundong, Pandak, dan Imogiri di urutan lima kecamatan termiskin di Kabupaten Bantul (Harian Jogja, 2 Februari 2011). Tingginya kemiskinan di Kecamatan Sedayu disebabkan mayoritas penduduknya merupakan buruh tani dan sebagian besar lahan dikuasai juragan tanah yang tak lebih banyak dari petani gurem padahal hidup warga Sedayu sebagian besar mengandalkan sektor pertanian selain industri rumah tangga di bidang kerajinan. Kondisi itu berlangsung turun temurun dan sebagian besar menjerat penduduk yang tinggal di daerah perbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan dibelah Sungai Progo seperti Desa Argorejo.

4. Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul fluktuatif dan cenderung menurun. Penganggur di Bantul didominasi oleh lulusan siswa sekolah menengah (SMA/SMK) yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai upaya menatasi pengangguran. Secara wilayah, pengangguran terbanyak ada di Kecamatan Bantul, Sewon,



dan Imogiri, Pemkab Bantul telah berupaya menyalurkan tenaga kerja ke luar daerah maupun ke luar negeri.

Tabel 4.20.
Kondisi Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul, (Agustus 2007-Agustus 2011)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka			Jumlah Angkatan Kerja	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah				
2007	463.964	11.176	14.139	25.315	489.279	94,83	5,17	68,82
2008	491.765	12.786	13.430	26.216	517.981	94,94	5,06	70,3
2009	499.319	17.454	13.559	31.013	530.332	94,15	5,85	70,79
2010	468.822	14.986	10.954	25.940	494.762	94,76	5,24	70,15
2011	472.076	12.072	6.568	18.640	490.716	96,20	3,80	68,83

Sumber: BPS

4.6.3. Kabupaten Sleman

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dibandingkan kabupaten/ kota lain di wilayah DIY. Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten dengan nilai PDRB tertinggi. Selama kurun waktu 2002-2010 nilai PDRB Kabupaten Sleman terus meningkat dari 4,374,022 juta rupiah hingga mencapai 6,373,200 juta rupiah.

Tabel 4.21.
Nilai PDRB Kabupaten Sleman menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, 2004 – 2011 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	847.891	888.677	924.603	923.422	987.48	1.004.808	1.001.698	979.024
pertambangan dan penggalian	18.549	18.766	18.899	32.998	30.372	28.901	33.304	38.084
Industri pengolahan	817.998	850.554	873.294	890.912	904.474	921.892	950.029	1.010.358
Listrik, gas dan air bersih	40.366	44.405	45.439	50.203	52.789	56.066	58.768	61.282
Bangunan	456.555	499.734	554.572	601.267	642.538	684.367	729.456	780.153
Perdagangan Hotel dan restoran	1.028.679	1.081.275	1.126.189	1.204.716	1.276.918	1.359.722	1.436.205	1.526.308
Pengangkutan dan Komunikasi	266.099	280.552	300.628	321.854	339	361.363	384.891	410.324
Keuangan, sewa, dan	493.308	523.061	539.62	567.159	598.19	631.51	669.291	715.317



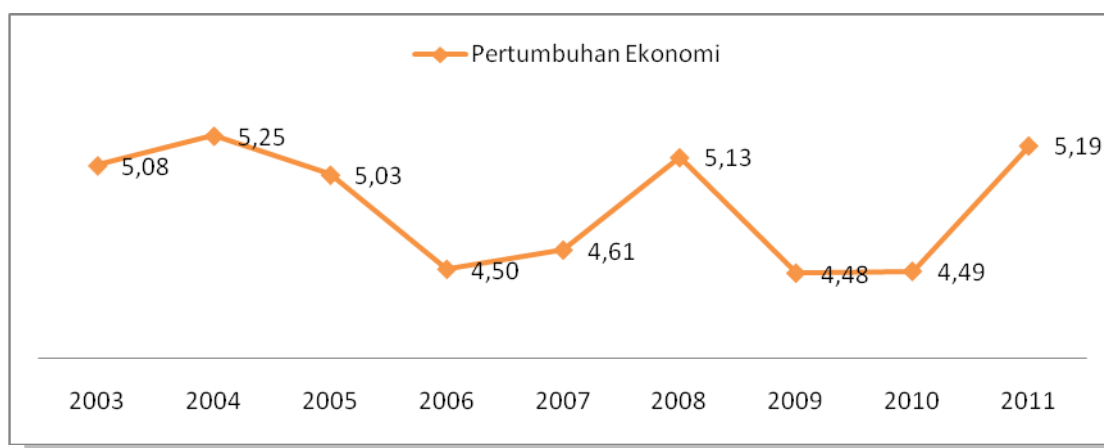
Analisis Daya Saing Daerah

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
jasa perusahaan								
jasa-jasa	867.931	893.541	925.816	961.049	1.006.243	1.050.928	1.109.558	1.183.251
PDRB	4.837.376	5.080.564	5.309.059	5.553.580	5.838.246	6.099.557	6.373.200	6.704.100

Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 perekonomian tumbuh 4,50% dan mengalami kenaikan pertumbuhan pada tahun 2007 (4,61%) sampai tahun 2008 (5,13%). Namun demikian, terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 berimbas pada melemahnya perekonomian pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 4,48%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman terus menurun pada tahun 2010 menjadi 4,11%, Penurunan ini disebabkan musim hujan yang berkepanjangan di tahun 2010 berpengaruh terhadap produksi pertanian.

Terjadinya erupsi Merapi bulan Oktober-November 2010 mengakibatkan kegagalan panen di wilayah lereng Merapi karena banyaknya lahan pertanian yang rusak. Selain sektor pertanian, erupsi Merapi juga mempengaruhi kinerja sektor lain seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa karena banyaknya hotel di Kaliurang yang tutup dan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan karena banyaknya material vulkanik yang dihasilkan dari erupsi Merapi.



Gambar 4.31. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan, 2003 – 2011 (%)

Sumber: BPS



Selama tahun 2002-2010, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, diikuti oleh sektor jasa-jasa, pertanian, dan industri. Selama tahun 2002-2010, sektor pertanian memberikan kontribusi dalam PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 13,77% per tahun; sektor pertambangan dan penggalian 0,52% per tahun; sektor industri pengolahan 14,63% per tahun; sektor listrik, gas, dan air bersih 1,25% per tahun; sektor bangunan 12,35% per tahun; sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,26% per tahun; sektor pengangkutan dan komunikasi 5,95% per tahun; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,62% per tahun; dan sektor jasa-jasa 18,65% per tahun.

Dalam PDRB atas dasar harga konstan, sektor pertanian memberikan rata-rata kontribusi sebesar 16,68% per tahun, sektor pertambangan dan penggalian 0,49% per tahun; sektor industri pengolahan 15,58% per tahun; sektor listrik, gas, dan air bersih 0,90% per tahun; sektor bangunan 11,02% per tahun; sektor perdagangan, hotel dan restoran 21,91% per tahun; sektor pengangkutan dan komunikasi 5,85% per tahun; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,272% per tahun; dan sektor jasa-jasa 17,30% per tahun.

Tabel 4.22.
Kontribusi PDRB Kabupaten Sleman
Atas Dasar Harga Konstan, 2002 – 2011 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	18,49	17,71	17,53	17,49	17,42	16,63	16,91	16,47	15,72	14,60
pertambangan dan penggalian	0,36	0,36	0,38	0,37	0,36	0,59	0,52	0,47	0,52	0,57
Industri pengolahan	16,67	16,74	16,91	16,74	16,45	16,04	15,49	15,11	14,91	15,07
Listrik, gas dan air bersih	0,84	0,83	0,83	0,87	0,86	0,90	0,90	0,92	0,92	0,91
Bangunan	8,43	9,12	9,44	9,84	10,45	10,83	11,01	11,22	11,45	11,64
Perdagangan Hotel dan restoran	20,93	21,36	21,27	21,28	21,21	21,69	21,87	22,29	22,54	22,77
Pengangkutan dan Komunikasi	5,40	5,46	5,50	5,52	5,66	5,80	0,01	5,92	6,04	6,12
Kuangan, sewa, dan	9,92	9,88	10,20	10,30	10,16	10,21	10,25	10,35	10,50	10,67



Analisis Daya Saing Daerah

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
jasa perusahaan										
jasa-jasa	18,95	18,53	17,94	17,59	17,44	17,31	17,24	17,23	17,41	17,65

Sumber: BPS

Dalam PDRB atas dasar harga konstan, sektor pertambangan dan penggalan juga memberikan pertumbuhan kontribusi terbesar (10,49%), diikuti sektor bangunan (3,30%), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,13%), serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,14%). Sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa-jasa mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi.

PDRB Kabupaten Sleman menurut penggunaan ADHK 2000 menunjukkan dominasi konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 40% meskipun jumlahnya terus menurun dari 55,27% pada tahun 2002 menjadi 46,22% pada 2009. Pembentukan Modal Tetap Bruto menduduki peringkat kedua dengan kontribusi rata-rata 38%, dan konsumsi pemerintah rata-rata menyumbang 17%.

Tabel 4.23.
PDRB Kabupaten Sleman menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga konstan (2000), 2002-2009 (Jutaan Rupiah)

No,	Jenis Penggunaan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.487.584	2.507.988	2.524.426	2.587.225	2.692.273	2,819,313
	a, Makanan	1.276.087	1.281.205	1.283.748	1.297.231	1.314.000	1,343,491
	b, Non Makanan	1.211.497	1.226.783	1.240.679	1.289.993	1.377.873	1,475,822
2	Pengeluaran Konsumsi lembaga swasta Non Profit	39.899	49.100	56.116	64.016	76.297	92,825
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	811.212	845.321	899.624	947.161	1.032.152	1,106,542
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.937.506	1.923.247	2.067.573	2.126.535	2.233.120	2,330,297
5	Lainnya	(824.031)	(698.488)	(686.007)	(444.555)	(397.590)	(465,129)
6	Ekspor antar negara/ Luar negeri	441.223	542.657	519.495	351.498	287.342	257,475
7	Dikurangi impor antar negeri/Luar negeri	56.018	89.261	72.168	78.286	85.347	41,767
	PDRB	4.837.376	5.080.564	5.309.059	5.553.593	5.838.246	6.099.557

Sumber: BPS



2. Investasi

Investasi di Kabupaten Sleman terus meningkat baik dari sisi nilai maupun realisasi. Hanya pada tahun 2010 nilai dan realisasi investasi di Kabupaten Sleman sedikit menurun karena terpengaruh bencana erupsi Merapi. Pada tahun 2012 terdapat 31,639 unit usaha di wilayah Sleman, 41 unit diantaranya merupakan penanaman modal asing (PMA), 32 penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan 31,566 non-PMA dan PMDN. Di mata para investor, Sleman dipandang sebagai daerah potensial (Suara Merdeka, 14 Juni 2012). Selain iklim usaha yang relatif kondusif. Kabupaten ini juga memiliki daya dukung sektor pendidikan dan wisata. Namun syarat investasi di Kabupaten Sleman harus ramah lingkungan karena Sleman merupakan daerah konservasi air bagi daerah lain di DIY.

Tabel 4.24.
Kumulatif Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun
Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sleman, 2002 – 2010

Tahun	PMDN		PMA	
	Nilai (Rupiah)	% Realisasi	Nilai (US\$)	% Realisasi
2002	1.052.938.189.590	97,27	12.873.330	23,49
2003	1.083.909.845.984	107,29	14.281.799	26,67
2004	1.100.401.006.463	102,49	15.615.706	25,68
2005	949.497.946.463	97,43	31.665.706	42,55
2006	921.970.346.726	100,02	33.579.206	43,47
2007	921.970.346.726	100,02	34.649.206	42,96
2008	926.862.950.864	100,55	38.706.056	41,79
2009	983.462.950.863	106,69	38.706.056	41,62
2010	34.017.508.942	13,33	324.000	4,21

Sumber: BPS

3. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus menunjukkan perbaikan dengan menurunnya persentase. Kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Sleman ada di wilayah Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Tempel, Kecamatan Sleman, Kecamatan Minggir, dan Kecamatan Sayegan, dimana penduduk miskinnya lebih dari 25%. Kecamatan yang memiliki 20-25% penduduk miskin adalah Kecamatan Turi, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Mlati, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Berbah, dan Kecamatan Moyudan memiliki 15-20% penduduk miskin, Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngemplak. Kecamatan



Godean, dan Kecamatan Gamping memiliki 10-15 % penduduk miskin. Sementara itu, kecamatan dengan penduduk miskin yang paling sedikit adalah Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Depok yang persentase penduduk miskinnya kurang dari 10%. Jika dilihat dari persebarannya, kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Sleman didominasi oleh daerah pertanian, sementara yang paling tidak miskin adalah daerah padat penduduk yang lebih didominasi sektor tersier didukung oleh banyaknya pendatang dan kampus perguruan tinggi.

Tabel 4.25.
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

di Kabupaten Sleman, 2003-2010 Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
		Jumlah	%
2003	141.122	159.200	16,93
2004	154.689	146.500	15,53
2005	182.355	135.100	14,06
2006	192.445	128.090	12,70
2007	198.907	125.350	12,56
2008	212.031	125.050	12,34
2009	226.256	117.530	11,45
2010	247.688	117.000	10,70

Sumber: BPS

4. Pengangguran

Berbeda dengan daerah lain di DIY. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sleman menunjukkan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun, Pada tahun 2007-2010 persentase pengangguran masih berkisar antara 6-7%, Namun pada tahun 2010 jumlah tersebut meningkat drastis menjadi pasca erupsi Merapi. Erupsi Merapi memang menghancurkan sebagian mata pencaharian warga di Kabupaten yang berprofesi sebagai petani. Pada tahun 2012 angka pengangguran di Kabupaten Sleman merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY, yaitu 31,152 orang (Solopos, 31 Juli 2012).

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sleman bukan semata-mata karena minimnya lapangan kerja namun juga karena faktor internal pencari kerja. Faktor internal



tersebut antara lain kurangnya keterampilan, upah yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan, penempatan kerja yang jauh, budaya pilih-pilih kerja tanpa disesuaikan dengan kemampuan yang ada serta kurang informasi lowongan kerja. Selain itu, Sleman menghasilkan banyak lulusan perguruan tinggi yang tentu saja memiliki daya tawar lebih untuk pekerjaan.

Tabel 4.26.
Kondisi Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman,
(Agustus 2007-Agustus 2011)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka			Jumlah Angkatan Kerja	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah				
2007	505.672	23.661	18.812	42.473	548.145	92,25	7,75	66,94
2008	537.999	21.056	18.354	39.410	577.409	93,17	6,83	68,48
2009	530.634	28.008	14.601	42.609	573.243	92,57	7,43	66,93
2010	531.929	29.004	12.057	41.061	572.990	92,83	7,17	67,12
2011	561.894	17.452	13.700	31.152	593.046	94,75	5,25	68,76

Sumber: BPS

4.6.4. Kota Yogyakarta

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kota Yogyakarta memiliki nilai PDRB terbesar kedua setelah Kabupaten Sleman di wilayah DIY. Pada kurun waktu antara 2002-2011 PDRB Kabupaten Sleman atas harga konstan 2000 meningkat dari 3,812 milyar menjadi 5,816 milyar.

Tabel 4.27.
Nilai PDRB Kota Yogyakarta menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan, 2002 – 2011 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	25.000	21.835	21.311	19.209	18.140	17.359	17.455	17.755
pertambangan dan penggalian	371	242	270	279	258	265	272	293
Industri pengolahan	506.017	518.069	529.450	539.154	543.050	549.574	594.845	606.849
Listrik, gas dan air bersih	57.193	60.224	60.471	64.197	65.488	67.212	68.725	71.777
Bangunan	287.541	308.065	362.187	390.323	412.972	413.965	426.740	449.854

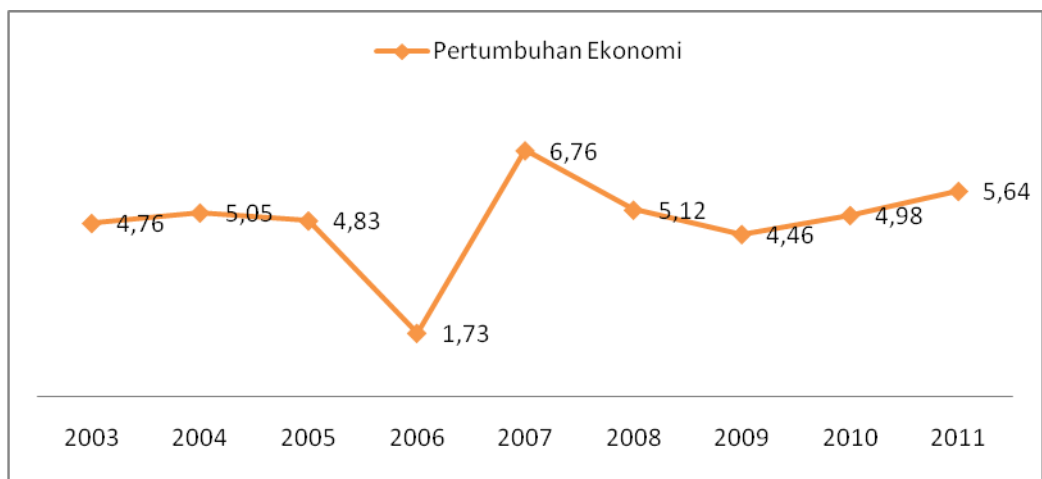


Analisis Daya Saing Daerah

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Perdagangan Hotel dan restoran	1.056.754	1.108.098	1.146.083	1.188.152	1.253.026	1.332.070	1.393.111	1.460.971
Pengangkutan dan Komunikasi	761.577	813.669	846.941	910.568	984.783	1.055.067	1.098.385	1.185.006
Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	585.290	629.162	607.348	652	696.816	731.975	770.658	820.765
jasa-jasa	915.908	938.485	982.333	1.012.551	1.046.615	1.077.364	1.135.751	1.203.297
PDRB	4.195.392	4.397.849	4.474.051	4.776.401	5.021.149	5.244.851	5.505.944	5.816.568

Sumber: BPS

Secara keseluruhan periode, pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan, Pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4,498% dan 5,64%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 4,46 persen. Pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Kedua sektor tersebut merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kota Yogyakarta yang wilayahnya tidak begitu luas namun sebagai ibukota provinsi.



Gambar 4.32. Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan, 2003 – 2011 (%)

Sumber: BPS

Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Angkutan & Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Sektor Jasa-jasa. Sumbangan seluruh sektor tersier tersebut terhadap PDRB lebih dari 75%.



Tabel 4.28.
Kontribusi PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan, 2002 – 2011 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	0,80	0,72	0,60	0,50	0,48	0,40	0,36	0,33	0,32	0,31
pertambangan dan penggalan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Industri pengolahan	12,51	12,48	12,06	11,78	11,83	11,29	10,82	10,48	10,80	10,43
Listrik, gas dan air bersih	1,34	1,37	1,36	1,37	1,35	1,34	1,30	1,28	1,25	1,23
Bangunan	6,29	6,47	6,85	7,00	8,10	8,17	8,22	7,89	7,75	7,73
Perdagangan Hotel dan restoran	24,90	25,22	25,19	25,20	25,62	24,88	24,95	25,40	25,30	25,12
Pengangkutan dan Komunikasi	16,21	0,02	18,15	18,50	18,93	19,06	19,61	20,12	19,95	20,37
Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	14,52	14,27	13,95	14,31	13,57	0,01	13,88	13,96	14,00	14,11
jasa-jasa	23,42	22,73	21,83	21,34	21,96	21,20	20,84	20,54	20,63	20,69

Sumber: BPS

PDRB Kota Yogyakarta dari sisi penggunaan, seperti kabupaten lain, didominasi oleh konsumsi rumah tangga meskipun persentasenya cenderung menurun dari 42,89% pada tahun 2002 menjadi 36,69% pada tahun 2010.

Tabel 4.29.
Nilai PDRB Kota Yogyakarta menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Konstan, 2004 – 2010 (Juta Rupiah)

No,	Jenis Penggunaan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	1.695.961	1.707.125	1.716.201	1.752.525	1.824.572	1.890.775	2,020,201
	a, Makanan	732.084	736.335	737.408	743.386	753.661	764.772	812,809
	b, Bukan Makanan	963.877	970.790	978.793	1.009.139	1.070.911	1.126.003	1,207,392
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	82.838	117.478	128.444	148.233	174.580	202.918	233,830
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	892.483	943.405	995.884	1.047.074	1.129.935	1.235.685	1,288,021



Analisis Daya Saing Daerah

No,	Jenis Penggunaan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
4	Pembentukan Modal tetap domestik Bruto	870.317	932.703	997.389	1.023.639	1.068.282	1.091.628	1,139,804
5	Lainnya	653.793	697.138	734.586	804.931	823.780	823.845	824,088
	PDRB	4.195.392	4.397.504	4.572.502	4.776.401	5.021.149	5.244.851	5.505.944

Sumber: BPS

Konsumsi Pemerintah mempunyai nilai terbesar kedua dan berkontribusi antara 21-23%, Selanjutnya Pembentukan Modal Tetap Bruto yang menyumbang lebih dari 20%.

2. Investasi

Perkembangan investasi di Kota Yogyakarta antara tahun 2002-2010 cenderung fluktuatif dari sisi nilai maupun realisasi. Berdasarkan nilai, PMDN cenderung menurun pasca gempa tahun 2006 dengan realisasi yang lebih fluktuatif. Sementara PMA, meskipun nilainya terus meningkat, realisasi dari tahun ke tahun justru cenderung menurun.

Menurut hasil survei *International Finance Corporation*, Kota Yogyakarta merupakan kota yang mendapatkan predikat kota termudah dalam mendirikan usaha. Oleh karena itu wajar apabila nilai investasi di Kota Yogyakarta cukup tinggi, Kota Yogyakarta juga dinilai cukup berhasil dalam memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi para investor.

Tabel 4.30.
Kumulatif Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Yogyakarta, 2002 – 2010

Tahun	PMDN		PMA	
	Nilai (Rupiah)	% Realisasi	Nilai (US\$)	% Realisasi
2002	754.770.249.500	143,08	83.081.746	6,14
2003	1.167.128.239.500	260	111.032.406	81,84
2004	1.167.959.819.907	43,34	110.423.602	77,49
2005	1.167.959.819.910	109,85	110.423.602	81,57
2006	1.087.811.519.910	97,08	110.593.602	79,41
2007	744.466.285.910	67,04	110.772.260	79,4
2008	744.466.285.910	63,61	110.719.020	79,22
2009	744.466.295.910	63,61	111.069.020	79,29
2010	35.440.183.148	52,22	1.704.120	16,58

Sumber: BPS



3. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kota Yogyakarta lebih fluktuatif dibandingkan kabupaten lainnya di wilayah DIY. Hal ini wajar bagi daerah perkotaan karena beban kemiskinan di kota diperparah dengan adanya urbanisasi. Pada tahun 2011, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta diperkirakan akan menurun.

Penurunan kemiskinan dikarenakan adanya program penanggulangan kemiskinan yang berlangsung secara berkesinambungan. Hal tersebut terdeteksi di Kelurahan Tegalpanggung, Danurejan, Kelurahan Kricak, Jetis dan Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo. Di ketiga kelurahan tersebut sesuai pendataan Dinsosnakertrans penurunan jumlah keluarga miskinnya paling banyak.

Tabel 4.31.
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
di Kota Yogyakarta, 2003-2010

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
		Jumlah	%
2003	161.846	49.400	12,63
2004	168.310	50.400	12,77
2005	214.694	44.400	10,50
2006	235.801	45.180	10,22
2007	249.318	42.930	9,78
2008	263.996	48.110	10,81
2009	265.168	45.290	10,05
2010	290.286	37.800	9,75

Sumber: BPS

4. Pengangguran

Pengangguran di Kota Yogyakarta sangat terkait dengan banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya lahan usaha, serta minimnya keterampilan untuk mengimbangi keterbatasan tersebut. Dari data statistik yang ada, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta cenderung menurun dari 9,65% pada tahun 2007 menjadi 5,57% pada tahun 2011.

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Kota Yogyakarta dan DIY pada umumnya adalah tingginya tingkat kompetisi bagi angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan, terlebih lagi dengan banyaknya perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mahasiswa pendatang yang setelah lulus kuliah enggan untuk pulang lagi ke daerahnya



Analisis Daya Saing Daerah

merupakan masalah ketenagakerjaan tersendiri karena semakin meningkatkan persaingan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya program peningkatan keterampilan bagi penduduk Kota Yogyakarta untuk meningkatkan daya saing dan tidak semakin memperparah kondisi pengangguran yang ada.

4.7. Mengukur Seberapa Besar Sumber Daya: Modal Fisik, Letak Geografis, Daya Alam, Dalam Mendukung Aktivitas Perekonomian Daerah

Sumber daya modal fisik, letak geografis, dan sumber daya alam yang diperkirakan bisa mendukung aktivitas perekonomian daerah adalah sebagai berikut.

- **Modal Fisik**

1. Panjang Jalan per Luas Wilayah

Berdasarkan data tahun 2008–2011 dapat diketahui status jalan di DIY, sebagai berikut:

Status	2008 (km)	2009 (km)	2010 (km)	2011 (km)
Jalan Nasional	168,81	168,81	168,81	223,16
Jalan Provinsi	690,25	690,25	690,25	690,25
Jalan Kota (Yogyakarta)	247,80	247,80	248,09	248,09
Jalan Kabupaten (Bantul)	899,83	899,83	895,73	895,73
Jalan Kabupaten (Kulon Progo)	925,30	925,30	925,30	763,69
Jalan Kabupaten (Gunungkidul)	818,46	818,46	686,00	686,00
Jalan Kabupaten (Sleman)	1.085,13	1.085,13	1.085,13	1.085,13

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2011

2. Kualitas Jalan Raya

Berdasarkan data tahun 2008–2011 dapat diketahui kondisi tingkat pelayanan jalan untuk semua status jalan di DIY, sebagai berikut:

Status Jalan	2008		2009		2010		2011	
	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%
Jalan Nasional	168,81		168,81		168,81		223,16	
Mantap		71,84		90,83		88,65		97,25
Tidak Mantap		28,16		9,17		11,35		2,75
Jalan Provinsi	690,25		690,25		690,25		690,25	
Mantap		79,25		81,74		83,45		83,89
Tidak Mantap		20,75		18,26		16,55		16,11



Analisis Daya Saing Daerah

Status Jalan	2008		2009		2010		2011	
	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%
Jalan Kota (Yogyakarta)	247,80		247,80		248,09		248,09	
Mantap		82,07		82,07		82,09		82,09
Tidak Mantap		17,93		17,93		17,91		17,91
Jalan Kabupaten (Bantul)	899,83		899,83		895,73		895,73	
Mantap		71,73		73,58		75,00		76,88
Tidak Mantap		28,27		26,42		25,00		23,12
Jalan Kabupaten (Kulon Progo)	925,30		925,30		925,30		763,69	
Mantap		92,38		85,22		85,19		86,28
Tidak Mantap		7,62		14,78		14,81		13,72
Jalan Kabupaten (Gunungkidul)	818,46		818,46		686,00		686,00	
Mantap		50,63		50,63		70,08		71,15
Tidak Mantap		49,37		49,37		29,92		28,85
Jalan Kabupaten (Sleman)	1.085,13		1.085,13		1.085,13		1.085,13	
Mantap		68,50		69,86		68,92		71,34
Tidak Mantap		31,50		30,14		31,08		28,66

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2011

3. Luas Wilayah Perkotaan

Arahan pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Wilayah direncanakan sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), meliputi Kota Yogyakarta, Kecamatan Depok, sebagian Kecamatan Ngaglik, sebagian Kecamatan Mlati, sebagian Kecamatan Godean, sebagian Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon, sebagian Kecamatan Banguntapan;



- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : Kawasan Perkotaan Sleman, Bantul;
- c. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi : Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari; (PKWp)
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kawasan Perkotaan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Pundong, Jetis, Pleret, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen, Tepus, Ponjong, Mlati, Ngaglik, Prambanan, Piyungan, Srandakan, Godean.

Dalam perspektif ekonomi, pembangunan tidak lain berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat lokal (indigenous people). Oleh karena itu, pengembangan Kawasan APY ini dapat diorientasikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kapasitas atau keunggulan ekonomi lokal. Meski demikian, yang penting dalam menentukan tema-tema program pengelolaan, tidak hanya kegiatan ekonomi, melainkan juga potensi kemampuan lahan, kegiatan budidaya serta kecenderungan perkembangan permukiman dan perkotaan. Tema pengembangan kawasan dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan Permukiman;
- b. Kawasan Lindung Budaya, meliputi Kawasan Njeron Beteng, Kawasan Kota Baru, Kawasan Pakualaman serta Kawasan Kota Gede;
- c. Kawasan Pendidikan Tinggi, meliputi Kawasan UGM, UNY dan Kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Depok serta di Kecamatan Gamping yang meliputi Kampus UMY;
- d. Zona Industri dan Pergudangan;
- e. Bandara, yaitu Bandara Adisucipto;
- f. Kawasan Perdagangan
- g. Kawasan Lindung Alam



4. Penggunaan Internet oleh Sektor Usaha

Penggunaan TI memberikan nilai positif bagi strategi manajemen yang terkait dengan aspek komunikasi, akses informasi, pengambilan keputusan, manajemen data dan knowledge management pada sebuah organisasi. TI dapat menjadi kekuatan strategi dan alat bagi organisasi yang memberikan keuntungan pada aspek promosi dan kekuatan daya saing (Buhalis, 2003). Hengst dan Sol (2001) berpendapat bahwa TI memberikan keuntungan bagi organisasi bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kemampuan organisasi bisnis dalam melakukan koordinasi dengan pihak luar. Namun, beberapa peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan fakta bahwa adopsi TI di UKM masih sangat rendah dari yang diharapkan (Pavic, et al., 2007; Yu, 2006). Di era knowledge-based economy saat ini adalah penting bagi UKM untuk melakukan adopsi TI. Karena adopsi TI memberikan kemampuan bagi UKM untuk memberikan layanan yang semakin baik dan daya saing (Apulu dan Latham, 2011). TI juga terbukti mempunyai dampak positif pada kinerja organisasi (Maldeni dan Jayasena, 2009). Organisasi bisnis modern diperkirakan tidak akan mampu bekerja secara optimal dan dapat memberi dampak yang kurang baik terhadap daya tahan dan pertumbuhan ekonomi secara umum (Berisha-Namani, 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lefebvre, et al., (1999), terdapat empat faktor yang menentukan adopsi teknologi baru oleh UKM, yaitu: (1) karakteristik UKM, (2) strategi dan manajemen kompetisi UKM, (3) pengaruh pihak internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan adopsi, dan (4) karakteristik teknologi baru yang akan diadopsi.

Telah banyak UKM mencoba untuk mengaplikasikan TI guna mendukung kegiatan bisnisnya. Tetapi karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, aplikasi TI pada UKM menjadi berbeda dari usaha besar (Welsh dan White 1981; Fink 1998; Thong 1999 dalam Sarosa dan Zowghi 2003). Keterbatasan sumber daya tersebut dalam hal sumber daya manusianya, sumber daya keuangan dan sumber daya alat-alat (Lesjak, 1995 dalam Seyal et al., 2000), sehingga bagi UKM penyebaran TI bukanlah suatu proses yang sederhana. Seperti yang dikatakan Iacovou et al. (1999) dalam Jeanette dan Cavaye (1999) bahwa UKM terlebih dahulu mengidentifikasi



faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aplikasi TI. Penyebaran TI juga membutuhkan komitmen dari perusahaan tidak hanya terbatas untuk belajar dan memahami perubahan proses bisnis tetapi juga kesediaannya untuk melakukan investasi di bidang teknologi (Hargo, 2001). Sarosa dan Zowghi (2003) menyimpulkan beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam proses adopsi TI. Faktor pendorong merupakan hal positif yang xxvi mempengaruhi adopsi TI, sedangkan faktor penghambat merupakan hal negatif yang mempengaruhi adopsi TI. Faktor pendorong dan penghambat tersebut berasal dari dua sumber, yaitu faktor internal dari UKM dan faktor eksternal dari UKM. Faktor pendorong dan penghambat internal antara lain manajer dan pemilik, sumber-sumber yang dimiliki UKM itu sendiri dan tenaga kerja. Faktor pendorong dan penghambat eksternal antara lain pesaing, suplier dan konsumen, pemerintah dan jasa konsultan.

Kirby dan Turner (1993) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi TI adalah ketiadaan pengetahuan tentang komputer dan pengetahuan untuk mengambil manfaat TI oleh pemilik usaha kecil. Attewell (1992); Cragg dan King (1993); Chesher dan Skok (2000) dalam Sarosa dan Zowghi (2003) mengatakan, dukungan pemilik-manajer puncak dapat berupa pengetahuan mereka tentang TI dan persepsi akan manfaat yang diperoleh dari penggunaan TI. Dengan tingkat pemahaman teknologi yang tinggi, diharapkan UKM mengadopsi dan memanfaatkan TI secara ekstensif (Hargo, 2001).

Bagi beberapa perusahaan, keuntungan yang diperoleh dari TI internet antara lain kemampuan menjaga loyalitas konsumen, mengantisipasi kebutuhan konsumen di masa mendatang, menanggapi kepedulian konsumen dan memperbaiki pelayanan konsumen. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, perusahaan secara konsisten dapat memberikan yang terbaik dengan menjaga kebutuhan masing-masing konsumen, mempertahankan kecenderungan pasar, menyediakan informasi yang ada hubungannya secara menarik, sewaktu-waktu dan dimana saja (Oviliani, 2000). xxvii Zinatelli et al., (1997) dalam penelitiannya menemukan bahwa kurangnya keahlian dan training komputer, kurangnya dukungan dari manajer dan keuangan yang terbatas merupakan faktor terbesar yang menghambat aplikasi TI. Jarvenpaa dan Ives (1991)



dalam Sadat (2004) mengatakan hal yang senada, bahwa investasi dalam pengembangan TI perlu dipertimbangkan adanya dukungan dari manajemen puncak.

Tujuannya adalah untuk mendayagunakan secara maksimal manfaat TI dan kesuksesan dalam ketersediaan investasi TI harus didukung oleh manajemen puncak (O'Toole dan C'Toole, 1976 dalam Sadat, 2004). Adam (1972) masih dalam Sadat (2004) juga menyatakan bahwa kesuksesan aplikasi TI bergantung pada partisipasi aktif dari manajemen puncak. Karena UKM memiliki sumber keuangan yang terbatas, keinginan untuk memperoleh produk TI mungkin sulit. Terbatasnya sumber keuangan merupakan kelemahan bagi UKM untuk berhati-hati dalam menyeleksi dan menerapkan TI. Pada UKM, aplikasi TI misalnya e-mail, memudahkan komunikasi secara ekstensif dengan biaya yang murah (Sillince et al., 1998; Walczuch et al., 2000 dalam Sarosa dan Zowghi 2003).

Menurut Hargo (2001), dukungan lembaga pemerintah.

- **Letak Geografis**

1. Kabupaten-kabupaten di sekeliling DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak pada posisi astronomi antara 7o.33'-8o.12'Lintang Selatan dan 110o.00'-110o.50' Bujur Timur. Secara administratif, DIY memiliki luas wilayah terkecil kedua di Republik Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah daratan DIY hanya 3.185,80 km², atau 0,17 persen dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya sisi selatan. Wilayah daratan DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Purworejo di sisibarat, Kabupaten Magelang dan Boyolali di sisi utara; serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri di sisi timur. Wilayah selatan DIY berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Bentang alam wilayah DIY merupakan kombinasi antara daerah pesisir, dataran dan perbukitan/pegunungan yang dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi. Pertama, satuan fisiografi Gunung Merapi dengan ketinggian 80-2.911m dan terbentang mulai dari kerucut gunungapi hingga dataran fluvial gunung api serta bentang lahan vulkanik di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian



Kabupaten Bantul. Kedua, satuan fisiografi Pegunungan Selatan (ketinggian 150-700 m) menjadi bagian dari jalur Pegunungan Seribu dan terletak di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kawasan ini didominasi oleh perbukitan batu kapur dan karst yang tandus dan kekurangan air permukaan, sehingga kurang potensial untuk kegiatan pertanian. Ketiga, satuan fisiografi Pegunungan Kulonprogo, terletak di bagian utara Kulonprogo dan menjadi bentang lahan dengan topografi berbukit. Keempat, satuan fisiografi Dataran Rendah (ketinggian 0-80m) membentang di bagian selatan wilayah DIY mulai dari Kulonprogo sampai wilayah Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Kawasan ini sangat subur dan cukup potensial untuk kegiatan pertanian. Mayoritas desa di DIY berada di daerah dataran dengan jumlah 305 desa (69,64 persen), berikutnya adalah desa di punggung/lereng bukit dengan jumlah 100 desa (22,83 persen). Sementara, desa yang terletak di daerah pesisir terdiri dari 33 desa atau 7,53 persen dari seluruh desa.

- **Modal Alamiah**

1. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Lahan/Tanah (luas lahan pertanian dan non pertanian)
2. Sumber daya Air perkapita
3. Sumber Daya Hutan (ha)
4. Nilai tambah sektor pertambangan dan penggalan (pangsa)

4.8. Sistem Keuangan

4.8.1. Tingkat Bunga Riil Jangka Pendek (BPR)

Tingkat Bunga Riil adalah real interest rate yaitu tingkat bunga dihitung dengan mengurangkan tingkat inflasi dari tingkat bunga nominal (yang ditetapkan); tingkat bunga riil merupakan faktor penting untuk membandingkan penghasilan efektif dari investasi yang berbeda-beda, dengan menghitung nilai sekarang atau nilai yang akan datang dengan memperkirakan tingkat inflasi pada masa yang akan datang.



Sebagai ilustrasi, obligasi atau sertifikat deposito yang mempunyai tingkat penghasilan 11% pada saat inflasi sebesar 5% akan mempunyai pendapatan bersih sebelum pajak sebesar 6%; jika inflasi meningkat lebih dan 5%, nilai investasi akan turun karena pendapatan bunga yang menurun sebagai akibat kenaikan harga secara umum.

4.8.2. Biaya Modal Perbankan (BPR)

Biaya modal (coc) merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang diguna-kan untuk investasi perusahaan.

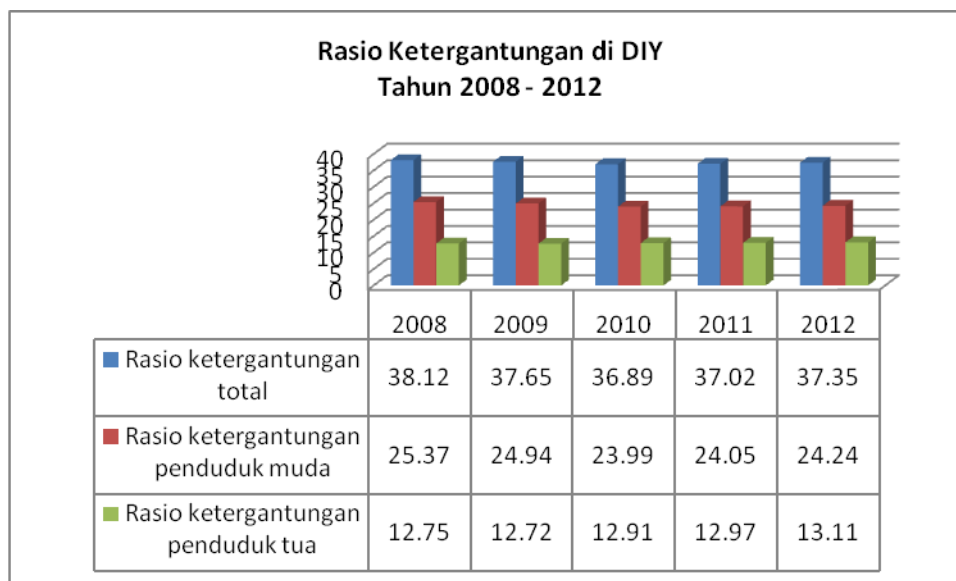
4.9. Mengukur Ketersediaan Dan Kualitas Sumber Daya Saing Manusia Sebagai Daya Saing Perekonomian Daerah

Kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu daya saing perekonomian daerah adalah sebagai berikut.

4.9.1. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun).

Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Gambar 4.33. Rasio Ketergantungan di DIY Tahun 2008-2012

Sumber : DDA 2012(diolah)

Rasio ketergantungan penduduk DIY tahun 2012 sebesar 37,35 ini disumbangkan oleh ketergantungan penduduk muda sebesar 24,24 dan ketergantungan penduduk tua sebesar 13,11. Angka rasio ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 38 orang yang tidak produktif. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2011 yang sebesar 37,02. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif (65 tahun lebih).

Bertambahnya angka ketergantungan dari tahun 2011 sampai dengan 2012 disebabkan naiknya persentase penduduk yang belum dan tidak produktif. Rasio ketergantungan penduduk muda dan rasio ketergantungan penduduk tua menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Naiknya persentase penduduk yang tidak produktif antara lain terkait dengan capaian DIY dimana penduduknya mempunyai Usia Harapan Hidup tertinggi di Indonesia. Sedangkan naiknya persentase penduduk yang belum produktif harus diikuti dengan program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi, seperti program Keluarga Berencana (KB).

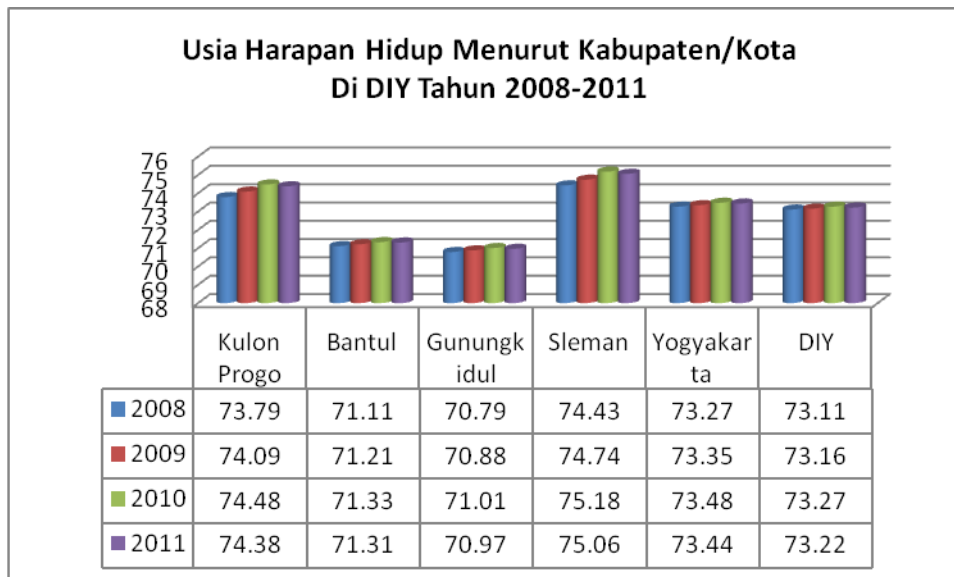


4.9.2. Tingkat Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori.

Menurut sensus penduduk yang dilakukan BPS, Angka Usia Harapan Hidup di DIY mengalami peningkatan. Perkembangan angka usia harapan hidup DIY berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.34. Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2011

Sumber: BPS Provinsi DIY



Angka harapan hidup di DIY merupakan yang terbaik di Indonesia. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup masyarakat DIY. Meningkatnya angka harapan hidup di DIY juga menunjukkan kesejahteraan penduduk DIY yang semakin membaik sehingga mampu untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap sarana kesehatan.

4.9.3. Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan DIY selama lima tahun terakhir (2008-2012) cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja DIY tercatat sebanyak 1.944.858 orang naik dari tahun 2011 yang sebanyak 1.872.912 orang. Sementara itu, selama periode 2008-2012 jumlah pengangguran di DIY tertinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 121.046 orang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 107.148 orang dan tahun 2011 menjadi 74.317 tetapi kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 77.150 orang.

Tabel 4.32.
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan di DIY, 2008-2012 (Agustus)

Kegiatan	2008	2009	2010	2011	2012
Penduduk Usia 15+ (orang)	2.836.178	2.871.719	2.698.134	2.723.629	2.745.072
a. Angkatan Kerja (orang)	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.944.858
Bekerja (orang)	1.892.205	1.895.648	1.775.148	1.798.595	1.867.708
Pengangguran (orang)	107.529	121.046	107.148	74.317	77.150
b. Bukan Angkatan Kerja (orang)	836.444	855.025	815.838	850.717	800.214

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2012

Jumlah penduduk yang bekerja di DIY yang bekerja dari tahun 2009 sampai 2011 menurut data BPS cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 penduduk DIY yang bekerja sebanyak 1.798.595 yang didominasi oleh penduduk di usia produktif usia 30 sampai dengan 49 tahun. Selain penduduk usia produktif, jumlah penduduk DIY umur 65 tahun keatas yang bekerja juga tergolong tinggi sebanyak 132.737 di tahun 2011. Berikut adalah tabel penduduk yang bekerja di DIY menurut golongan umur dan jenis kelamin :



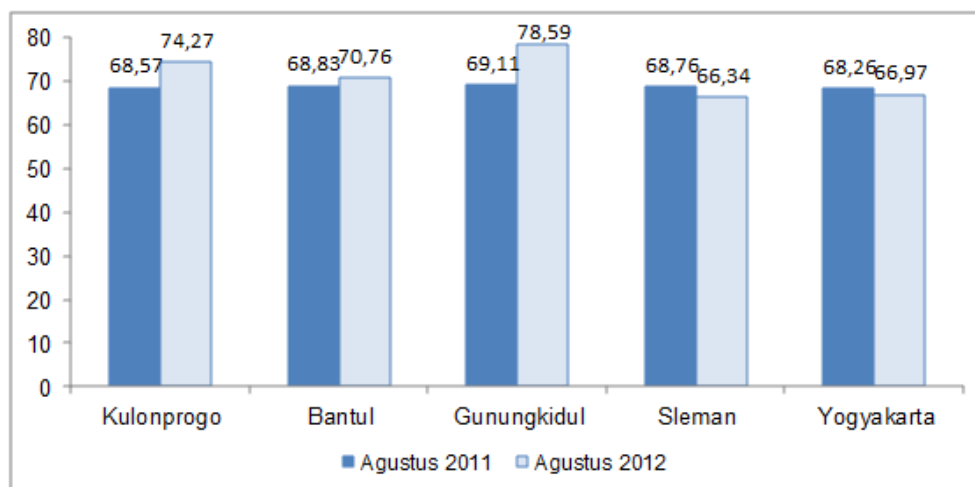
Tabel 4.33.
Penduduk yang Bekerja di DIY menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin, 2009-2011

Golongan Umur	Agust-09			Agust-10			Agust-11		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
15-19	28.554	26.160	54.714	34.207	28.030	62.237	30.112	34.660	64.772
20-24	71.056	60.205	131.261	61.558	57.463	119.021	89.873	69.702	159.575
25-29	147.717	90.320	238.037	103.914	75.154	179.068	115.164	79.184	194.348
30-34	179.812	115.244	295.056	116.756	81.845	198.601	121.945	95.593	217.538
35-39	112.358	95.384	207.742	115.545	96.207	211.752	117.941	99.917	217.858
40-44	128.159	103.097	231.256	124.848	102.534	227.382	128.991	116.941	245.932
45-49	105.443	93.599	199.042	108.201	95.875	204.076	106.721	90.777	197.498
50-54	97.840	75.433	173.273	94.843	79.654	174.497	99.992	73.230	173.222
55-59	67.199	50.233	117.432	68.825	64.029	132.854	72.491	42.268	114.759
60-64	46.666	44.182	90.848	47.488	44.730	92.218	48.251	32.105	80.356
≥ 65	90.401	66.586	156.987	93.345	80.097	173.442	70.572	62.165	132.737
Jumlah	1.075.205	820.443	1.895.648	969.530	805.618	1.775.148	1.002.053	796.542	1.798.595

Sumber : BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional, diolah Pusdatinaker

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara penduduk tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK DIY pada Agustus 2012 sekitar 70,85%, meningkat sekitar 2,08 poin bila dibandingkan keadaan Agustus 2011 (68,77%) atau naik sekitar 0,38 poin dibanding Februari 2012 (70,47%).

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, TPAK di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini karena di dua kabupaten tersebut tenaga kerja sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut sangat tergantung pada musim dan pola garapan, sehingga TPAK sangat berfluktuasi. Pada saat musim tanam atau panen memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak daripada pada masa garapan yang lain. Sementara di kabupaten lain tidak banyak berubah, meskipun di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terdapat kecenderungan penurunan nilai TPAK.



Gambar 4.35. TPAK menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011-2012 (Agustus)

Sumber :BRS November 2012, BPS Provinsi DIY

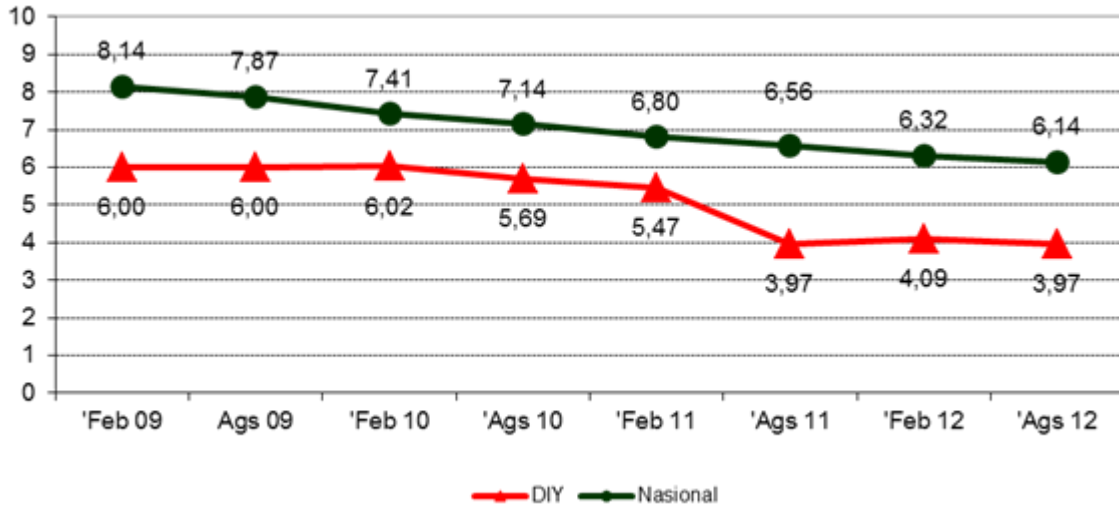
Jumlah angkatan kerja di DIY selama 2008-2011 cenderung dinamis. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 sebanyak 1.872.912 orang, sementara itu data pada tahun 2010 sebanyak 1.882.296 orang, tahun 2009 sebanyak 2.016.694 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 1.999.734 orang. Untuk tahun 2012 diprediksi jumlah angkatan kerja sebanyak 1.894.924. Dengan demikian pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja dari tahun 2008, 2009 dan 2010. Selanjutnya, jumlah pengangguran terbuka di DIY selama kurun waktu 2008-2011 juga menunjukkan angka dinamis. Tahun 2008 sebesar 107.529 orang, naik pada tahun 2009 menjadi 121.046 orang, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 107.148 orang dan tahun 2011 turun menjadi 74.317. Sedangkan proyeksi jumlah pengangguran terbuka untuk tahun 2012 turun menjadi 72.564.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama kurun waktu 2008-2011 menunjukkan angka yang dinamis. Data pada tahun 2008 menunjukkan TPAK sebesar 70,41% yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 70,23%, angka ini menurun kembali di tahun 2010 menjadi 69,76%, pada tahun 2011 turun lagi menjadi 68,77% dan pada tahun 2012 TPAK diproyeksi mengalami kenaikan menjadi 68,88%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk melihat perkembangan angka pengangguran. Fluktuasi TPT di DIY dari tahun 2009 ke 2012 berada dalam kisaran 4-6%, meskipun ada kecenderungan mengalami penurunan. Pada Agustus 2009 TPT sekitar



6,00%, pada Agustus 2010 sebesar 5,69%, dan pada Agustus 2011 dan 2012 sebesar 3,97%. Angka ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional yang berkisar 6-8%.



Gambar 4.36. Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, 2009–2012 (%)

Sumber : BRS November 2012, BPS Provinsi DIY

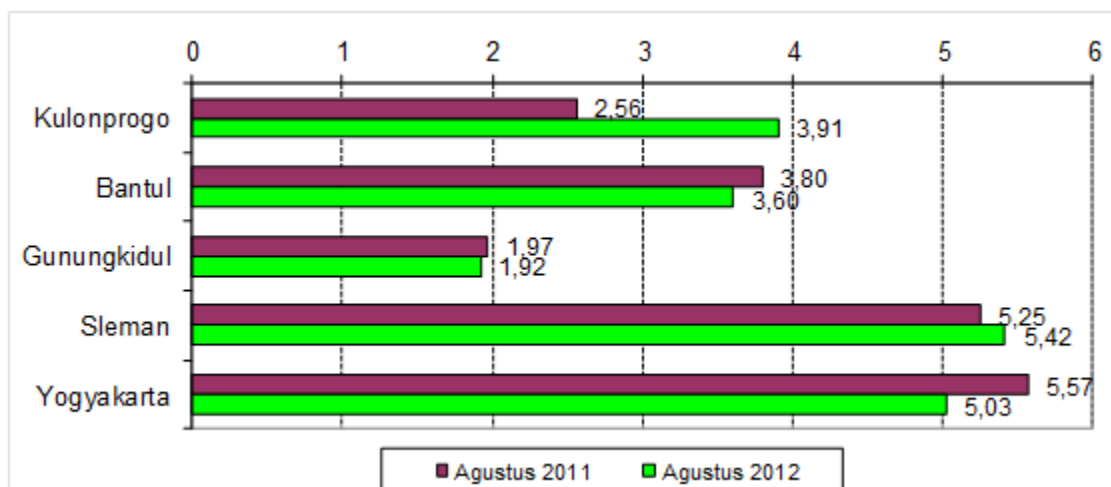
Pada Agustus 2012 TPT di daerah perkotaan DIY sekitar 4,53%, sementara di perdesaan hanya 2,99%. TPT di perkotaan selalu lebih tinggi dibanding di perdesaan di DIY. Tingginya TPT di perkotaan dipengaruhi oleh beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sementara di perdesaan umumnya didominasi pertanian dengan daya tampung yang terbatas. Angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan pindah atau mondok di perkotaan, sehingga pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Penganggur yang tersisa di daerah perdesaan sebagian di antaranya memang mencari pekerjaan di perdesaan juga, dan sebagian lagi tetap tinggal di desanya sambil mencari pekerjaan dengan cara melaju (*nglajo/commute/ulang-alik/ pulang-pergi*) ke perkotaan.

TPT di kabupaten/kota mengalami variasi perkembangan pada periode Agustus 2011 ke Agustus 2012. Pola TPT antar kabupaten/kota juga terdapat perubahan, dimana nilai TPT di Kabupaten Sleman menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Pada Agustus 2012 TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman (5,42%), disusul Kota



Analisis Daya Saing Daerah

Yogyakarta (5,03%) dan Kabupaten Kulonprogo (3,91%). TPT rendah terjadi di Kabupaten Gunung Kidul (1,92%) dan Kabupaten Bantul (3,60%).



Gambar 4.37. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di DIY(%), 2011-2012

Sumber :BRS November 2012, BPS Provinsi DIY

Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sempat mengalami penurunan pada tahun 2006 ke tahun 2007 kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2010. Namun secara keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 4,03%. Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.34.
Tenaga Kerja Perusahaan, 2005 - 2010

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan (orang)	31.866	34.840	38.505	38.938	143.834	149.494

Sumber:Disnakertrans DIY

4.9.4. Tingkat Partisipasi SD/SMP/SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan



keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Dilihat dari APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan relatif meningkat dari tahun ke tahun, sekalipun kenaikan tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan terutama pada upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

APM SD/MI periode 2012/2013 mencapai 97,54 naik dari periode sebelumnya. Jika dilihat APM menurut kabupaten/kota maka APM Kabupaten Gunungkidul masih di bawah rata-rata provinsi. Sementara itu, APK SD/MI periode 2012/2013 sebesar 111,78 mengalami penurunan dari periode sebelumnya yang mencapai 111,43.

Tabel 4.35.
APM SD/MI/Paket A di DIY, 2008/2009-2012/2013

Kabupaten/ Kota	APM (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	91,71	91,74	91,71	92,45	92,54
Sleman	100,87	100,97	100,87	101,58	101,59
Gunungkidul	88,72	88,82	88,72	88,45	88,45
Kulon Progo	91,46	91,66	91,46	91,18	90,92
Yogyakarta	121,59	121,89	121,59	122,24	122,93
DIY	97,15	97,45	97,15	97,53	97,54

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 4.36.
APK SD/MI/Paket A di DIY, 2008/2009-2012/2013

Kabupaten/ Kota	APK (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	104,75	104,78	104,75	105,29	105,90
Sleman	116,5	116,57	116,50	116,53	117,34
Gunungkidul	100,31	100,38	100,31	100,01	99,80
Kulon Progo	106,91	106,98	106,91	106,58	105,87
Yogyakarta	139,26	139,86	139,26	138,63	140,13
DIY	111,45	112,4	111,45	111,43	111,78

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

APM pada jenjang SMP/MTs di DIY pada periode 2012/2013 mencapai 81,13 meningkat dari periode 2011/2012 yang mencapai 81,08 dan periode 2010/2011 yang



Analisis Daya Saing Daerah

mencapai 81,05. Sementara itu, APK SMP/MTs pada periode 2012/2013 mencapai 115,43naik dari periode sebelumnya.

Tabel 4.37.
APM SMP/MTs/Paket B di DIY 2008/2009-2012/2013

Kabupaten/ Kota	APM (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	71,71	71,76	71,71	74,65	75,78
Sleman	81,77	81,87	81,77	79,65	81,85
Gunungkidul	78,22	78,28	78,22	73,97	71,47
Kulon Progo	87,93	87,98	87,93	84,47	82,55
Yogyakarta	95,5	95,7	95,70	105,87	105,99
DIY	83,03	83,12	81,05	81,08	81,13

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 4.38.
APK SMP/MTs/Paket B di DIY 2008/2009-2012/2013

Kabupaten/ Kota	APK (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	105,89	105,89	105,89	109,66	106,38
Sleman	114,39	114,89	114,39	113,68	113,72
Gunungkidul	111,93	111,93	111,93	106,65	104,34
Kulon Progo	117,88	117,98	117,88	120,49	124,28
Yogyakarta	130,05	130,95	130,95	141,25	148,78
DIY	116,03	116,3	114,32	115,50	115,43

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, pada tahun 2012/2013 APK menunjukkan angka sebesar 88,04% sedangkan tahun 2011/2012 mengalami penurunan menjadi 88,79%. APM SM/MA pada tahun 2012/2013 sebesar 63,65%, mengalami kenaikan pada tahun 2011/2012 yang mencapai angka sebesar 63,45%.



Tabel 4.39.
APM SMA/MA/SMK/Paket C di DIY,
2008/2009 s/d 2012/2013

Kabupaten/ Kota	APM (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	59,80	41,66	54,57	62,36	63,04
Sleman	50,28	55,31	54,06	54,04	55,06
Gunungkidul	49,18	59,80	49,99	51,99	51,99
Kulon Progo	56,10	70,60	63,43	70,66	66,99
Yogyakarta	93,92	98,92	88,18	88,11	88,65
DIY	60,87	60,46	60,47	63,45	63,65

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 4.40.
APK SMA/MA/SMK/Paket C di DIY,
2008/2009 s/d 2012/2013

Kabupaten/ Kota	APK (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	82,45	56,92	83,01	85,94	85,15
Sleman	75,72	81,93	76,59	76,56	77,35
Gunungkidul	68,96	84,32	71,37	71,22	70,46
Kulon Progo	87,84	114,70	93,14	92,77	93,63
Yogyakarta	131,23	143,01	130,03	129,49	124,23
DIY	87,06	87,90	88,33	88,79	88,04

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

4.9.5. Angka Kelulusan

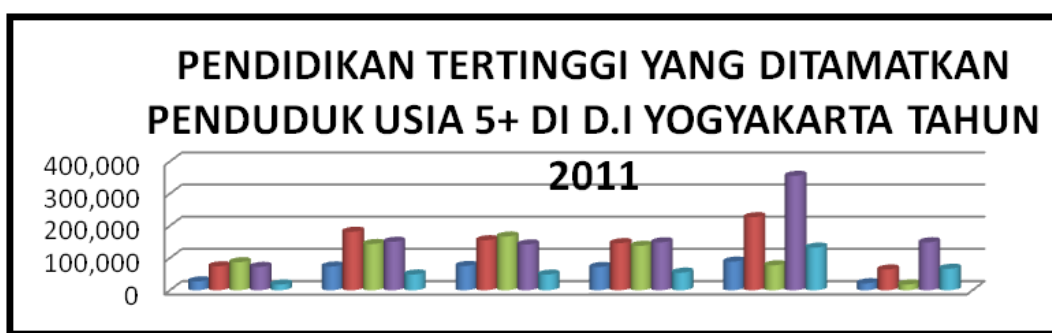
Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di DIY selama kurun waktu 2007-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.41.
Angka Kelulusan menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2007-2012

Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SD/MI	98,85	99,65	98,18	96,47	98,53	98,69
SMP/MTs	99,92	90,18	90,15	81,84	98,28	98,46
SMA/MA/SMK	98,17	88,68	95,32	88,98	99,61	98,74

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka kelulusan di jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2010 terjadi penurunan angka kelulusan yang sangat signifikan. Sedangkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI cukup stabil.



Gambar 4.38. Rekapitulasi Pendidikan yang ditamatkan dari SD s/d Diploma ke atas menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Sumber : BPS Provinsi DIY

Jumlah pendidikan yang ditamatkan tingkat SD adalah di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan jumlah terbesar tingkat SMP, SLTA dan Diploma ke atas adalah di Kabupaten Sleman. Pendidikan yang ditamatkan tingkat SD dan SMP relatif hampir sama jumlahnya di masing-masing kabupaten/kota sementara Tingkat SLTA dan Diploma ke atas terjadi disparitas antar kabupaten/kota.

4.9.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka IPM DIY merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk DIY. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini salah satunya menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik.



Tabel 4.42.
IPM DIY menurut Komponen, 2009-2011

Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah)	IPM
2009	73,16	90,18	8,78	644,67	75,23
2010	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77
2011	73,27	91,49	9,20	650,16	76,32

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2011

Angka IPM DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, IPM DIY tercatat sebesar 76,32 naik dari angka IPM tahun 2010 yang sebesar 75,77. Nilai IPM DIY tahun 2011 menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Sementara itu jika dilihat menurut kabupaten/kota, peringkat IPM Kota Yogyakarta selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY.

Tabel 4.43.
IPM antar Kabupaten/Kota di DIY, 2008-2011

Kabupaten/Kota	IPM			
	2008	2009	2010	2011
Kulonprogo	73,26	73,77	74,49	75,04
Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05
Gunungkidul	70,00	70,18	70,45	70,84
Sleman	77,24	77,70	78,20	78,79
Kota Yogyakarta	78,95	79,29	79,52	79,89
DIY	74,88	75,23	75,77	76,32

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008-2011

4.9.7. Populasi Penduduk di Perkotaan

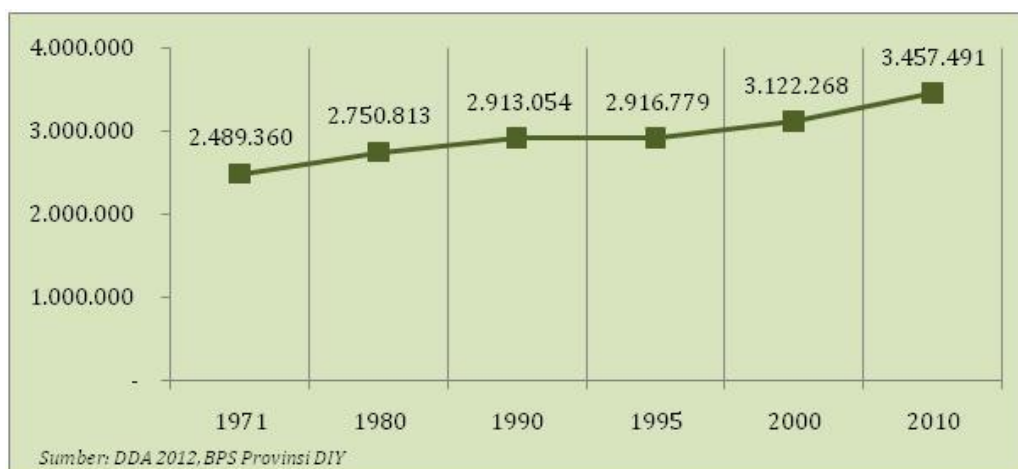
Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan



Analisis Daya Saing Daerah

mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 29.834 orang menjadi 3.487.325 orang pada tahun 2011.



Gambar 4.39. Perkembangan Jumlah Penduduk DIY menurut Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Sensus Penduduk antar Sensus (SUPAS) 1995

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.



Tabel 4.44.
Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010
0 – 14	40,90	35,06	28,28	22,38	21,96
15 – 64	54,82	59,14	64,46	69,10	68,53
65 +	4,38	5,80	7,26	8,53	9,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kondisi tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.487.325 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.107.304 orang. Sementara itu kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 390.207 orang.

Sementara itu jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan DIY sebesar 51,36% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang sekitar 48,64%. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya sex ratio DIY sebesar 94,71% yang berarti bahwa terdapat sekitar 94 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Wilayah DIY yang memiliki sex ratio tertinggi adalah Kabupaten Bantul, yaitu 100,39% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 89,39%. Untuk Kabupaten Bantul jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 4.45.
Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
Kulonprogo	190.761	199.446	390.207	95,65
Bantul	461.524	459.739	921.263	100,39
Gunungkidul	320.006	357.992	677.998	89,39
Sleman	534.644	572.660	1.107.304	93,36
Kota Yogyakarta	189.375	201.178	390.553	94,13
DIY	1.696.310	1.791.015	3.487.325	94,71

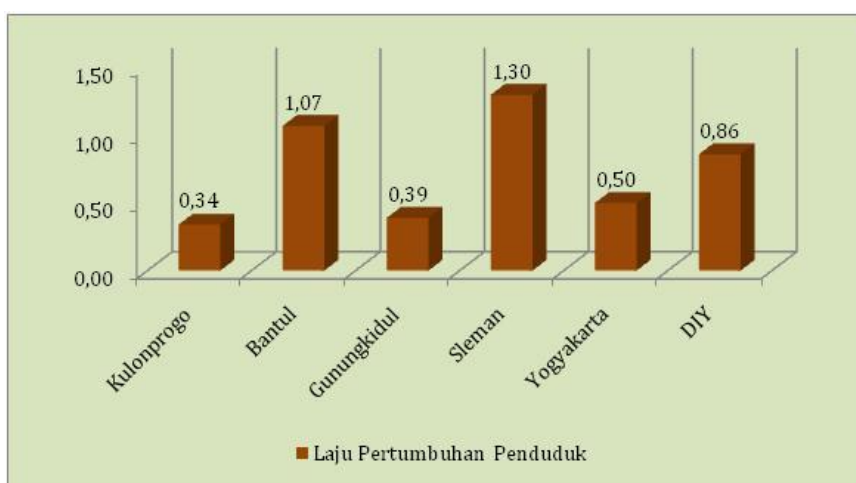
Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY



Analisis Daya Saing Daerah

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY relatif rendah. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk DIY tercatat sebesar 0,86% turun dari tahun 2010 yang sebesar 1,02%. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk tak lepas dari keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,34% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 1,30%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi kearah kedua kabupaten tersebut sehingga banyak pendatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan Kota Yogyakarta semakin jenuh untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota.



Gambar 4.40. Laju Pertumbuhan Penduduk DIY (%), 2011

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2011, Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk 677.998 orang (19,44%) tercatat sebagai kabupaten berkepadatan penduduk terendah yaitu 456 orang/km² sedangkan Kota Yogyakarta yang memiliki wilayah terkecil dengan jumlah



penduduk 390.553 orang (11,20%) tercatat sebagai wilayah DIY yang berkepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.017 orang/km².



Gambar 4.41. Peta Kepadatan Penduduk DIY, 2011

Sumber: Bappeda DIY, 2012

Menurut data proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS, selama kurun waktu 2012-2017 jumlah penduduk DIY akan mengalami peningkatan. Jumlah penduduk laki-laki diperkirakan lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan.

Menurut komposisi umur, diperkirakan jumlah penduduk berusia 0-4 tahun, mencerminkan jumlah kelahiran, akan mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016-2017. Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) diperkirakan akan mengalami kenaikan sehingga perlu diperhatikan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk mencegah terjadinya pertambahan pengangguran. Sementara itu, kenaikan jumlah penduduk usia tua (65 ke atas) menandakan bahwa usia harapan hidup penduduk DIY cukup tinggi.



Tabel 4.46.
Proyeksi Penduduk SP 2000 menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin di DIY, 2012-2017

Kelompok Umur	2012		2013		2014		2015	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0-4	109,0	104,1	109,6	105,2	109,6	105,6	110,1	105,5
4-9	104,5	100,6	106,1	101,8	107,1	103,3	108,9	104,4
10-14	100,3	96,6	101,8	97,6	102,7	97,9	102,5	98,5
15-19	121,1	113,3	116,1	108,8	110,5	103,6	102,5	98,0
20-24	155,9	139,2	152,2	137,1	149,8	135,3	148,7	133,8
25-29	191,6	162,4	186,0	157,2	181,6	153,4	180,4	151,4
30-34	193,4	168,8	198,3	170,7	199,2	172,0	200,0	170,5
35-39	148,7	142,4	159,3	148,2	168,2	154,3	175,6	159,2
40-44	121,0	127,5	122,4	128,3	126,1	129,5	130,9	132,7
45-49	113,6	123,5	114,0	124,4	114,7	125,5	116,0	125,7
50-54	103,5	110,5	105,8	113,4	107,5	116,5	108,5	118,7
55-59	86,3	90,4	88,7	94,3	92,4	97,5	94,6	101,6
60-64	65,0	71,2	67,2	74,2	71,2	76,3	74,4	79,8
65-69	49,9	59,0	51,0	60,0	52,0	61,1	53,4	62,8
70-74	42,0	52,8	42,1	52,8	41,9	53,0	41,3	52,6
75+	51,3	76,7	51,9	78,8	53,2	80,6	55,1	82,2
Jumlah	1.757,1	1.739,0	1.772,5	1.752,8	1.787,7	1.765,4	1.802,9	1.777,4

Kelompok Umur	2016		2017	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0-4	109,2	105,1	109,4	104,3
4-9	109,7	104,9	110,1	105,0
10-14	105,2	100,3	106,6	102,5
15-19	105,3	100,4	107,5	101,5
20-24	143,4	127,9	137,0	122,3
25-29	173,4	147,4	167,2	144,2
30-34	196,4	167,1	191,3	163,0
35-39	182,9	163,3	189,3	167,3
40-44	137,4	137,4	146,6	142,1
45-49	116,9	126,5	119,0	126,3
50-54	109,6	120,5	110,7	122,4
55-59	97,5	105,5	99,6	108,4
60-64	76,3	82,3	79,5	86,3
65-69	55,0	64,2	57,3	66,0
70-74	41,1	52,9	41,2	53,9
75+	56,2	83,7	56,2	85,5
Jumlah	1.815,5	1.789,4	1.828,5	1.801,0

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

4.9.8. Kualitas Pelayanan Kesehatan (jumlah tenaga medis per kapita)

Salah satu upaya Pemerintah Daerah DIY dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan diantaranya adalah rumah sakit. Ketersediaan rumah sakit di DIY berada di semua Kabupaten/Kota di DIY yaitu 18 rumah sakit di Kota Yogyakarta, 11 rumah sakit di Kabupaten Bantul, 8 rumah sakit di Kabupaten Kulon Progo, 3 rumah sakit di Kabupaten Gunungkidul, dan 26 rumah sakit di kabupaten Sleman (sumber : Dinas Kesehatan DIY). Jika dilihat dari data yang ada, proporsi ketersediaan rumah



sakit antara kabupaten/kota di DIY dirasa timpang, sehingga ke depan perlu diatur agar rasio rumah sakit dibandingkan penduduk yang dilayani lebih proporsional. Harapannya pemerataan pelayanan kesehataan akan terwujud dengan baik termasuk kedalaman cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antar 75%-85%. Data BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka 48,3% dari semua kelas tempat tidur rumah sakit. Berikut adalah tabel ketersediaan rumah sakit, jumlah tempat tidur, dan BOR menurut kabupaten/kota di Yogyakarta:

Tabel 4.47.
Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah RS	Jumlah Tempat Tidur	JumlahTempat Tidur Kelas 3	Jumlah Hari Perawatan	<i>Bed ocupansy ratio</i> (BOR)
1	Kota Yogyakarta	390.553	18	1.875	682	361.072	50,8%
2	Kab Bantul	921.263	11	879	415	158.445	53,3%
3	Kab Kulon Progo	390.207	8	524	201	32.933	18,2%
4	Kab Gunungkidul	677.998	3	257	109	59.471	62,7%
5	Kab Sleman	1.107.304	26	2.415	931	332.592	54,7%
6	DIY	3.487.325	66	5.950	2.338	944.513	48,3%

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

4.9.9. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter umum di DIY tahun 2011 sebesar 28,76 per 100.000 penduduk, yang berarti 1 orang dokter umum di DIY untuk 3.477 jiwa. Rasio tersebut masih di bawah standar nasional yaitu sebesar 40 per 100.000 penduduk atau 1 orang dokter umum untuk 2.500 jiwa. Sedangkan untuk rasio dokter spesialis, kondisi DIY sudah jauh di atas standar nasional yaitu 23,79 per 100.000 penduduk dari standar nasional sebesar 6 per 100.000 penduduk. Demikian juga dengan rasio dokter gigi, kondisi di DIY sudah lebih tinggi dari standar nasional, yaitu 12,46 per 100.000 penduduk dari standar nasional 11 per 100,000 penduduk. Tabel



berikut menyajikan data rasio dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis di DIY tahun 2009–2011 :

Tabel 4.48.
Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 di DIY, 2009-2011

Dokter	2009		2010		2011	
	Jumlah	Rasio per 100.000 Penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 Penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 Penduduk
Dokter Umum	773	21,68	723	19,69	997	28,76
Dokter Spesialis	789	22,13	868	24,39	825	23,79
Dokter Gigi	304	8,53	253	6,9	432	12,46

Sumber : Profil Kesehatan 2009-2011, Dinas Kesehatan DIY, diolah

4.9.10. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

Rasio perawat di DIY tahun 2011 sebesar 178,65 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2011 sebesar 52,85 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk. Tabel berikut menyajikan jumlah perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi di DIY tahun 2009–2011.

Tabel 4.49.
Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Kefarmasian, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di DIY, 2009-2011

Tenaga Kesehatan	2009		2010		2011	
	Jumlah	rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	rasio per 100.000 penduduk
Perawat	4.379	122,82	4.635	134,20	6.194	178,65
Bidan	1.172	32,87	1.284	37,18	1.857	52,86
Tenaga Kefarmasian	732	20,53	563	16,30	2.069	59,67
Tenaga Gizi	277	7,77	294	8,51	353	10,18

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2009-2011, Dinas Kesehatan DIY, diolah

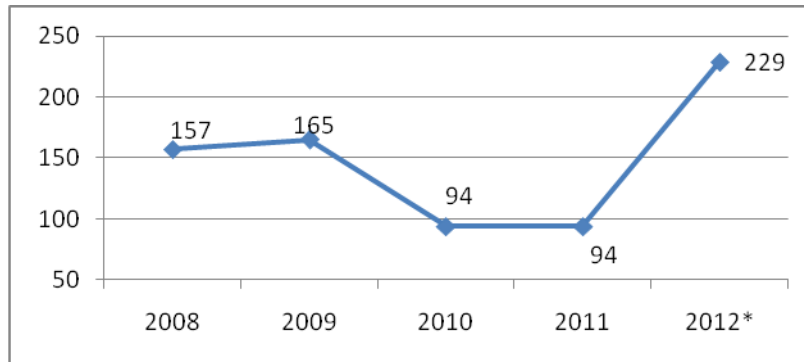
4.10. Mengukur Seberapa Kondusif Iklim Sosial, Politik, Dan Aspek Keamanan Dalam Mendukung Perekonomian Daerah

4.10.1. Penegakan keputusan/Pelanggaran hukum.

Penegakan hukum ini didukung oleh kelembagaan dan sumberdaya penegak hukum yang bertugas di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Komposisi kelembagaan penegakan hukum di DIY terdiri dari lima Pengadilan Tinggi; satu Pengadilan Agama; satu

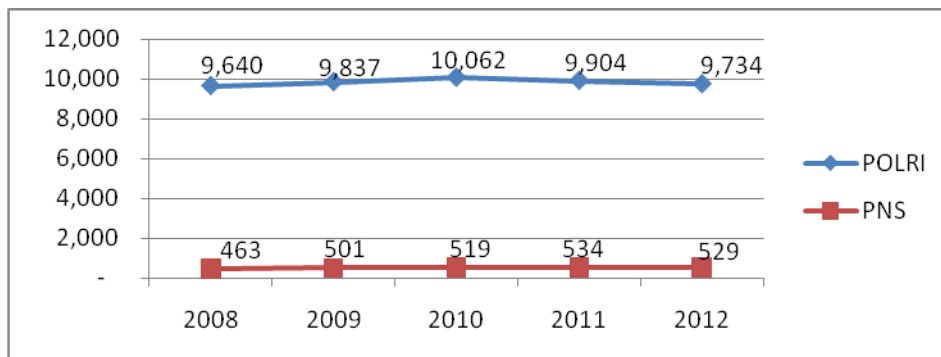


Pengadilan Militer; Pengadilan Tata Usaha Negara; dua Lembaga Pemasyarakatan dan tiga Rupbasan. Kelengkapan kelembagaan juga didukung oleh kesiapan aparat penegak hukum sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 4.42. Jumlah Jaksa di Wilayah DIY Tahun 2008-2012
Sumber: Kejaksaan Tinggi DIY, 2012

Berdasarkan gambar terlihat bahwa jumlah Jaksa di DIY mengalami fluktuatif, penurunan paling tajam selama lima tahun terakhir pada tahun 2010 dan 2011 namun kemudian meningkat pada tahun 2012 sebanyak 135 orang.

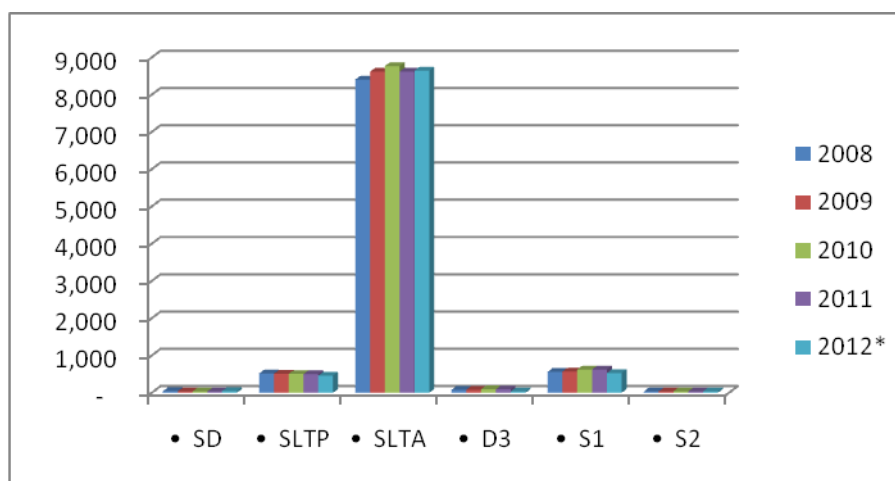


Gambar 4.43. Jumlah POLRI dan PNS dibawah POLDA DIY 2008-2012
Sumber: Polda DIY, 2012*

Jumlah personil POLRI di Polda DIY mengalami fluktuasi jumlahnya namun tidak terlalu besar, perubahan dari tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan sebesar 170 personil.



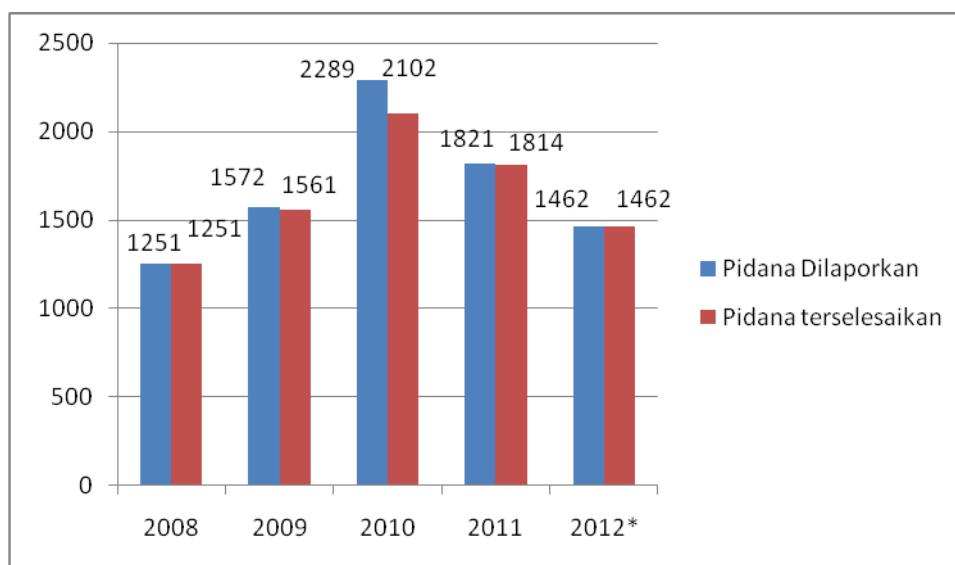
Analisis Daya Saing Daerah



Gambar 4.44. Personil POLRI Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2008-2012

Sumber: Polda DIY, 2012*

Kualitas personil POLRI yang dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh selama lima tahun mayoritas berada pada tingkat SLTA dengan persentase rata-rata sebesar 87,62 %. Personil yang telah menempuh pendidikan sarjana (S1) dengan rata-rata selama lima tahun 5,67 % sedangkan pascasarjana (S2) sebesar 0,38%.



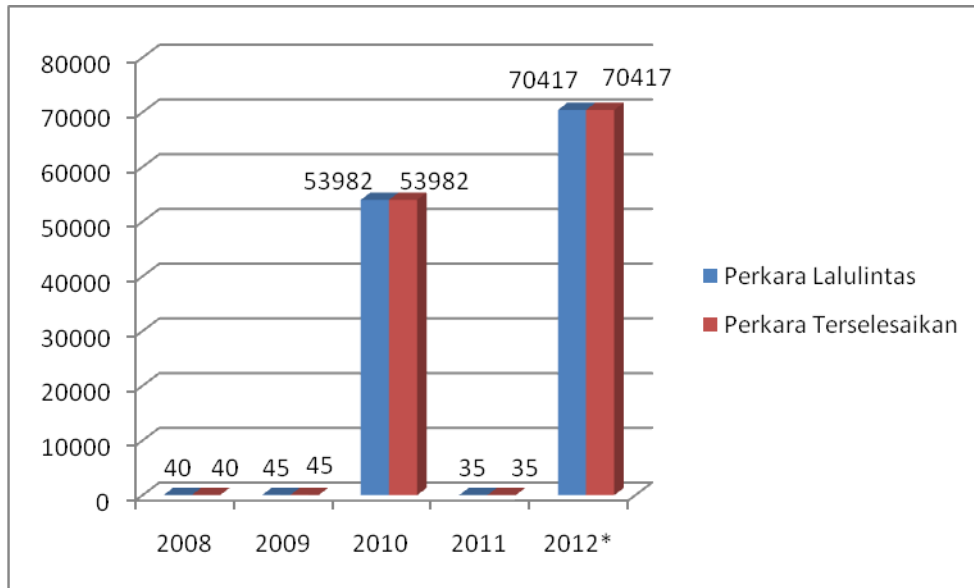
Gambar 4.45. Jumlah perkara Pidana, Tahun 2008-2012

Sumber: Kejaksaan Tinggi DIY, 2012*

Capaian terendah penyelesaian perkara pidana terjadi pada tahun 2010 dengan 187 kasus atau 8,17 %. Trend selama lima tahun ketidak terselesaiannya kasus rata-rata 68



kasus perkara atau 3,08 %. Perkara kasus perdata di DIY terbilang cukup kecil dimana selama lima tahun hanya terdapat enam perkara yang dilaporkan.



Gambar 4.46. Jumlah Perkara Lalu Lintas, Tahun 2008-2012

Sumber: Kejaksaan Tinggi DIY, 2012*

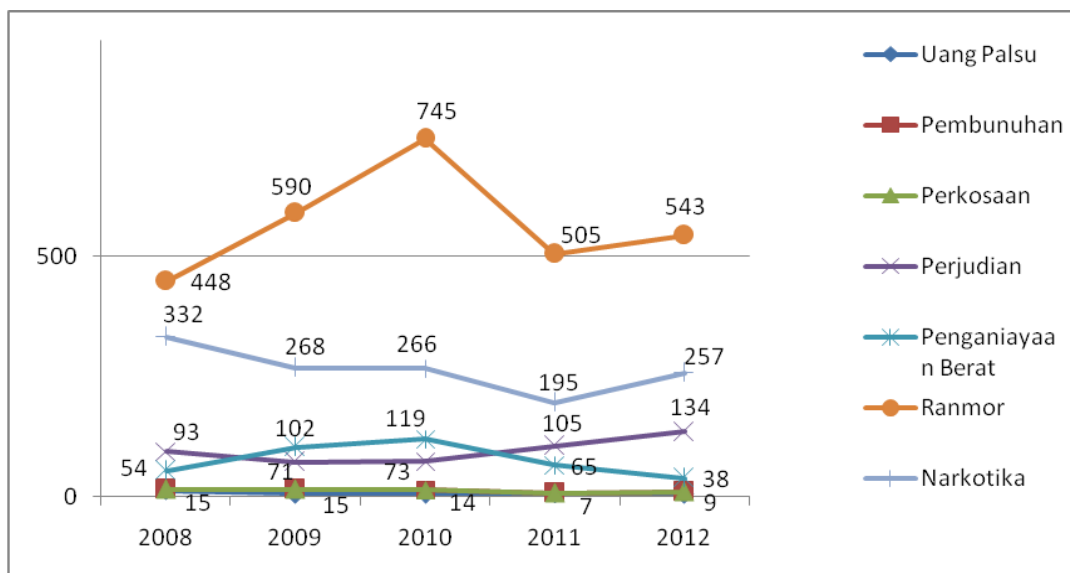
Perkara lalu lintas selama lima tahun terakhir mempunyai capaian penyelesaian kasus yang sudah maksimal yakni 100 % terselesaikan.

4.10.2. Tingkat Kejahatan

Beberapa tindak kriminal yang terjadi diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tiga tertinggi adalah pencurian sepeda motor (543 Kasus), penyalahgunaan narkoba (257 kasus) dan perjudian (134 kasus). Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Analisis Daya Saing Daerah



Gambar 4.47. Angka Kejahatan di DIY tahun 2002 – 2012

Sumber: Polda DIY, 2012

Daerah Istimewa Yogyakarta yang bermetamorfosis dari kota sepeda beralih ke kota sepeda motor dengan pertumbuhan yang cukup tinggi mempunyai permasalahan dengan keamanan terhadap pencurian sepeda motor. Trend kasus pencurian sepeda motor secara rata-rata adalah 566 kasus, dengan kasus pertahun yang fluktuatif tersebut dapat dengan sederhana dinyatakan bahwa tidak terjadi penurunan yang signifikan atas pencurian sepeda motor.

Kasus tertinggi nomor dua adalah penyalahgunaan narkotika yang notabene paling banyak adalah pelajar, mahasiswa dan eksekutif muda. Trend penyalahgunaan narkotika secara rata-rata lima tahun adalah 263 kasus, sama halnya dengan pencurian sepeda motor bahwa fluktuatif kasus per tahun tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.

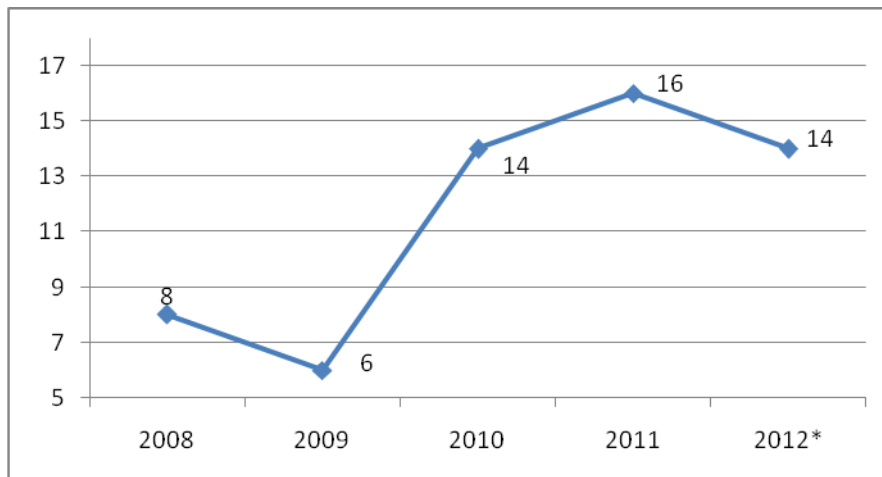
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai visi menjadi pusat pendidikan dan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara tentunya akan sedikit terganjal dengan beberapa kasus kejahatan yang ada. DIY sebagai Kota Pelajar akan ternodai dengan kasus narkotika, perjudian, perkosaan dan tingginya pencurian kendaraan bermotor, sebagai orang tua pengirim pelajar dan mahasiswa tentunya akan merasa khawatir untuk menyekolahkan putra-putrinya ke DIY. Citra pariwisata juga dipertaruhkan dalam usaha menggaet wisatawan baik mancanegara maupun nusantara serta lokal untuk menikmati sajian dan destinasi wisata yang ada.



Komitmen dari berbagai pihak diperlukan untuk dapat menurunkan secara signifikan kasus-kasus kejahatan yang masih terjadi di wilayah hukum DIY, bahwa rasa aman menjadi kebutuhan pertama dari manusia atau masyarakat.

4.10.3. Aktivitas Legislatif DPRD dan Pemda

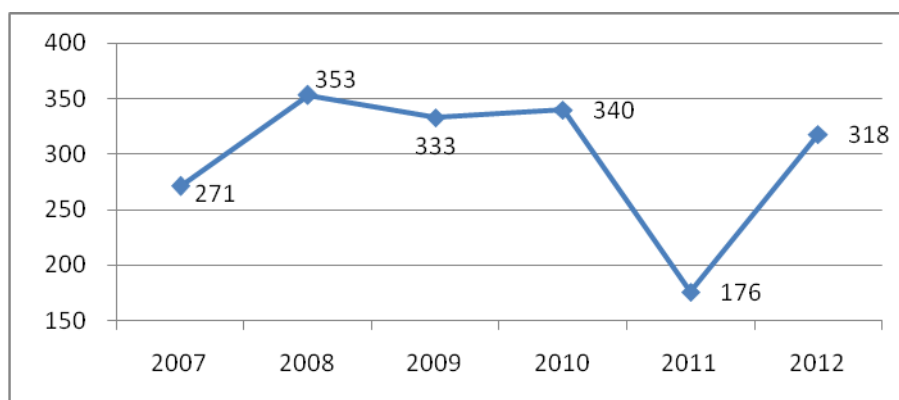
Aktivitas legislasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun terjadi fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan semakin meningkat selama lima tahun antara tahun 2008-2012. Kecenderungan yang semakin meningkat ini sebaiknya diikuti dengan peningkatan pola hubungan yang baik agar tidak mengalami penurunan baik dalam kualitas dan kuantitas peraturan daerah yang dihasilkan.



Gambar 4.48. Jumlah Peraturan Daerah yang Telah Diterbitkan, Tahun 2008-2012
Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2012

4.10.4. Kegiatan Unjuk Rasa Masyarakat

Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat sebagai bagian dari penyampaian aspirasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih bisa dikategorikan sebagai hal yang wajar mengingat kegiatan ini tidak diikuti dengan aksi anarki. Kegiatan unjuk rasa dilaksanakan sebatas pada penyampaian aspirasi semata.



Gambar 4.49. Kegiatan Unjuk Rasa Masyarakat Tahun 2007-2012

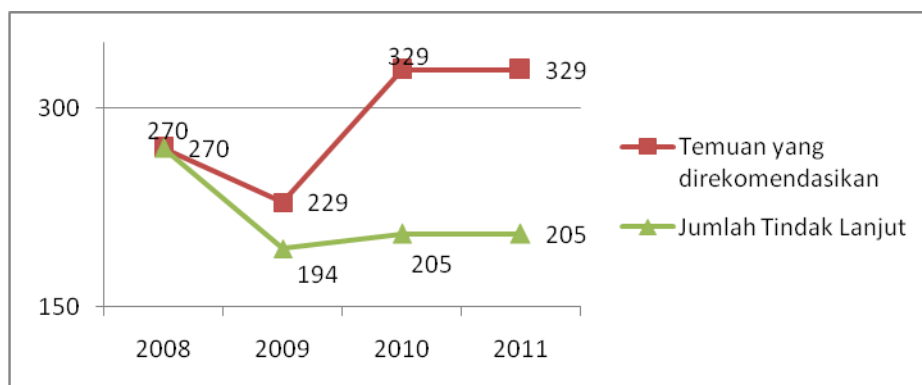
Sumber: Polda DIY, 2012

4.11. Mengukur Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menyediakan Infrastruktur Fisik, Peraturan Serta Aturan Main Kompetisi

Kualitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur fisik, peraturan serta aturan main dari kompetisi akan diukur dengan berbagai indikator berikut ini.

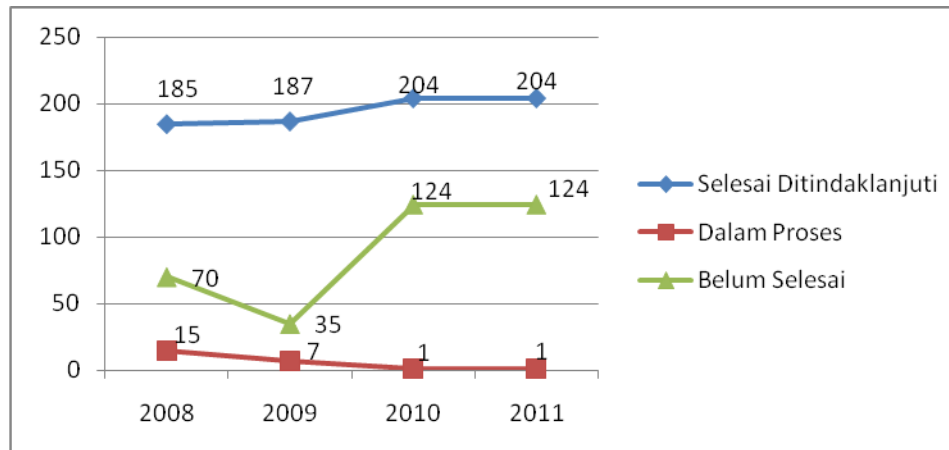
4.11.1. Korupsi dan Suap

Pewujudan *Good Governance* salah satunya adalah akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja birokrasi salah satu didalamnya termasuk capaian fisik dan keuangan. Berdasarkan pada temuan pada pemeriksaan keuangan masih ditemukan temuan penyimpangan selama empat tahun terakhir yakni tahun 2008-2011. Jumlah tindak lanjut temuan mengalami trend penurunan sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 4.50. Temuan Hasil Pemeriksaan, Tahun 2008-2011

Sumber: Inspektorat DIY, 2012*



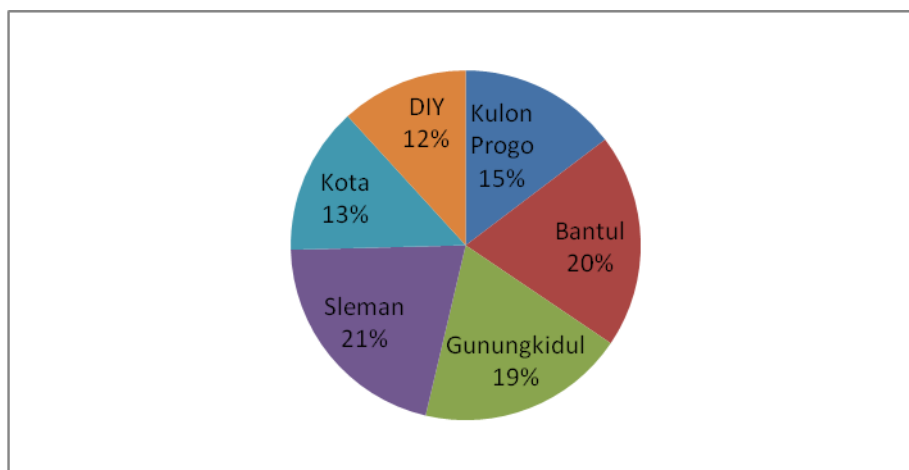
Gambar 4.51. Klasifikasi Tindak Lanjut Temuan, Tahun 2008-2011

Sumber: Inspektorat DIY, 2012

Temuan yang ada kemudian ditindaklanjuti dengan penyelesaian, namun dalam empat tahun terakhir yakni 2008-2011 terjadi peningkatan dalam temuan yang diselesaikan dan disatu sisi peningkatan kasus yang belum selesai juga meningkat. Sederhana dapat dikatakan bahwa peningkatan atas temuan yang diselesaikan belum signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan kasus yang belum selesai.

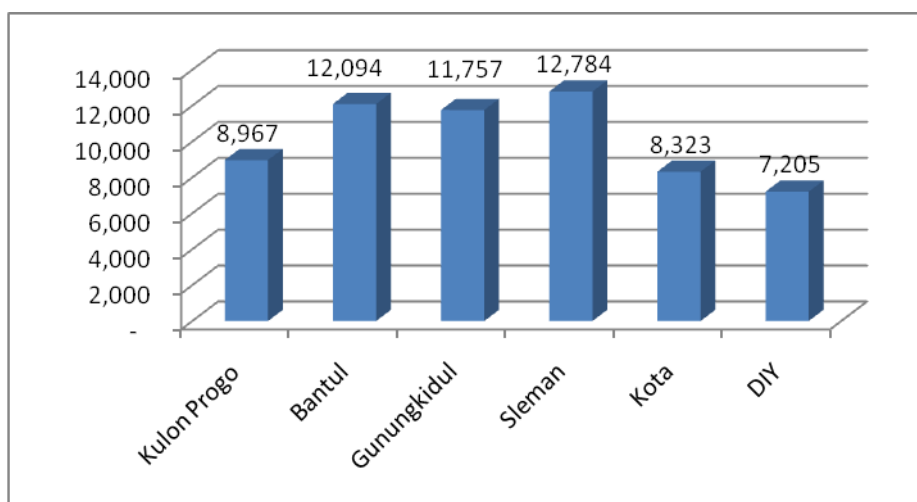
4.11.2. Kompetensi aparat pemerintah (tingkat pendidikan)

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan salah satunya disupport dengan jumlah dan kualifikasi aparat birokrasi. Tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat menjadi sebuah hal yang tidak terelakkan untuk dituju oleh segenap jajaran birokrasi pemerintahan. Berdasarkan jumlah PNS tertinggi adalah Kabupaten Sleman dengan 12.784 (21%) orang; Kabupaten Bantul 12.094 (20%) disusul oleh Gunungkidul 11.757 (19%) orang dan Kulon Progo 8.967 (15%). Jumlah personil PNS ini sejalan dengan luas wilayah DIY yang secara proporsi merupakan keempat wilayah terluas, Sleman 574 km² (18,04%); Gunungkidul 1.485 km² (46,63%); Bantul 506 km² (15,91%) dan kulon Progo 586 km² (18 %).



Gambar 4.52. Persentase Jumlah PNS di DIY, Tahun 2012

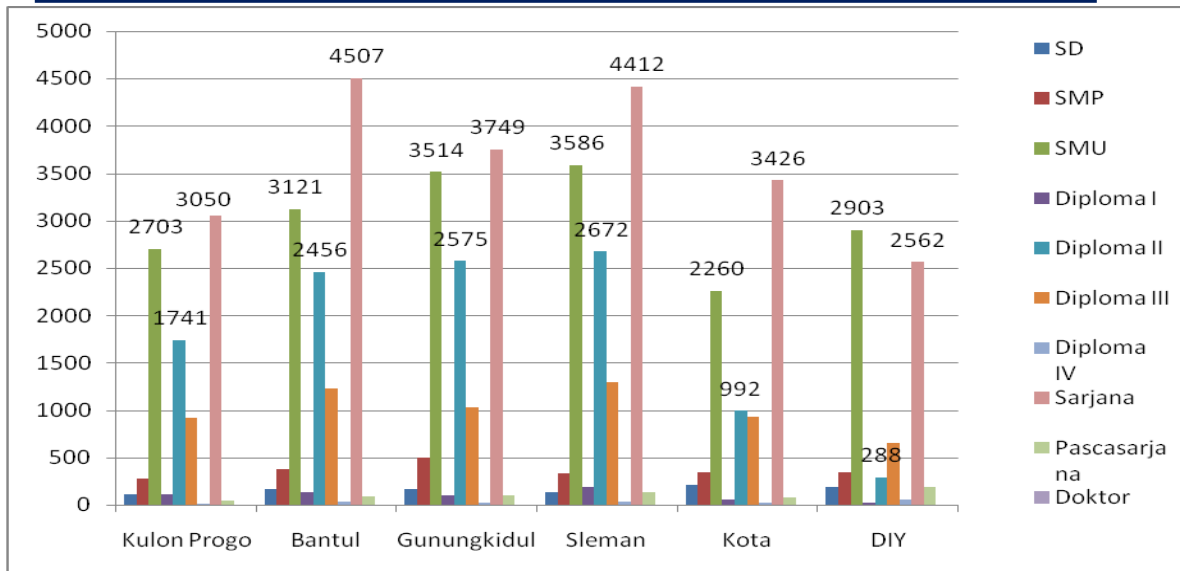
Sumber: DDA DIY, 2012



Gambar 4.53. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan D.I. Yogyakarta

Sumber: DDA DIY, 2012

Mayoritas dimasing-masing kabupaten-kota dan DIY bahwa tingkat pendidikan mayoritas berada pada tingkat Sarjana, Diploma II; SMU dan Diploma III. Komposisi yang sedikit berbeda pada DIY dimana mayoritas pada SMU, Sarjana, diploma III serta jumlah pasca sarjana tertinggi diantara kabupaten-kota yang ada. Berdasarkan pola tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa secara umum pendidikan PNS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada pendidikan Menengah, diploma dan sarjana.



Gambar 4.54. Tingkat Pendidikan PNS di DIY, Tahun 2012.

Sumber: DDA DIY, Tahun 2012

4.11.3. Efisiensi dalam pelayanan publik

Efisiensi dalam pelayanan publik sudah dibuatkan perangkat seperti ASB (Analisis Standar Biaya) dan SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa). Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tiga tahun terakhir adalah:

- LKPD Tahun 2009 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2009 senilai Rp3.255.476.545.350,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum melakukan penilaian atas saldo awal aset tetap dan pencatatan aset tetap pada sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- LKPD Tahun 2010 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral masih mencatat aset daerah yang telah digunakan oleh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena aset tersebut belum dilakukan penyerahan secara resmi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).



Analisis Daya Saing Daerah

- LKPD Tahun 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas yaitu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum menyajikan investasi non permanen dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan aset tetap belum dilakukan penyusutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

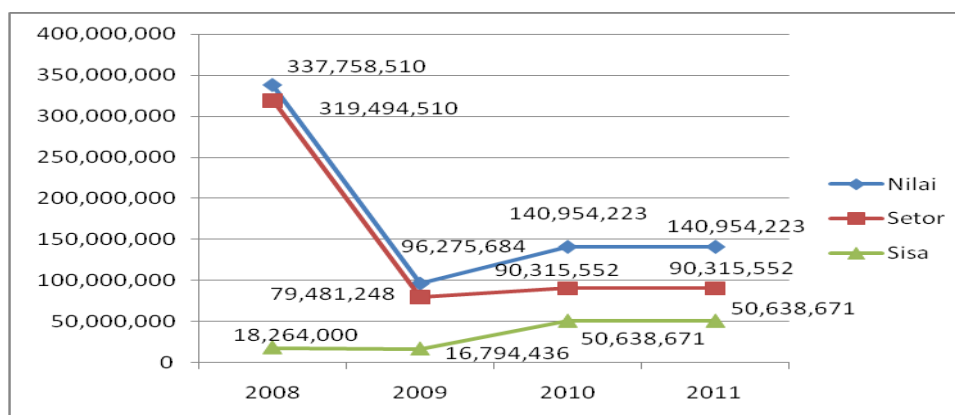
Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2009-2011 adalah sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 4.50.
Opini BPK atas LKPD Kabupaten-kota, Tahun 2009-2011

No	Kabupaten-Kota	Tahun		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP
2	Sleman	WDP	WDP	WDP
3	Bantul	WDP	WDP	WDP
4	Gunungkidul	WDP	WDP	WDP
5	Kulon Progo	WDP	WDP	WDP

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017

Efisiensi atas keuangan negara atas kerugian selama empat tahun mengalami penurunan jumlah dan progresnya menunjukkan peningkatan yang positif. Artinya kinerja penyelamatan dan pengembalian atas kerugian keuangan Negara semakin meningkat setiap tahunnya.



Gambar 4.55. Kerugian Negara, Tahun 2008-2011

Sumber: Inspektorat DIY, Tahun 2008-2011